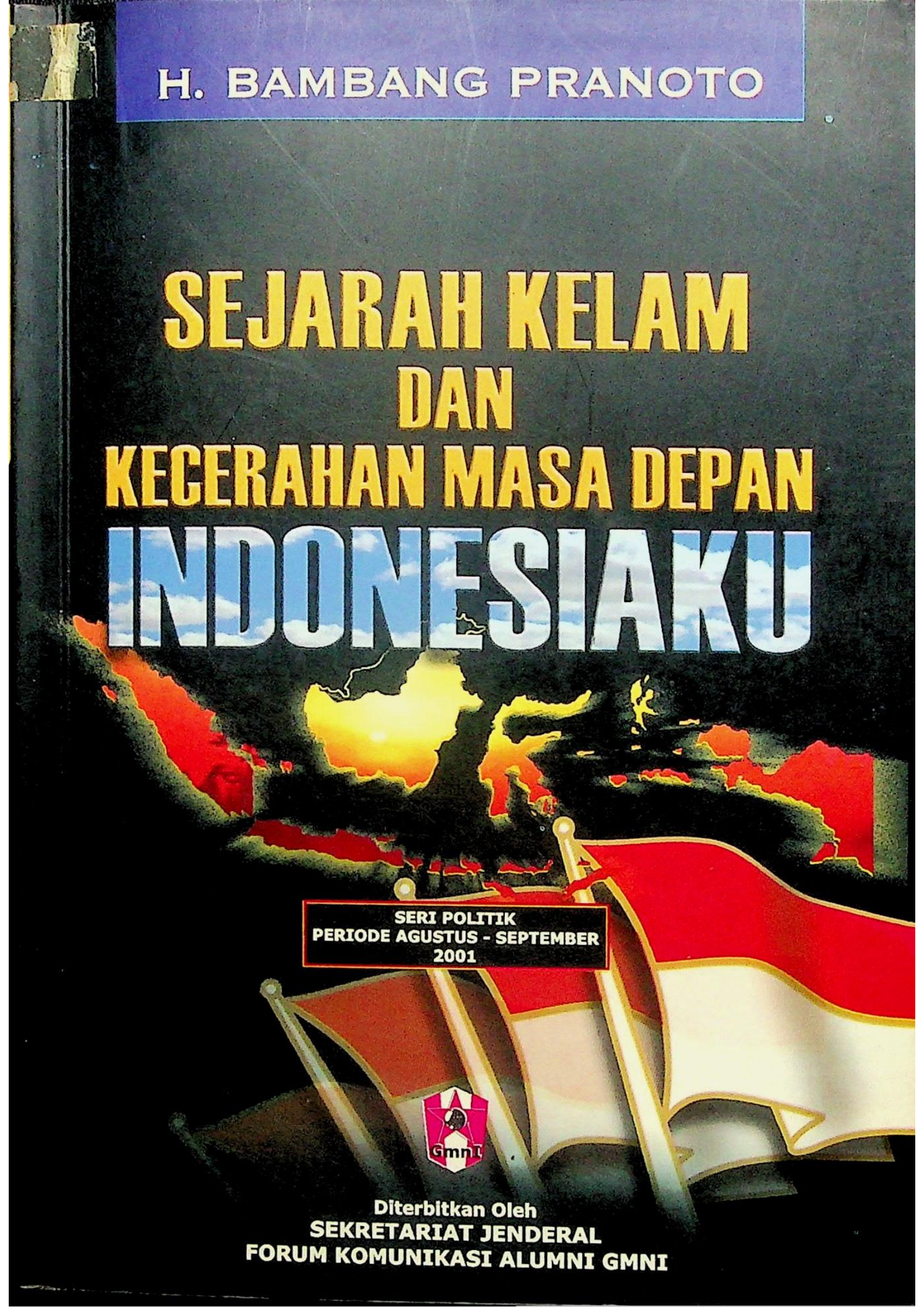
H. BAMBANG PRANOTO

SEJARAH KELAM DAN KECERAHAN MASA DEPAN INDONESIAKU



SERI POLITIK
PERIODE AGUSTUS - SEPTEMBER
2001

Diterbitkan Oleh
SEKRETARIAT JENDERAL
FORUM KOMUNIKASI ALUMNI GMNI



Ir. H. Bambang Pranoto, MM.Mk

Penulis, Anggota DPRMPR-RI Fraksi PDI Pejuangan - Sekretaris Jenderal Dewan Konsultatif Nasional FKA GMNI - Lahir di Purwokerto, 4 Oktober 1951 - Mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Diponegoro 1976-1978 Lulus Sarjana Teknik Sipil tahun 1979 - Menekuni Profesi Konstruktor dan menjadi Dosen Tetap pada Universitas Diponegoro selama 20 tahun (1980-2000) serta memperdalam Manajemen khususnya Manajemen Keuangan dan Opersional (Proyek Konstruksi) di Universitas Islam Indonesia Jogyakarta 1995. Aktifis GSNI sejak SMP, Ketua Bidang Organisasi Gerakan Pemuda Marhaenis Jawa Tengah (1980-1983), Koordinator Wilayah GMNI Jawa Tengah (1976-1978) dan Pendiri Forum Komunikasi Alumni GMNI di Semarang (1994) - Ketua Forum Komunikasi ALumni GMNI Jateng (1984-sekarang) - Salah satu pendiri PDI-Mega Jawa Tengah - Ketua Balibang PDI Perjuangan 1996-2000 - Ketua Departemen Program DPD PDI Perjuangan Jateng 2001 hingga sekarang.

Menulis baginya merupakan bagian dari kegiatan politiknya. Selama menjadi anggota DPR-RI sedikitnya 10 artikel setiap bulannya ditulis dan dibagikan dalam foto copy kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR-RI. Atas fasilitator Sekretariat Jenderal FKA GMNI, karya tulis tersebut diterbitkan dalam bentuk buku antara lain,

- Rakyat, Korban ambisi politik - terbit akhir tahun 2000
- Konflik Politik dalam prespektif Kebangsaan - terbit bulan Juni 2001
- Solusi (sidang) Istimewa Konflik Politik - terbit akhir tahun 2001
- Membangun Paradigma Baru Konstruksi Indonesia - terbit awal Oktober 2001
- Sejarah Kelam dan Kecerahan Masa Depan Indonesiaku - terbit akhir oktober 2001

Telah disiapkan terbitan berikutnya,

- Reaktualisasi Demokrasi Terpimpin
- Megawati Soekarnoputri, Ibu Rakyat (Marhaen) Indonesia
- RAPBN - sistem konservatif pengelolaan uang rakyat
- Nasionalisme bagi kader pemula

ISBN : 979 — 96707 — 0 — 5

H.BAMBANG PRANOTO

SEJARAH KELAM
DAN
KECERAHAN MASA DEPAN
INDONESIAKU

SERI POLITIK
PERIODE AGUSTUS – OKTOBER
2001

Diterbitkan Oleh
SEKRETARIAT JENDERAL

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

H. Bambang Pranoto
Sejarah Kelam dan Kecerahan Masa Depan Indonesiaku
oleh H. Bambang Pranoto, ---- Jakarta : Sekretariat Jenderal GMNI
178 hlm. : 21 cm. x 14,5 cm.

ISBN 979 — 96707 — 0 — 5

Seri Politik Periode Agustus - Oktober 2001

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Sejarah Kelam dan Kecerahan
Masa Depan Indonesiaku

Penulis :
H. Bambang Pranoto

Penerbit :
Sekretariat Jenderal GMNI

Cetakan Pertama :
Oktober 2001

Desain Sampul :
Tafta

Dicetak oleh :
Mitra Hardhasuma

Biarlah air mengalir karena,
Tak mungkin terbendung.

Biarlah angin terus berhembus
semakin kencang karena,
Tak mungkin bisa tertahan.

Biarlah batu hati itu terus membaja
Karena tak mungkin terbelah.

Biarlah api semangat kebangsaanku
Tetap berkorban membara
dibumi persada
untuk tetap setia
Mendampingimu, Ibu Pertiwi yang
Kucintai bersama duka
Tangismu dan doamu tentang
Negeri ini.

Semarang, 4 OKTOBER 2001
50 Tahun, H. Bambang Pranoto

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **Hal. 01 – 02**
KATA PENGANTAR **Hal. 03**

BAGIAN PERTAMA :
POLITIK KEKUASAAN DI INDONESIA **Hal. 04 - 28**
I.1. Politik dan Kultural, Mengantar Kelamnya Sejarah Suksesi di Indonesia
I.2. Indonesia Masa Depan, Tergantung Sikap Elit Politik
I.3. Mengakhiri Sejarah Kelam, Mencerahkan Masa Depan Politik Indonesia
I.4. Membangun (kembali) Tradisi Demokrasi Di Indonesia

BAGIAN KEDUA :
GEMA NASIONALISME **Hal. 29 - 45**
II.1. Gus Dur, Terima Kasih
II.2. Nasionalisme Megawati, Ideologi Perjuangan
II.3. Kelahiran Putri Sang Fajar, Merekahkan Senyum Ekonomi Yang Kusut

BAGIAN KETIGA :
TANTANGAN IDEOLOGIS KE DEPAN **Hal. 47 - 75**
III.1. Peta Politik Nasional dan Fenomena Konflik Politik Segitiga Samasisi
III.2 Amendemen UUD 1945, Mengapa, Siapa dan Untuk Apa
III.3. Memudarnya "Aliansi" Islam Politik –Nasionalis !
III.4. Metamorfosa Demokrasi Di Indonesia

BAGIAN KEEMPAT :
TENTANG KABINET GOTONG ROYONG **Hal. 76 - 100**
IV.1. Lambatnya Penyusunan Kabinet Mega
IV.2. *The Dream Team of* Megawati
IV.3. Kabinet Gotong Royong
IV.4. Ganjalan Kebinet Megawati
IV.5. Revolusi, Reformasi atau Dekonstruksi
IV.6. Megawati, Menghadapi Sparatisme Di Indonesia

BAGIAN KELIMA :
AGENDA MENDESAK **Hal. 101 - 132**
V.1. Bisakah APBN 2002 Pulihkan Ekonomi ?
V.2. Perbankan Nasional Masih Koma
V.3. Hibah Untuk Pejabat, Suatu Tinjauan Sosial Politik
V.4. Mdemorandum APBN 2002

BAGIAN KEENAM :
POLITIK LUAR NEGERI MEGAWATI **Hal. 133 - 174**
VI.1. Langkah Politik Luar Negerį Megawati
VI.2. Pemutusan Diplomatik, Membahayakan
VI.3. *Go To Hell With Your Aids*, Dulu dan Sekarang, Idealisme dan Kemunafikan
VI.4. Indonesia Terjepit pada Posisi Konflik Dunia Kontemporer
VI.5. Anti Imperialisme, Camkan itu!

DAFTAR BACAAN **Hal. 175 - 178**

KATA PENGANTAR

SAMBUTAN yang demikian antusias dari pembaca terhadap himpunan artikel-artikel terjilid ini sungguh membanggakan penulis. Banyak respon dalam bentuk langsung, tertulis dan juga banyak melalui telepon lebih memberikan dorongan kuat kepada penulis untuk menulis, menulis dan menulis lagi. Oleh karena ini tanpa melenceng dari pokok dan ciri tulisan-tulisan seperti yang lalu yaitu penonjolan kepada masalah politik ideologis, buku yang keempat yang ada ditangan anda Alhamdullilah telah terbit.

UNTUK TERBITAN yang dimulai buku ini, penulis akan berupaya terus meningkatkan intelektualitas politik dengan memasukan referensi dan respons pemahaman atas banyak sumber bacaan antara lain dari tulisan-tulisan yang dimuat dalam media internet, Surat kabar, Tabloid, Buku, Bahan Seminar dll. sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka dilembar halaman terakhir buku ini.

MASALAH PERANG AS-Afganistan, cukup proporsional dicermati dan kemudian dikemas dalam tulisan di bab-akhir, adalah menunjukan komitmen penulis terhadap ajaran Bung Karno "*Anti Imperialisme – Camkan itu!!*"

INSYALLAH atas dukungan dari semua pihak, kami akan terus berkarya menulis. Bukan basa basi, apabila ada yang perlu disempurnakan akanlah senang penulis mendapatkan saran dan kritik yang membangun.

Penulis

BAGIAN PERTAMA
POLITIK KEKUASAAN
DI INDONESIA

I – 01
POLITIK DAN KULTURAL, MENGANTAR KELAMNYA SEJARAH SUKSESI DI INDONESIA

DUNIA POLITIK adalah sebuah asset kehidupan yang dapat memberikan kegairahan hidup dan dapat menghiasi keindahan taman kehidupan bak seni dalam membangun kepuasan hati. Tetapi sebagian orang menganggap bahwa politik adalah dunia ketololan dan bahkan dibenci karena kotor. Tetapi sebagian lagi menganggap bahwa dunia politik itu adalah bagian dari usaha untuk dapat hidup mencari nafkah!. Nah anda ada digolongan yang mana.

KEKUASAAN DAN KEMULIAAN, Oleh karena itu penulis sebelum mengajak lebih jauh lagi secara serius mengarungi dunia politik, tidak salah apabila sekali ini didahulhi dengan diskusi mengenai dunia politik dari prespektif atau menggunakan arah pandang Kekuasaan dan kemuliaan. Kekuasaan dan kemuliaan adalah merupakan dua wilayah yang berbeda sama sekali. Untuk keperluan membahas ini dapat dikatakan bahwa, pertama berasosiasi pada otoritas dan kepatuhan, dan kedua berasosiasi pada keagungan dan penghormatan.

TERMINOLOGI KULTURAL. Kekuasaan mengisyaratkan kapasitas mempengaruhi bahkan memaksa pihak lain untuk melakukan sesuatu secara patuh. Sedangkan kemuliaan mengisyaratkan aura, semacam getar gaib yang

menerbitkan ketakziman pihak lain. Kekuasaan adalah terminologi politik, sedangkan kemuliaan bisa diperlakukan sebagai terminologi kultural.

DOMAIN UTAMA KEKUASAAN adalah praktik-praktik politik, sedangkan kemuliaan mungkin lebih umum diterima sebagai semacam *opus spirituale* yang tercermin langsung dalam perilaku. Kalau kekuasaan dihasilkan dari relasi-relasi sosial, kemulian hanya mungkin diraih melalui pengolahan rohani secara individual. Ekstrem negatif kekuasaan adalah pemanfaatan sumber-sumber daya koersif untuk menghabisi lawan, sedangkan kemuliaan pada titik ekstremnya bisa melahirkan ketakutan dan buta para pengikut. Kalau kekuasaan bisa menjadi tirani, kemuliaan berpotensi menghasilkan dogma.

PENYATUAN ANTARA KEKUASAAN. Secara teoritis kekuasaan tidak mensyaratkan kemuliaan seperti kemuliaan juga tidak pernah mengandaikan kekuasaan. Tapi dalam praktik dua hal ini tampaknya tidaklah mudah dipisahkan. Cukup beralasan jika dikatakan bahwa salah satu mimpi terindah masyarakat politik di Indonesia adalah justru berlangsungnya penyatuan antara kekuasaan dan kemulian pada, katakanlah, sosok pandita ratu, mahaguru yang suci-bijak-bestari sekaligus seorang raja yang adil dan perkasa. Napoleon yang manunggal dengan Goethe. Hal yang analog ketika seseorang yang serta merta sebelumnya mimpipun tidak, menjadi anggota DPR yang tentu dua hal diraihnya kekuasaan dan kemuliaan. Yang kemudian menjadi sebuah kekuatiran besar tentang hal kehilangan "jabatan" nya digoyang atau setidaknya berprospek pendek.

PEMBERHENTIAN GUS DUR. Utopisme semacam ini akan membantu menjelaskan riwayat kekuasaan modern di Indonesia. Pemberhentian Abdurrahman Wahid dari tahta

presiden melengkapi riwayat ganjil kekuasaan di negeri ini: setiap pergantian kepala pemerintahan selalu dilatarbelakangi oleh kemelut politik rumit berkepanjangan sedemikian rupa sehingga banyak orang berkeyakinan bahwa solusi terbaik hanyalah dengan mengganti pucuk pimpinan. Kenyataan seperti ini, paling tidak, mengindikasikan dua hal. **Pertama**, eksistensi seorang pemimpin pemerintahan senantiasa diandaikan sebagai hulu sekaligus muara dari nasib politik negara. Penyelenggaraan negara, dengan demikian, tidak diasumsikan sebagai mekanisme sistemik dan impersonal melainkan lebih sebagai perpanjangan kemampuan personal figur seorang pemimpin. **Kedua**, dalam rentang yang sangat panjang, sejarah masyarakat politik di Indonesia sebagian besar merupakan kisah bersambung wacana kekerasan. Suksesi jadi identik dengan perebutan kekuasaan.

MENJELANG KEJATUHAN WAHID, misalnya, sebagian masyarakat ditikam kecemasan akan kemungkinan timbulnya konflik horisontal yang bisa membawa prahara politik. Di pikiran kita waktu itu yang terbayang adalah darah dan tubuh bergelimpangan untuk sebuah kesia-siaan politik. Tampak jelas bahwa politik telah menjadikan tubuh biologis sebuah arena pertempuran. Parade kolosal petugas keamanan menjadikan bayangan menakutkan itu makin mendekati kenyataan. Ketika TNI dan Polri pamer kekuatan seperti sedang hendak memaklumkan sebuah perang besar, orang makin bertanya-tanya apakah negeri ini sudah akan habis.

SATU HAL MORONIS terjadi ketika yang dipagari puluhan ribu senapan dan mobil baja bukan rakyat tapi salah satu pihak yang jadi penyebab kerawanan politik: anggota parlemen dan MPR. Jika dibaca dari sebuah jarak kritis

fenomena seperti itu akan memunculkan pertanyaan problematik tentang keterlibatan mereka dalam membangun bayangan masyarakat tentang kekerasan yang muncul setiap terjadi suksesi kepala negara.

IA HARUS CUKUP KEJI. Banyak orang kemudian sering berpaling pada sejarah kelam suksesi kekuasaan dalam kerajaan-kerajaan besar di Jawa pra Indonesia--yang konon berlangsung melalui kekerasan, mewariskan luka sosial dan dendam politik turun temurun. Siapa pun yang ingin berkuasa, dengan demikian, ia harus cukup keji untuk menghargai lembar-lembar nyawa hanya jadi sederet angka statistik.

RITUS-RITUS PRIMITIF. Pergantian pemimpin jadi jauh lebih menyerupai ritus-ritus primitif dengan darah dan nyawa manusia sebagai tumbal bagi sebuah kemuliaan. Bayangan tentang kekuasaan sebagai kemuliaan semakin lengkap, ketika tahta kekuasaan juga dikukuhkan dengan simbol mahkota yang terbuat dari logam dan batu mulia. Kesatuan kuasa dan kemuliaan lantas diterjemahkan secara material menjadi sumber-sumber kemakmuran ekonomis. Karena itu cukup mengharukan bahwa salah satu motivasi dominan orang memperebutkan jabatan publik di sini bukan terutama untuk mengabdikan diri kepada negara, melainkan untuk meraih sumber-sumber kemakmuran. Praktik-praktik kotor seperti kolusi dan korupsi menjadi keniscyaan dalam kosmologi seperti itu.

WILAYAH SPIRITUAL. Telaah klasik seperti yang telah dilakukan oleh Ben Aderson (1972) dan Wessing (1978), misalnya, memperlihatkan kepada kita bahwa konsep kuasa dalam masyarakat Jawa tempo dulu niscaya ditarik masuk ke wilayah spiritual bahkan supranatural. Selain dianggap

konkret seperti dalam analisa Ben Anderson, kekuasaan juga dipahami sebagai sesuatu yang sumber-sumbernya tidak berasal dari dunia sosial melainkan dari dunia di atasnya. Sumber kuasa diyakini berada di seberang realitas.

PADA DEKADE 1960-AN, misalnya, kita pernah mengenal gelar Panatagama Senapati ing ngalaga dan Pemimpin Besar Revolusi yang disematkan hanya pada dada satu orang, Soekarno. Dalam sosok Soekarno rakyat membayangkan integrasi antara keperkasaan seorang panglima perang dan kemuliaan seorang pemimpin spiritual (agama), sehingga kekuasaan menjadi memusat dan total. Ia jadi hulu dari mana negeri ini bisa merebut martabat eksistensial di hadapan bangsa-bangsa lain, dan pada saat yang sama ia juga jadi muara ke mana seluruh energi rakyat mengalir untuk mencapai samudra kebesaran sebuah bangsa. Soekarno bukan saja seorang presiden tapi juga nabi bahkan seorang mesiah.

PADA DEKADE 1980-AN. Soeharto ditengah tengah masa kejayaannya terseret kedalam mitos-mitos kekuasaan dan kemuliaan dengan diangkatnya rame-rame oleh pengikut-pengikut yang berhasil diciptakannya sendiri sebagai pengikut. Tidak tanggung-tanggung melalui lembaga DPR/MPR yang beranggotakan mayoritas bulat mengangkat sebagai Bapak Pembangunan. Yang pada akhirnya juga menjadikan melejitnya bangunan kekuasaan itu runtuh 20 tahun kemudian oleh karakter yang kuat namun melenceng dari karakter kepempimpinan yang seharusnya.

RAJA PESAWAT HABIBIE. Meskipun hanya 500 hari berkuasa karya karyanya sangat spektacular. Kekuasaannya cenderung diselenggarakan secara ngawur ala Hitler. Tercatat ratusan untuk tidak mengatakan ribuan Peraturan

Pemerintah , Undang-Undang dan Keppres ditanda tangani selama 500 hari tersebut secara membabi buta. Kita tidak tahu persis jumlahnya tetapi kalau dirata-rata mencapai minimal 2 buah Kepress, PP dan UU ditandatangani setiap hari. Mungkin diilhami oleh kecepatan dan kecanggihan pesawat hobbynya itu, yang pada akhirnya menyerah ketika harus jatuh oleh faktor Human Error (maksudnya Habibie Sendiri). Habibie akhirnya sangat tidak populer atas kegegabahannya itu, puncaknya memberi obsi yang mendorong Timor-timur lepas dari Indonesia.

TAHUN 1999 YANG LALU sebagian masyarakat kita juga pernah menaruh harapan sangat besar pada penjelmaan tunggal sosok ulama dan umara sekaligus, Abdurrahman Wahid. Utopisme semacam itu ditopang oleh rasa takut kolektif yang hampir bersifat mitis akibat penciptaan wacana kekerasan. Sebelum Wahid dipilih, misalnya, para petualang politik secara eksesif telah menciptakan dan memanipulasi wacana tentang bahaya perang saudara kalau kompetisi politik di antara dua kekuatan terbesar waktu itu, Golkar dan PDI-Perjuangan , tidak dicarikan jalan ke luar secara damai. Tepat di ujung abad 20 pada tingkat wacana kita seperti dikembalikan ke masa perang paregreg berabad yang lalu.

MANUVER-MANUVER POLITIK .Celakanya, penyelesaian yang dipilih tidak didasarkan pada perhitungan hasil suara pemilu melainkan melalui manuver-manuver politik tingkat tinggi. MPR bukan memilih salah satu dari dua kandidat melainkan malah mengajukan satu calon lain yang sama sekali tidak terlibat dalam kompetisi dari awal, Abdurrahman Wahid. Dari situ kita bisa melihat bagaimana para politisi mengelola pertentangan: konflik tidak dihadapi dengan respon positif tapi dihindari.

PARADOKSAL Solusi damai dicapai bukan melalui kerelaan satu pihak menerima kemenangan politis pihak lain secara terbuka dan dewasa, melainkan dengan meniadakan pertentangan. Wahid dipilih bukan karena ia meraih suara terbesar rakyat, tapi karena kemungkinan resistensi terhadapnya diasumsikan paling kecil. Latar belakang seperti itu telah menempatkan Wahid sebagai seorang mesiah baru. Orang yang tiba-tiba muncul jadi penyelamat bangsa dari potensi kehancuran-yang sebenarnya hanya ada dalam khayalan. Kita ingat bagaimana beberapa orang menyambut Wahid sebagai berkah Tuhan untuk bangsa. Tetapi semuanya akan terbukti bahwa keajaiban yang bersumber dari penciptaan mistos dalam berpolitik selalu terbukti paradoksal dikemudian hari. Seperti halnya menimpa semua pemimpin (di Indonesia),. Soekarno, Soeharto, Habibie dan Abdurrachman Wahid.

SUARA DARI LANGIT. Khususnya dalam kasus-kasus Soekarno, Soeharto dan Wahid, kemuliaan diandaikan melekat pada kekuasaan. Kalau Soekarno dianggap Ratu Adil, Soeharto sebagai bapak pembangunan masih cukup segar dalam ingatan bagaimana Amien Rais menunjuk Wahid sebagai figur yang mendapat dukungan "suara dari langit". Secara sembrono Wahid dianggap memiliki legitimasi dari dua dunia sekaligus: realitas politik bahwa ia tidak akan menghadapi resiko penentangan cukup besar, dan berkah lumen supra naturale atau wahyu dari langit yang akan memberkati tahtanya. Tetapi kemudian apa yang terjadi ?

NASIB TRAGIS. Dalam sebuah masyarakat politik dengan tradisi panjang kepercayaan pada mesianisme, pernyataan seperti itu tentu saja bisa diartikan bahwa tahta yang akan diberikan kepada Wahid bukan semata kekuasaan sekular melainkan juga amanat suci spiritual. Kuasa yang menyatu

tubuh dengan kemuliaan yang pad akhirnya ambruk bersama. Secara sadar mereka telah menjebak rakyat dalam perangkap kesalahan sejarah dan kecelakaan intelektual yang akibat-akibat buruknya masih kita rasakan sampai hari ini. Nasib tragis yang menimpa Wahid sebenarnya sudah terbayang sejak awal. Runtuhnya kekuasaan dan kemuliaan sebagai presiden menuju pembangunan kekuasaan dan kemuliaan dalam format lain. Format kepemimpinan tanpa konsep ala Amien Rais!. Coba saja ikuti terus perpolitikan kita!.

I – 02
INDONESIA MASA DEPAN, TERGANTUNG SIKAP ELIT POLITIK

INTERAKSI POLITIK "ARUS PENDEK" Tak dapat dipungkiri, interaksi politik antara Presiden Megawati dengan Wakil Presiden Hamzah Haz bagai hubungan listrik arus pendek yang berpotensi untuk meledak dan terbakar. Karena bagaimanapun sebuah kenyataan sejarah bahwa Mega dan Hamzah adalah tokoh yang sangat berpengaruh sebagai representasi dari dua kelompok politik kontemporer Poros Tengah dan tokoh simbolik politik tradisional nasionalis yang sudah barang tentu memiliki korelasi yang signifikan dalam sejarah konflik politik ideologis sejak proklamasi kemerdekaan. Sketsa "*pre-judiced*" politik demikian tentu akan menjadi terlalu ekstreem dan salah apabila latar belakang perbedaan karakter ideologis serta kesejarahan konflik politik pasca Pemilu 1999 ditinggalkannya oleh mereka berdua dan kemudian secara bersama-sama mengedepankan kepentingan negara, realita dari penderitaan rakyat dan jatuhnya moralitas bangsa yang sangat memperihatinkan ini.

KESEJARAHAN TENTANG KONFLIK politik dan ideologi klasik bagi bangsa ini memang dapat dirasakan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi setiap peduli masa depan bangsa ini. Batapa tidak? Perbedaan karakter ideologis secara teoritis tidak akan begitu saja terbenam

hanya karena kepentingan politik pragmatis. Masa-masa bulan madu setelah berhasil memaksa Gus Dur terlempar kembali ke wilayah politik periferal dan menempatkan Megawati pada kekuasaan politik sentral melalui suksesnya Sidang Istimewa MPR 2001 tidak akan bersifat permanen dan akan segera berlalu bahkan secara sistemik akan dilemahkan. Secara teoritik, benturan politik ideologis antara Presiden Megawati dengan Wakil Presiden Hamzah Haz potensial akan terjadi, bahkan cenderung niscaya meskipun manivestasinya berbeda dengan bentuk konflik politik yang pernah berlangsung.

SETENGAH HATI. Analisis yang menunjukkan bahwasanya Mega-Hamzah merupakan duet kepemimpinan nasional yang ideal, patut diuji oleh realita sejarah. Meskipun logikanya dalam sosiologi politik, proyeksi politik adalah fakta-fakta empirik kesejarahan yang terjadi. Peneguhan perimaan politik Megawati dan Hamzah masing-masing boleh dibilang setengah hati. Mengapa?. Karena dalam sejarah modern sekalipun, benturan komunitas politik Nasionalis dan Islam politik akan sulit melemah bahkan rentan untuk selalu muncul kembali. Oleh karena itu maka selama hal tersebut berlangsung, interaksi politik antara Simbol komunitas Nasionalis Megawati dengan Islam politik Hamzah Haz akan tetap memiliki potensi masalah dan kontraproduktif.

KESINAMBUNGAN KONFLIK IDEOLOGIS. Indikasi akan adanya bangunan politik klasik belum lama ini muncul dengan direpresentasikan kembali poros tengah dilapangan dengan memulai merusak masa "bulan madu" politik oleh cara mewacanakan kembali *The Jakarta Charter* . Kurang bijak apabila poros tengah memaksakan sikap politiknya di tengah situasi politik nasional yang rawan disintegrasi seperti dewasa ini. Bahkan dalam "analisis" yang dimuat di

SUARA MERDEKA , saya menyatakan bahwa dengan digerakkannya demo yang hampir 1000 orang yang mayoritas wanita berjilbab bak menyiram air garam dalam luka bangsa ini yang baru saja mencoba dengan upaya menyembuhkan luka yang dalam bangsa ini melalui Sidang Istimewa MPR 2001 yang berlangsung baru saja belum 2 minggu.

BAHWASANYA pemunculan wacana *The Jakarta Charter* membuktikan poros tengah mengingkari komitmen moral dengan komunitas nasionalis (baca : PDI Perjuangan). Karena menjelang pemilihan wakil presiden telah dicapai komitmen moral yang amat mulia antara poros tengah dengan PDI Perjuangan dalam melakukan kompromi politik, sebuah kontenplasi politik juga telah terbangun dengan munculnya menu politik nasional yang baru, apa yang dinamakan dengan koalisi permanen. Yang kemudian diketahui memiliki mainstream memberikan dukungan politik pada Hamzah Haz untuk menjadi wakil presiden dengan "konsesi" bahwa poros tengah akan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Megawati yang pernah dipersoalkan melalui isue jender dan keraguan "ke-Islam-an" Mega serta tak akan mempermasalahkan Dasar Negara Pancasila hingga tahun 2004.

TERDAPAT dua kemungkinan yang kontroversial berkaitan dengan duet kepemimpinan nasional Mega-Hamzah, yaitu :

1. Duet Mega Hamzah akan mampu menciptakan sinergi politik antara kekuatan nasionalis dengan Islam politik yang berdayaguna mengatasi disintegrasi nasional dan mampu membangun re-covery ekonomi nasional.
2. Melihat fokus dan locus kepentingan politik kontemporer, duet Mega-Hamzah justru akan menambah kobaran

disintegrasi nasional, dengan diawali terbelahnya kekuatan nasionalis dan Islam politik karena konflik ideologis dan konflik politik kekuasaan.

KONFLIK IDEOLOGIS berkaitan dengan wacana dasar negara dan dinamika politik menjelang Pemilu 2004 serta pemilihan Presiden/Wapres secara langsung menumbuhkan kekhawatiran munculnya kecenderungan konflik politik antara komunitas nasionalis dengan Islam politik semakin meruncing.

POLITIK KEKUASAAN. Melihat situasi politik dewasa ini kentara sekali orientasi politik kekuasaan lebih dominan ketimpang orientasi pada pen-sejahteraan rakyat. Partai-partai politik sudah mulai konsentrasi pada Pemilu 2004. Amien Rais dan Akbar Tanjung bahkan pagi-pagi sudah berkampanye untuk menjadi presiden. Sebuah sikap yang sulit untuk dipahami untuk figur yang memiliki kapasitas sebagai ketua DPR dan Ketua MPR.

MEGAWATI sebagai eksekutif merupakan figur yang paling disulitkan karena adanya kecenderungan orientasi kekuasaan dalam dinamika politik nasional. Eksekutif dituntut untuk mampu menjawab harapan-harapan masyarakat tentang pemulihan ekonomi dan keamanan. Padahal kita tahu, pemulihan ekonomi dan keamanan untuk ukuran situasi Indonesia tidaklah semudah membalikan telapak tangan.

KEKECEWAAN RAKYAT mempunyai signifikansi dengan Pemilu 2004 dan agenda pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Kegagalan pemerintah dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintah akan menjadi tema kampanye populer lawan politik Megawati. Dapat dipastikan Amien Rais dan Akbar

Tanjung dan mungkin figur lainnya akan memanfaatkan situasi ini menuju kursi presiden.

DINAMIKA POLITIK nasional yang eskalatif membuahkan dugaan, sepertinya memang ada skenario meng-Gus Durkan Megawati dengan cara lebih konstitusional. Jikalau benar terjadi betapa hebatnya : dalam satu periode kepresidenan dua presiden berhasil digulingkan.

**) Makalah disampaikan dalam Pendidikan Kader GMNI Purwokerto 30 September 2001*

I – 03
MENGAKHIRI SEJARAH KELAM, MENCERAHKAN MASA DEPAN POLITIK DI INDONESIA

Sejarah suksesi kepemimpinan kita pada masa yang yelah berlalu itu sangat mirip dengan ritus-ritus primitip yang telah berlangsung ribuan tahun yang lalu, yang mengorbankan darah dan nyawa rakyat sebagai tumbal bagi sebuah datangnya kuasa (presiden) baru. Inikah abad global dengan alam pikiran politik yang masih primitif ? Ataukah hanya semata sebuah keharusan dari logika kekuasaan ? Tetapi alhamdullilah dan semoga itu adanya, proses yang demikian relatif cepat suksesi yang berlangsung antara Presiden Abdurrachman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sungguh tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan sebelumnya. Tanpa darah, tanpa nyawa dan berlangsung sangat tenang dan aman! Hal yang mengawali paradigma baru suksesi kepempimpinan bagi bangsa Indonesia. Hal yang tidak berlebihan peristiwa suksesi yang dapat dianalogi seperti halnya terjadi ketika Bung Karno diangkat oleh BPUPKI menjadi presiden pertama dipasca proklamasi dahulu.

CATATAN HITAM SUKSESI NASIONAL. Mencermati proses jatuh bangunnya pemimpin nasional kita pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, segenap kesadaran intelektual kita tertuju pada sebuah fenomena menarik dan mendebarkan hati yang acap kali menimpa bangsa kita. Fenomena itu adalah sebuah catatan hitam yang

menghampar di negeri yang berpotensi sebagai negara demokrasi besar di dunia. Lembaran hitam pertama ketika terjadinya suksesi antara Soekarno ke-Soeharto. Seterusnya Soeharto ke-Habibie, Habibie ke Abdurrachman Wahid. Karena sejarah mencatat bahwa tiap kali terjadi suksesi kepemimpinan nasional tersebut , selalu terjadi secara tidak sehat dan tidak normal. Catatan hitam suksesi nasional.

ADALAH SEBUAH KEGANJILAN-keganjilan yang tak pernah ditemukan padanannya dalam klausul-klausul konstitusi kita. Memang, suksesi adalah sebuah keharusan sejarah, namun kesadaran politik kita sepertinya terdampar oleh hasrat untuk saling menghantam, membunuh dan menguasai arena politik yang penuh syahwat kekuasaan. Akibatnya, sejarah republik ini belum pernah sekalipun melahirkan sebuah suksesi yang dapat dijadikan rujukan bagi generasi yang akan datang.

DONGENG PENGANTAR TIDUR kita serta cerita-cerita epos yang disodorkan oleh kurikulum pendidikan sejarah selalu bernuansa heroik dengan menempatkan tujuan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan politik. Sejarah kekuasaan tradisional kita selalu diwarnai oleh *intrik* dan *klik* yang terjadi di sekitar simpul-simpul kekuasaan kerajaan yang sangat feodal, mengutamakan kekerasan, serta selalu mempertaruhkan lember demi lembar nyawa manusia sebagai tumbal bagi syahwat kekuasaan. Inilah satu-satunya referensi politik bangsa ini untuk selalu dan selalu menjegal lawan politik ditengah jalan, apapun caranya. Persoalan apakah itu sesuai dengan konstitusi dan etika politik yang ada, apakah sesuai dengan norma-norma demokrasi atau tidak itu urusan belakangan.

HASRAT POLITIK yang paling dapat ditangkap oleh kemampuan awam kita adalah persoalan 'tahta'. Anatomi tahta itu sendiri kalau kita mencoba untuk sedikit berkontemplasi setidaknya mengandung dua dimensi, yaitu kekuasaan dan kemualiaan. Kekuasaan dan kemuliaan pada mulanya boleh jadi merupakan dua wilayah yang berbeda sama sekali, namun dalam praksis politik semuanya terjadi persenyawaan yang tak terpisahkan.

KEKUASAAN MENGACU pada otoritas dan kepatuhan, sedangkan kemuliaan mengacu pada keagungan dan penghormatan. Kuasa mengisyaratkan kemampuan mempengaruhi bahkan memaksa pihak lain untuk melakukan sesuatu. Kemuliaan mengisyaratkan aura, semacam getar ganjil yang menerbitkan ketakziman pihak lain. Kekuasaan adalah terminologi politik, sedangkan kemuliaan bisa diperlakukan sebagai terminologi kultural.

DOMAIN UTAMA kekuasaan adalah praktik-praktik politik, sedangkan kemuliaan mungkin lebih umum diterima sebagai semacam *opus spirituale* yang tercermin langsung dalam perilaku. Kalau kekuasaan dihasilkan dari relasi-relasi sosial, kemulian hanya mungkin diraih melalui pengolahan rohani secara individual. Ekstrem negatif kekuasaan adalah pemanfaatan sumber-sumber daya koersif untuk menghabisi lawan, sedangkan kemuliaan pada titik ekstremnya bisa melahirkan ketaklidan buta para pengikut. Kalau kekuasaan bisa menjadi tirani, kemuliaan berpotensi menghasilkan dogma.

DENGAN DEMIKIAN, dalam praksis politik Indonesia yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat, terjadinya penyatuan antara kekuasaan dan kemualiaan dalam sebuah sosok pemimpin kita. Itulah utopisme buta kita .....! Sejarah

politik Indonesia modern yang telah berlangsung sekian lama ternyata belum mampu menciptakan format suksesi yang sesuai dengan tujuan konstitusi kita. Setiap pergantian kepemimpinan nasional selalu diwarnai oleh kemelut politik sangat rumit dan selalu berkepanjangan. Oleh karena itu, rasionalisasi terbaik untuk hal ini adalah dengan mengganti pempimpin di tengah jalan. Itulah pikiran instan sebagian komunitas politik kita.

PARADE WACANA POLITIK kekerasan kemudian telah menjadi tontonan sehari-hari menjelang detik-detik terjadinya suksesi kepemimpinan nasional. Dan kembali rakyatlah yang dijejali dampak perang urat syaraf yang tiada henti-hentinya. Untuk selanjutnya, babak baru dari *ending* akrobat politik dengan menciptakan sosok pemimpin baru kembali akan dijadikan obyek dari keharusan sejarah politik Indonesia yang terjejali spirit menjatuhkan.

UNTUK ITULAH, sangatlah relevan ketika Presiden Megawati Soekarnoputri pada awal-awalnya telah memberikan penegasan bahwa Megawati tak dapat naik lagi, yang dapat hanya turun. Cuma persoalannya bagaimanakah bentuk turunnya nanti. Rupanya ia tengah mempersiapkan sebuah konvensi politik terbesar yang belum pernah terjadi di Indonesia.
Semoga saja Megawati mampu ....!

Kalibata, 24 Agustus 2001

I – 04
MEMBANGUN (KEMBALI) TRADISI DEMOKRASI INDONESIA

SATU TAHUN TERAKHIR INI konstelasi kepolitikan Indonesia diwarnai oleh perseteruan kelembagaan negara yang hampir saja meruntuhkan stamina bangsa kita. Kedua institusi demokrasi (kepresidenan dan DPR) yang merupakan élan vital dari proses demokratisasi di Indonesia seakan telah mati suri.

DEMOKRASI TELAH MENJADI sebuah arena pertempuran, tempat orang saling menghantam beradu jurus dan menebas untuk menang. Demokrasi, dalam konteks semacam itu, menjadi sebuah wacana tentang antipoda-antipoda kekerasan dalam dunia politik masyarakat sipil. Hak-hak konstitusional yang *inheren* mereka miliki, misalnya, tidak dipakai untuk menopang kehidupan politik sipil, melainkan untuk saling mengancam satu sama lain. Bukan untuk mengupayakan kemaslahatan orang banyak, tapi untuk saling mematikan.

DEMOKRASI yang tidak berada pada *vacuum* politik disadari atau tidak telah mereduksi tujuan dari praksis demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang merupakan nilai tertinggi dari peradaban modern ter-*reduksi* kedalam retorika-retorika *absurd* yang bertipikal anarkhis dan antinomianis dalam realitasnya.

PERSOALANNYA, mengapa semuanya ini dapat terjadi? Tulisan ini ingin memberikan deskripsi-analisis mengenai proses demokrasi di Indonesia yang dalam perjalanan bangsa Indonesia selalu diwarnai dengan kompleksitas persoalan politik itu sendiri. Dan juga realitas politik itu sendiri lebih memberikan pengaruh yang signifikan dalam membentuk format demokrasi Indonesia ke depan tentunya.

KONSEPSI DEMOKRASI, Substansi demokrasi adalah rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas bangsa dan negara yang termanifestasikan dalam demokrasi perwakilan. Perwujudan dari ini semua adalah sistem ketatanegaraan kita yang dibentuk berdasarkan institusi-institusi politik yang merupakan representasi suara rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan representasi politik dari kehendak rakyat. Itulah konsepsi politik dari manifestasi demokrasi di Indonesia.

HETEROGENITAS. Konsepsi demokrasi tersebut dianut, karena dialektika perjalanan bangsa Indonesia diwarnai oleh praksis politik yang kentara dengan nilai-nilai kolonial, disamping itu secara sosiologis, Indonesia merupakan sebuah heterogenitas. Secara normatif, demokrasi sendiri adalah rasionalitas politik *par excellence*. Tumbuh dari pencerahan filosofis yang mengutamakan sentralitas, harkat dan kesederajatan manusia. Rasionalitas politik demokrasi itu sendiri meliputi dua sasaran yang saling berkaitan. Yaitu, rasionalitas tata cara pemerintahan yang benar-benar memberdaulatkan rakyat dan rasionalitas politik saling imbang dan saling mengawasi pada dua lapis mekanisme negara dan pemerintahan. Lapis pertama adalah nasion, konstitusi dan negara; lapis kedua adalah keenam lembaga demokrasi : partai politik, pemilihan umum, parlemen, eksekutif, peradilan, dan media yang bebas.

TERLEPAS dari semakin urgennya tuntutan akan rasionalitas politik demokrasi, bangsa Indonesia justru masih berkutat pada berbagai macam distorsi dan irasiolitas politik yang tak kunjung usai sampai sekarang. Ini terjadi karena iklim politik Indonesia lama sekali diwarnai oleh dominasi irasionalitas politik yang berdampak langsung pada irasionalitas ekonomi, hukum, pemerintahan dan kebudayaan pada umumnya. Ini semua sangat tidak menunjang tumbuhnya mekanisme dan lembaga-lembaga pemerintahan serta perangkat kebijakan maupun praktek-praktek politik yang rasional.

DOMINASI IRASIONALITAS politik demokrasi itu berpangkal pada sejarah *bangsa* (dalam arti kolektivitas sosiologis) maupun *nasion* (kolektivitas politik) yang terkooptasi oleh sistem general kolonial dan Orde Baru. Kedua sistem general tersebut mewariskan beberapa faktor palang demokrasi yang menghambat perkembangan demokrasi secara sehat di Indonesia.

Pertama, distorsi politik, ekonomi dan hukum karena eksploitasi kolonial dan Orde Baru yang demikian intens. Sistem general sebagai instrumen politik yang mewadahi proses perkembangan masyarakat telah dikuasai oleh logika kekuasaan yang cenderung eksploitatif. Akibatnya lini kehidupan ekonomi, politik dan hukum lumpuh dan sekedar sebagai lipstik demokrasi belaka.

Kedua, besarnya diskrepansi antara kuatnya nasionalisme dan lemahnya simpul-simpul nasion kita. Kesenjangan ini tak bisa dilepaskan dari tak sejalannya nasionalisme dan nasion dari dua arah. Arah pertama datang dari pergulatan yang tak kunjung usai dalam mencari konstruk nasionalisme

Indonesia yang berkembang dalam paham-paham tentang nasionalisme baik antar kekuatan/kelompok politik maupun antarelite politik. Arah kedua datang dari ketaksamaan nasion yang didambakan oleh beberapa versi nasionalisme itu dengan pluralisme nasion warisan perjuangan. Ini terlihat dari wacana antara Pancasila dan Piagam Jakarta yang terus bergulir sampai sekarang ini.

Ketiga, latennya kondisi politik darurat yang membuat bangsa Indonesia ekstrarawan pada keadaan politik darurat. Kondisi politik darurat ini merupakan rekayasa kekuasaan yang justru membelenggu dan memasung terhadap perkembangan demokrasi itu sendiri.

Keempat, obsesi yang berlebihan pada ideologi di satu sisi dan miskinnya perhatian pada penataan lembaga-lembaga serta mekanisme pemerintahan disisi lain. Obsesi berlebihan pada ideologi ini bisa jadi merupakan akibat langsung dari posisi Indonesia yang sangat strategis dalam percaturan politik global, disamping itu keharusan survive sebuah kekuatan politik. Namun, paling tidak ini membuat dua generasi pertama dari nasion kita abai terhadap bagaimana masalah menyusun resep-resep kelembagaan serta pemerintahan yang benar-benar memberdaulatkan rakyat sekaligus mencegahnya dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dari kalangan pemerintah.

Kelima, seretnya perkembangan pemikiran dan evolusi politik kita menuju demokrasi sebagaimana yang menumbuhkan sebuah negara demokrasi modern. Kenyataan ini seringkali juga karena kuatnya tarik-menarik kekuasaan yang justru tak memberikan ruang secara lebih bebas bagi tumbuhnya sebuah gagasan-gagasan demokrasi yang kontekstual bagi bangsa Indonesia sekarang ini.

Kelima hambatan demokrasi tersebut telah menggurita dalam tubuh bangsa Indonesia yang menyebabkan distorsi bagi pelaksanaan demokrasi yang sehat.

MENAFSIRKAN DEMOKRASI dalam Realitas Politik Indonesia. Praksis demokrasi itu adalah praksis perjuangan rakyat lewat mekanisme dan prosedur ketatanegaraan yang ada. Dengan kata lain, rakyat sebagai otosentrisitas yang mengacu pada prasyarat utama yang sehat dan kemajuan politik yang menunjang, berkiblat, membangun dan berpusat pada substansi itu sendiri, yaitu rakyat. Rakyat sebagai manifestasi tertinggi dari otosentrisitas praksis politik.

SEBAGAIMANA kita ketahui, proses politik bangsa dibawah sistem yang represif oleh kolonial dan orde baru menyisakan distorsi politik dan demokrasi yang begitu besar. Ini terlihat dari sistem ketatanegaraan kita yang terkesan ambigu. Amibiguitas ini terlihat dari sederet persoalan mulai dari konstitusi sampai dengan pola hubungan antara kelembagaan negara.

MEMANG upaya untuk mengamandemen konstitusi kita sedang giat-gitanya kita lakukan bahkan terkesan 'asal merubah'. Upaya desakralisasi konstitusi lewat proses amandemen dilakukan seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan pergeseran konfigurasi politik. Perubahan konstelasi politik sebagai konsekuensi logis dari proses *interplay* yang berimplikasi kepada upaya desakralisasi konstitusi yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan aspek-aspek kebutuhan riil bangsa. Ini akan berakibat pada distorsi konstitusi dan *abuse of constitution.*

DISISI LAIN, rekonstruksi hubungan kelembagaan khususnya antara legislatif dan eksekutif kini juga pada berada pada fase yang rawan konflik. Pengalaman perseteruan antara Gus Dur dan DPR pada waktu lalu merupakan bukti kongkrit, bahwa fungsi-fungsi kelembagaan negara belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang bisa ditarik dari semua pelajaran ini ?

BELUM TERBANGUNNYA sebuah sistem ketatanegaraan kita yang benar-benar efektif berpangkal pada kerancuan system ketatanegaraan kita. Setidaknya ada dua hal yang patut kita cermati dan sangat urgen untuk menjawab semua persoalan yang ada di negeri ini.

YANG PERTAMA adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan dan sistem pemilihan presiden. Konstitusi yang masih kita anut menggariskan bahwa kita menganut sistem presidensial di dalam pemerintahan kita. Di dalam sistem demikian, posisi presiden, secara kelembagaan kuat, karena tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Tetapi, sistem demikian rancu ketika berhadapan dengan realitas politik, konfigurasi kekuatan politik hasil Pemilu, dan sistem pemilihan presiden. Di dalam konstitusi juga disebutkan, presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan oleh MPR. Masalahnya, pemilu 1999 menghasilkan kekuatan politik yang mampu memilih presiden secara lebih otonom. PDI P yang menjadi pemenang di dalam pemilu hanya menguasai sekitar 32% kursi MPR.

SECARA KONSTITUSIONAL juga, sangat dimungkinkan calon presiden dari pemenang pemilu itu untuk tidak terpilih sebagai presiden. Sidang MPR 1999 telah memanfaatkan logika konstitusi demikian.

PROSES seperti itu kemudian menghasilkan corak sistem pemerintahan yang berwajah ganda. Di satu sisi, kita masih menganut sistem presidensial, tetapi secara riel politik kita menganut sistem parlementer. Yang terjadi kemudian, secara formal pendulum kekuasaan memang berada di tangan presiden. Tetapi, secara riel, pendulum kekuasaan itu sebenarnya ada di tangan parlemen. Siapa saja yang bisa membangun kekuatan di parlemen, itulah yang secara riel mengendalikan kekuasaan.

HAL KEDUA adalah persoalan kultur politik kita yang belum mendukung bagi praksis demokrasi, baik ditingkat elite maupun di tingkat massa. Dengan logika yang berbeda kedua kelompok politik tersebut masih berkecenderungan untuk melakukan praktek-praktek politik yang justru mengebiri demokrasi itu sendiri. Praktek anarkhisme politik baik dalam bentuk pembentukan wacana yang manipulatif maupun pergelaran kekuatan massa untuk saling menghantam masih terngiang di kepala kita.

***

DENGAN MELIHAT bahwa persoalan yang paling urgen untuk segera kita tuntaskan dalam menopang proses demokratisasi yang sedang berlangsung sekarang ini, tentunya persoalan ketegasan dan penataan mengenai system pemerintahan kita yang secara tegas dan tidak rancu harus diselesaikan, sehingga pola hubungan kelembagaan tidak berada pada kegamangan relasi yang terus-menerus menghantui kedua kelembagaan tersebut. Itulah sebenarnya prioritas utama pembangunan demokrasi kita.

Disampaikan pada Seminar dan Kursus Ideologi
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Korda Jawa Timur
Surabaya, 19 Agustus 2001.

BAGIAN KEDUA
GEMA NASIONALISME

II – 02
GUS DUR, TERIMA KASIH

PENGALAMAN ADALAH GURU YANG TERBAIK Selayaknya sebagai guru bangsa , Gus Dur` mengajarkan dan menunjukkan kepada kita, '*what is possible*'. Termasuk kegagalannya menjadi presiden hingga tahun 2004. Menurut terminologi Jawa, Gus Dur telah membuktikan hipotesa sejarah bahwa " pengalaman adalah guru yang terbaik" artinya bahwa pengalaman Gus Dur atau paling tidak dimasa depan bangsa ini tak akan pernah lagi mengambil resiko memilih presiden seperti Gus Dur lagi. Meski kesalahan besarnya ada pada kegagalan kita yang tidak mengimbanginya secara cerdas. Ia pasti sadar dan rela dijadikan suluh bangsanya, dibakar habis dan mau menjadi abu!. Karena Gus Dur tahu persis ciri dan tradisi politik primitif bangsanya yang sangat mudah memuji dan menyanjung setinggi langit pemimpinnya tetapi seketika dengan cepatnya pula mudah berbalik untuk menghujatnya kedasar bumi.

SELAMA INI GUS DUR yang pernah dilantik dan belum sempat mempertanggung jawabkan sebagai presiden itu terus-menerus berupaya membuka pintu pada dunia yang belum pernah ada di Indonesia. Kita yang ragu-ragu untuk melangkah masuk. Disana ada kebebasan dan disana pula anak-anak bangsa mulai berani melawan keadaan termasuk melawan diri sendiri, dengan cara sendiri meskipun dengan cara yang seenaknya (bahasa jawa: *celelekan* gaya Gus Dur yang kemudian sangat efektif membakar semangat dan

keberanian jati dirinya menerangi kegelapan dan kemudian memperlihatkan kemerdekaan demokrasi yang sesungguhnya. Membongkar keniscayaaan budaya ketaatan yang beku atas mitos kepemimpinannya. Membongkar sakralisasi presiden menjadi sebuah keniscayaan hingga nyaris ketitik nadir "kewibawaan" yang runtuh ketika pada saat akhir jabatannya keluar depan istana dengan celana pendeknya didepan publik. Gus Dur juga telah menjawab dan membuktikan sebuah hipotesa besar tentang kemenangan rakyat yang sejatinya. Gus Dur berkeinginan untuk mengakhiri atau sebaliknya ingin mengajarkan tentang kejujuran bangsanya yang masih memiliki sikap politik primitif terhadap pemimpinnya, terlalu mudah menjanjung namun juga terlalu cepat menghujat. Ia juga membuktikan keteguhan visinya tentang hubungan agama dengan negara, hubungan kyai dengan santrinya, hubungan santri dengan rakyat secara tegas dan proporsional, secara ke-negarawan-an. Dihari-hari sedih baginya saat diberhentikan dari presiden, Ia mau di-"sapih" oleh pengawalnya dan berpura tidak mengetahui maksudnya, dibawa berobat ke Luar Negeri yang sekaligus artinya "*selamat tinggal istanaku*" (baca : Istana Merdeka). Dan memang benar adanya bahwa sekembalinya beliau tak akan kembali lagi. Langsung ke Ciganjur.

GUS DUR ADALAH NAFAS KEBEBASAN, keragaman, kemanusiaan. Untuk cukup waktu selama berkuasa, membentenginya hanya dengan kekuatan etika dan moral. Rakyat dipertontonkan sebuah episode sandiwara disekeliling dekatnya yang ia sendiri tidak bisa melihatnya. Namun nafasnya kelihatan tak pernah terpengaruh oleh detak jantungnya yang lebih dikendalikan oleh alat pacu emosional orang-orang diselilingnya itu, belum lagi oleh lawan politiknya. Gus Dur adalah nafas kebebasan. Meski

sebaliknya yang terjadi adalah mereka para pendukunglah yang mendorong memenangkannya menjadi presiden sekaligus memenjarakannya. Pembisik dan pengawal dekatnya yang semakin gelap melihat Gus Dur. Mereka lupa diri dan dengan tidak sadar bersatu secara ideologis sekaligus menyuburkan ideologi lawan Gus Dur. Dan akhirnya kita saksikan semuanya terperosok. Namun itulah nilai dari sebuah realita yang harus dibayar mahal bahkan oleh seluruh bangsa ini.

TEMAN IDEOLOGIS. Gus Dur memberikan kepada kita percaya diri, pembersihan moral, dimensi kemanusiaan yang belum pernah kita rasakan sebagai bangsa. Betapa tidak terbayangkan bahwa secepat itu Gus Dur menyatakan "memaafkan" dan sekaligus menyatakan dukunganya kepada Mega untuk memimpin bangsa ini. Ia tahu persis bahwa Mega itu bukan lawan politik melainkan sebagai kawan ideologis yang abadi. Gus Dur adalah cucu pendiri NU Wahid Hasyim, teman dan guru Bung Karno. Sedangkan Mega adalah anak Bung Karno. Selama jaman kuasa Soeharto, Mega dan Gus Dur sudah lebih dulu melawannya daripada Amien Rais apalagi Akbar yang sangat terlambat belakangan. Meskipun Gus Dur tak pernah menyatakan dendam kepada Amien Rais yang menjadi "biang kerok" terperosoknya politik Gus Dur melalui Poros Tengah yang sebelumnya "memaksa"nya menjadi presiden pada Sidang Umum MPR 1999 dan sekalipus sebagai tokoh utama dalam gerakan impeachment presiden. Demikian juga terhadap Akbar Tanjung kawan strategis dan taktis politik Amien Rais.

KEGAGALAN POLITIK mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh picik dalam mendukung seorang besar. Akhirnya kita belajar bahwa kita harus mendukung seorang Presiden yang manusiawi, bukan bertanding ego dan asal-asalan atau pokoknya. Nasib politik yang mengancam siapa

saja disetiap saat dan kesempatan. Sadar bahwa kita tidak boleh netral dalam menghadapi kejahatan kolektif suatu orde politik. Konspirasi politik para perusak negara tidak bisa dilawan oleh kegenitan intelektual. Tetapi juga tidak bisa dilawan dengan arogansi kekuasaan dan kekerasan. Sebuah keharusan bagi siapapun yang pada suatu saat mendapatkan kesempatan untuk diperburuk nasibnya oleh lawan politik yang abadi dalam bentuk konspirasi politik. Karena konspirasi politik adalah lebih dari kejahatan perang yang sesengit apapun masih ada rambu-rambu etika, moral dan kemanusiaan.

KEPIHAKAN. Kepada salah satu partai, Gus Dur cukup disebut netral. Meski Gus Dur sulit menghindari klaim politik oleh PKB, Partai yang didirikan oleh Gus Dur sendiri. Demokrasi, kebebasan dan kemerdekaan diberikan sepenuhnya hingga tak ada tanda-tanda bahwa Gus Dur menghambat apalagi melarang sikap politik beberapa kader partai yang arogan dan terkesan kebablasan. Mati-matian membelanya dengan cara mengimplementasikan persepsi yang salah terhadaop sikap politik Gus Dur. Sikap yang memberikan peluang bagi kader Matori Abdul Jalil yang kontroversial itu. Dan pecahlan PKB dan menjadikan kekalahan yang amat sangat menyakitkan bagi "partai penguasa" tersebut. Sudah jatuh tertimpa tangga pula!. Karya Gus Dur yang lain dalam rangka mencerdaskan bangsanya, termasuk memberikan pelajaran yang berharga bagi kader-kader (terutama yang muda) PKB. "Untuk lain kali jangan grasa grusu dalam berpolitik yang tentu banyak ranjau-ranjau yang mematikan lo! " kata Gus Dur bagi kader-kader mudanya yang kini masihkan bereforia?.

GUS DUR JUGA "MENGAJARKAN" konsepsi biarinisme. Kontoversial kepemimpinan yang dimiliki Gus Dur. Sebuah sikap bahwa agar kita berpolitik dengan kelembutan,

keceriaan, kepolosan yaitu menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dengan keteguhan, jati diri dan dengan melalui pendekatan kultural, konseptual, profesional dan proporsional. Gus Dur menegaskan bahwa Indonesia adalah juga untuk orang biasa. Selagi menjadi presiden, Gus Dur lebih menonjol sebagai orang biasa. Bahkan berucapun seperti orang biasa (biasanya Gus Dur) sebelum menjadi Presiden. Kini pastikan bahwa Gus Dur tak pernah merasa pernah menjadi presiden. Kalau demikian kita tak perlu menaruh curiga secara berlebihan terhadap biasanya Gus Gus berpolitik. Oleh karena logika kitapun mengantarkan keyakinan bahwa di pemilu mendatang Gus Dur tak akan pernah lagi dicalonkan dan apalagi mencalonkan diri sebagai Presiden. Kapok Gus!. Oleh karena itu cukuplah Gus berbangsa menjadi Guru Bangsa, Ulama besar dan Negarawan sejati. Dan yang lebih penting tak lagi adalah sudah saatnya tahu diri untuk tidak perlu berpolitik. Kembali ke Kithah NU 1927 Gus!.

Gus Dur, terima kasih – bangsamu mendoakan semoga engkau panjang umur.

Jakarta, 1 Agustus 2001

II – 02
NASIONALISME MEGAWATI, IDEOLOGI PERJUANGAN

TULISAN INI bukan berarti merupakan sebuah ekslusivitas dari sosok Megawati dalam menerjemahkan visi ideologi 'nasionalisme', namun lebih jauh dari itu merupakan sebuah pemaparan visi nasionalisme inklusif yang diemban Megawati. Dimana dialektika sosial kontemporer tidak lagi relevan untuk memandang sisi ideologi 'nasionalisme' hanya dari dimensi romantisme sejarah belaka yang membelenggu. Lebih jauh dari itu, pergeseran nilai-nilai universal dan keharusan sebagai bangsa untuk tetap *survive* itulah yang menyebabkan nasionalisme sebagai ideologi mampu memberikan kerangka dasar bangsa dalam konteks sekarang ini. Dengan demikian, nasionalisme lebih memberikan sekarang lebih bermakna *praksis*. Makna perjuangan yang lebih disemangati oleh upaya pelepasan belenggu penjajahan baru (kontemporer) yang jauh-jauh telah diintrodusir oleh Bung Karno tentang bahaya neo kolonialisme dan neo kapitalisme. Kebodohan dan kemelaratan yang akut bagi bangsa ini.

HADIRNYA MEGAWATI. Kehidupan politik nasional telah memasuki babak baru pasca terbentuknya kepemimpinan nasional hasil SI MPR. Tampilnya Megawati Soekarnoputri, anak kandung sekaligus anak ideologis Bung Karno serta merta membawa implikasi besar pada pembentukan konstruk sosial politik Indonesia. Hadirnya Megawati Soekarnoputri ke kursi RI-1 sebagai hasil dari proses politik yang panjang dan melelahkan akibat konflik kelembagaan yang punya kuasa, antara lembaga kepresidenan di satu sisi

dengan parlemen di sisi lain. Secara ideologis, perbenturaan paradigma yang dianut kedua lembaga tersebut dalam memandang realitas politik yang berkembang menyebabkan terbelahnya tatanan sosial yang begitu akut dan sangat mencemaskan bagi masa depan Indonesia. Ini berarti tampilnya Megawati secara obyektif merupakan kebutuhan sosial. Memandang eksistensi kepemimpinan Megawati tersebut tidak semata-mata sebagai tampilnya sosok pemimpin *an sich*, akan tetapi lebih jauh dari itu keberadaan Megawati juga merupakan representasi dari kekuatan politik yang mempunyai visi ideologis 'nasional'. Apakah yang bisa kita tangkap dari semua ini ?

PIDATO KENEGARAAN Presiden Megawati, 16 Agustus 2001 secara gamblang menguraikan visi politik pemerintahan Megawati, yaitu membangun bangsa atas dasar kemampuan, kekuatan dan potensi bangsa sendiri. Secara tersirat, ini berarti manifestasi nasionalisme yang tidak semata-mata merupakan romantika sejarah yang penuh retorika. Akan tetapi lebih mengedepankan urgensitas kebutuhan yang harus ditopang oleh kekuatan falsafah bangsa. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan bangsa Mega menyampaikan enam Program Pokok Kabinet Gotong Royong tersebut,

1. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat.

4. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tentram dalam kehidupan masyarakat, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah.

6. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2004 yang aman, tertib, rahasia dan langsung.

MENGAPA MEGAWATI mengambil pilihan ini? Kekuatan ideologi itu mendapat ruang ketika ia mampu menjadi parameter dan spirit dari keseluruhan proses sosial yang sedang berlangsung. Bagi Indonesia sekarang ini, *survive*-nya sebuah bangsa adalah ketika negara (pemerintah) mampu mengintegrasikan komponen dan elemen bangsa secara seimbang. Keadaan bangsa sekarang ini yang 'disintegratif' adalah buah politik kekuasaan yang represif dalam memanage bangsa. Akibat pengelolaan politik yang demikian, simpul-simpul nasionalisme terurai ke dalam kepentingan primordialisme sempit yang menyebabkan lunturnya spirit bangsa.

OLEH KARENA ITU, Indonesia juga merupakan sebuah proyek politik yang tak pernah final. Artinya, bangsa ini juga selalu berada pada konteks pergeseran-pergeseran nilai yang mempengaruhi daya survival sebagai bangsa, sehingga

rekonstruksi sosial harus terus diupayakan untuk mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang berkembang. Akibat pergeseran-pergeseraan nilai tersebut, perubahan tatanan sosial dapat saja meruntuhkan spirit dan martabat sebuah bangsa.

DIDALAM MEREKONSTRUKSI bangsa inilah, spirit besar 'nasionalisme' harus tetap dijadikan referensi tunggal untuk dapat mengintegrasikan komponen bangsa. Sehingga kristalisasi segenap kekuatan dan potensi bangsa sendiri harus dijadikan modal politik. Itulah mengapa visi politik pemerintah adalah membangun kekuatan bangsa atas dasar potensi dan kemampuan sendiri.

PADA TATARAN misi ideologi 'nasionalisme', pemerintah Megawati memandang bahwa Indonesia dalam percaturan politik global haruslah kuat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mempunyai stamina, mampu *survive* serta memberikan sentrum pengaruh bagi tata pergaulan dunia. Stamina bangsa sebagai prasyarat mutlak, untuk itu ketika dihadapkan pada realitas bangsa yang sedang sakit kronis ini, dekonstruksi sosial mutlak diperlukan.

KENDALA BANGSA . Sedikitny ada delapan kendala bagi bangsa kita yang tentu secara laten dihadapi oleh pemerintahan Mega-Hamzah yaitu, ***pertama,*** belum terbangunnya kepatuhan sosial yang emansipatoris karena tak berfungsinya sistem general akibat krisis kepercayaan; ***kedua***, kehidupan ekonomi yang tak normal; ***ketiga***, ancaman disintegrasi yang semakin menguat; ***keempat***, belum pulihnya luka politik sebagian kekuatan politik akibat proses politik; ***kelima***, derasnya pengaruh kapitalis global yang mengancam eksistensi bangsa; ***keenam,*** belum terbangunnya budaya politik yang mendukung bagi proses

demokratisasi; ***ketujuh***, penyakit KKN yang semakin merajalela dan sulit diberantas. dan ***kedelapan***, bahaya laten orde baru untuk menguasai panggung politik nasional melalui konsep politik dan kekuasaan status quo.

DENGAN MELIHAT REALITAS sosial politik yang demikian maka sangatlah dipahami orientasi pemerintahan Megawati yang terungkap dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus tersebut menyiapkan 6 (enam) program pemerintah sebagai langkah awal untuk membentuk bangsa yang kuat atas dasar kekuatan dan potensi sendiri.
Itulah sebenarnya Nasionalisme Magawati.

Kalibata, 17 Agustus 2001

II – 03
KELAHIRAN PUTRI SANG FAJAR MEREKAHKAN SENYUM EKONOMI YANG KUSUT

NAMPAKNYA SAAT INI kegemilangan dan kemenangan sedang berada pada Megawati. Angin segar yang membawa kecerahan masa depan bangsa dan merekahnya senyuman wajah kusut ekonomi ditandai oleh bergulirnya respon pasar yang positif disertai penguatan rupiah secara signifikan. Tidaklah aneh bila keberhasilan itu dapat dipastikan akan menimbulkan kontroversial dimasyarakat yang plural negeri kita yang anti kemapanan secara membabi buta.

POSISI MEGAWATI. Naiknya Megawati menjadi orang nomor satu di Indonesia adalah pertanda semakin menguatnya mitos kepemimpinan yang dipilih sendiri oleh rakyat kecil. Sebagai anak Bung Karno - presiden pertama RI oleh sebagian besar orang menganggap sebagai pelebaran batas penganut paham nasionalisme yang ditelurkannya lebih dari lima puluh tahun yang silam. Pandangan inilah yang menyebabkan semakin melebarnya dukungan emosional bagi kelompok yang senang dan semakin menajamkan kelompok yang tidak senang terhadap sosok Megawati Soekarnoputri dengan secara samar maupun secara terang-terangan akan terus berlangsung melakukan perlawanan-perlawanan politik ideologis terhadap kepemimpinan Mega yang dianggap reinkarnasi Bung Karno. Lahirnya putri sang Fajar ditengah kelamnya kehidupan bangsa atas krisis ekonomi yang

berkepanjangan dan nyaris tak ada harapan kapan akan berakhir. Meskipun Mega amat sangat memahami posisinya yang sulit dan besarnya beban warisan daripada orde pemerintahan yang *Soekarno's paradox* dibidang politik, ekonomi, Ideologi dan moral!. Politik bangsa yang tak berarah, ekonomi kapitalistik dan ketergantungan terhadap hutang, Ideologi yang semakin melemah serta moral yang bejad oleh praktek KKN selama 32 tahun!.

KORELASI SOSOK MEGA pewaris dan simbolik daripada semangat dan ideologi Bung Karno ini tidak hanya hinggap di benak para politisi dan orang Indonesia saja, namun juga pihak luar. Kegalauan dan kekhawatiran yang serius pemerintah Amerika akhir-akhir ini terhadap ancaman terhadap warganya mejadi sebuah keniscayaan, tentu lebih banyak merupakan traumatik yang dilatarbelakangi oleh asumsi masih tingginya "kepekaan' bangsa terhadap sikap tegas non kompromi pemimpin besar revolusi Bung Karno yang anti terhadap Imperialisme dan Kapitalisme!.

KASUS MARSHALL GREEN. Yang dialami duta besar Amerika Serikat di Indonesia Marshall Green dahulu, dimana ia mendapatkan sikap tidak mengenakan ketika bertugas di Indonesia. Pasalnya waktu itu (tahun 1950-an) gedung kedutaan besar dan konsulat Amerika di Surabaya dan Medan diserang ribuan demostran dan diduduki, bahkan dirusak berbagai fasilitas di dalamnya. Amuk massa itu disinyalir tersulut oleh pidato provokatif Bung Karno untuk menggulingkan Nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. Kekacauan ini sangat membuat 'geram' kalangan Kongres Amerika Serikat pada saat itu. Kesemua itu tertuang dalam buku *Crisis and Transformation 1965-1968, Compass Press, 1990.*

RAMBU-RAMBU. Dalam tulisan ini saya ingin memberikan rambu-rambu yang perlu diketahui sebagai garis demarkasi yang membedakan dan kesamaan sikap antara sosok Megawati dan Bung Karno. Dan tentu dapat pula disimak dalam artikel-artikel yang relevan lainya didalam buku ini Selain itu juga diharapkan dapat menjadi telaah dan bahan perenungan dalam wacana tentang kepemimpinan Megawati saat ini, agar tak terulang lagi kesalahan sejarah di masa lampau, perlunya kehati-hatian dalam mengevaluasi. Meski ada ungkapan *'like father like daughter'*, namun sepertinya ada beberapa sikap yang bisa dinilai bertolak belakang antara sosok Mega dengan Bung Karno. Dan tentu perpedaan adalah hal yang wajar dan tidak terlalu menjadi penting ketika kita menganggap bahwa perbedaan adalah justru menunjukan realita yang obyektif karena paksaan perubahan dimensi waktu dan ruang. Waktu dan ruang yang pasti berbeda ketika Bung Karno saat berjuang, menjabat presiden dengan dimensi sejarah dan perpolitikan yang berlangsung bagi Mega. Yang penting adalah kejujuran kita dalam melihat sejarah masa lampau, dinamika politik dan ideologi secara proporsional.

LIMA PERIODE POLITIK BUNG KARNO. Babak berpolitik Bung Karno terdiri dari empat periode, yakni; **Dekade 1920-an** beliau adalah tokoh yang bertanggungjawab dalam melahirkan Partai Nasional Indonesia (PNI) terutama dalam pembentukan ideologi politik dan penentuan langkah-langkah politiknya. Lalu **periode pada masa penjajahan Jepang** ia bertindak sebagai mediator antara rakyat Indonesia dan penjajah Jepang, terutama dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang dikalahkan. **Kemudian bersama Hatta**, dia memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian mulai memimpin Indonesia secara formal. dan

periode **keempat di awal tahun 1960-an** ia maju ke tengah gelanggang politik dunia dan melahirkan ide Demokrasi Terpimpin. Anti kompromi kolonialisme (nasionalisme anti-barat) dan penyambung lidah rakyat adalah cap 'embanan' berat Bung karno yang ternyata mampu dipanggulnya sepanjang hayat. Sedangkan babak terakhir Bung Karno adalah babak kejatuhan kekuasaan yang amat ironis yang dilanjutkan pelemahan secara politik ideologis. Upaya yang sistemik dilakukan oleh Rezim Soehato yang kemudian dikenal sebagai babak desukarnoisasi.

TIGA PERIODE POLITIK BERJALAN BAGI MEGA. Sebuah periode overlaping terjadi ketika memuncaknya hingga seolah kepuncak titik nadir hancurnya Soekarno secara ideologis, Mega salah seorang dari sekian banyak anggota keluarga generasi kedua Bung Karno paling merasa terpanggil oleh kondisi semakin kelamnya bangsa ini terperosok kedalam kekuasaan diktator perusak. Ia secara cerdas memilih memutuskan secara politik masuk sebagai anggota dan kemudian menjadi pemimpin puncak partai (PDI) yang dianggapnya secara empirik masih memiliki nafas nasionalisme ajaran Bapaknya. Konsekuensi dan resiko yang kemudian diambil adalah yang dialami dalam periode kedua setelah kemudian Mega menjadi tokoh yang sentral di partai. Periode pembantaian politik yang amat dasyat oleh pemerintah Soeharto hingga dengan munculnya peristiwa yang amat mengerikan yaitu penyerangan secara kasar yang berdalih pengambil alihan kantor DPP oleh kelompok PDI Suryadi atas dukungan militer. Kemudian sejarah pula mencatat kemenangan Mega dalam episode sejarah perpolitikan nasional dengan memenangkan Pemilu 1999 dan akhirnya Mega, putri sang Fajar dengan melalui jurang dan jeramnya politik kontemporer dapat berhasil merebut kembali "Kursi" presiden secara elegan!. Pertanyaan besar berikutny

adalah bagaimana dan seperti apakah kiranya dua periode politik yang akan dilalui oleh Mega mendatang?. Periode puncak kejayaan dan keberhasilan kepemimpinannya dan periode kejatuhannya. Akan seperti Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur. Wallahualam.

BANYAK YANG MENGAKUI bahwa dunia politik Indonesia telah mencapai titik-titik kerawanan pada saat proses suksesi kepemimpinan yang mengantarkan Mega menjadi presiden. Oleh karena itu pula bahwa kesemua akan bermuara pada kecakapan dan kearifan kepemimpinan yang dimilikinya. Beliau adalah sosok pemimpin kharismatik yang mampu memukau pendengarnya ketika berorasi. Melalui ucapan dan ungkapannya "keibuannya" yang tegas mampu menjembatani perbedaan, menyatukan semua bagian dari bangsa Indonesia yang berbeda dan memberikan mereka sebuah identitas bersama. Uniknya pemberian predikat pemersatu ini mampu menyelamatkan dan menenangkan bangsa Indonesia yang sama kepada Soekarno ketika pasca kemerdekaan ketika bangsa diterpa angin primordialisme kesukuan rakyat Indonesia pasca kemerdekaan, munculnya dekrit presiden 5 Juli 1959 dan kebesaran jiwa Soekarno menjegah perang saudara di tahun 1966 dengan "melepaskan" jabatan presiden. Hingga kini dan akan secara abadi Soekarno menjadi perwujudan dari aspirasi rakyat untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

ANTI KOMPROMI terhadap kolonialisme barat adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri Bung Karno, tentu Mega tidak begitu jauh dari itu. Bung Karno dan Kini Mega menjadi simbolik dari masih tetp adanya ancaman tentang anti Imperialisme dan Kapitalisme. System Internasionalisme ekonomi barat yang sejak dahulu oleh Bung Karno dinyatakan sebagai system yang memelaratkan dan membuat

bodohnya marhaen. Oleh karena itu ia merasa hafal betul dengan manuver politik pihak kapitalisme dan kolonialisme barat. Keburukan pengalaman ini menghamburkan kebencian yang mendalam dengan apa yang dinamakan pasar pada saat itu. Proyek nasionalisasi merupakan realisasi anti campur tangan barat terhadap perekonomian Indonesia. Baginya penanam modal asing hanya akan mencakar ekonomi Indonesia dengan taring-taring virus kapitalismenya dan melupakan rakyat yang semakin miskin. Sayangnya kecanggihan berpikir Soekarno tak direspon dan untuk kemudian didukung secara proporsional oleh para pemimpin dan elit politik bangsa ini. Dan hanya sekedar bak gayung bersambut golongan komunis (sayap kiri) misalnya dengan caranya yang ekslusif, juga kelompok militer dan kelompok Islam politik ekstreem kanan saat itu tidak lebih dari memanfaatkan kerentanan kepemimpinan Bung Karno. Mereka serta merta mendukung, merayu dan 'menjilat ' sekaligus menusuk dari belakang Soekarno termasuk oleh bodohnya sebagian tokoh-tokoh PNI bersikat seolah-olah menyokong konsep progresiv revolusioner anti Imperialisme dan kapitalisme tersebut. Yang kemudian sejarah mencatat tentang proses kejatuhan Soekarno.

MENCARI KESAMAAN. Orang bijak mengatakan bahwa menggunakan waktu yang cukup untuk mencari persamaan dalam mencari solusi konflik adalah lebih efektif ketimbang mengakumulasikan perbedaan pendapat. Dalam sejarah kepemimpinan Bung Karno ada beberapa persamaan kondisi dengan saat ini. Bila mau jujur, jawaban atas masalah pola kepemimpinan Mega sebenarnya dapat terjawab bila kita mau bijaksana dengan menelusuri sejarah diatas. Pada zaman pasca kemerdekaan ada kesamaan yaitu keabsahan legalitas keberadaannya. Waktu zaman kemerdekaan Bung Karno wara wiri' mencari dukungan ke negara-negara

tetangga dengan maksud memperkuat legalitas kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Megawati juga 'wara wiri' tentu tidak secara harfiah mencari dukungan legalitas terhadap keberadaannya sebagai presiden baru. Selain itu saat dulu dan sekarang juga ada pengerogotan primordialisme kesukuan dengan permintaan merdeka dari beberapa propinsi, seperti Aceh, Riau dan lain-lain. Sosok Mega dianggap dapat menjadi sosok penerus aspirasi pengemban lidah rakyat yang kedua, setelah Bung Karno. Aspirasi persatuan inilah modal potensial yang mengutuhkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu menjadi wajar dan cenderung justru menjadi keharusan politik bagi Mega untuk merespon segala aksi dan perkembangan politik dalam negeri dan korelasinya dengan politik luar negeri Indonesia.

BAGIAN KETIGA
TANTANGAN IDEOLOGIS KEDEPAN

III – 01
PETA POLITIK NASIONAL
DAN
FENOMENA KONFLIK POLITIK
SEGITIGA SAMA SISI

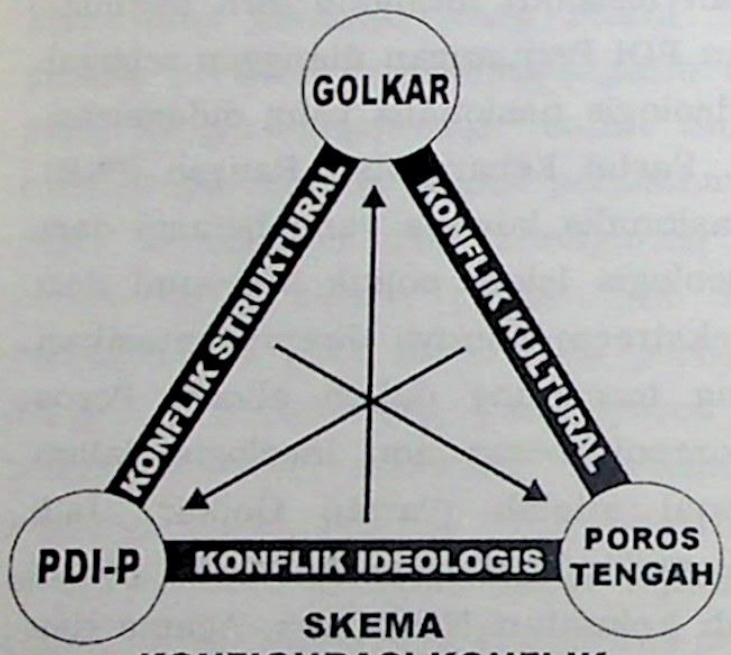
PROGNOSA PETA POLITIK NASIONAL. Menurut Herbert Feith, Pemilu 1999 menghasilkan peta kekuatan politik komunitas ideologis yang relatif tak berubah semenjak pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Tentu hal yang sangat tergantung sudut dan dari sisi mana kita melihatnya. Karena realita perjalanan perpolitikan nasional telah ditunjukan oleh konfigurasi politik nasional yang cenderung berubah posisi dan berputar bagai cakra menggilingan yang tetap pada poros substansi yang tidak bergeser. berkembang yaitu poros pertentangan ideologi pancasila non pancasila, ***Pertama*** konfigurasi politik nasional hasil Pemilu 1955 adalah dalam posisi politik seimbang dan mungkin dapat dijadikan standar kekuatan politik yang ideal antara komunitas politik Nasionalis, Agama dan Komunis. Empat besar pemenang pemilu 1955 adalah PNI, Partai Masyumi, NU dan PKI merupakan peta politik riil. ***Kedua,*** pemilu 1971 minus Partai Komunis Indonesia (PKI), Masyumi dan PSI. Dua partai terakhir yang secara formal dibubarkan oleh Soekarno karena menolak Dekrit Presiden. Tetapi pemilu perdana di Orde Baru itu, plus embrio partai

raksasa yang kemudian langsung menjadi pemenang pemilu dan selama 7 kali pemilu menang secara mutlak dan mampu bertahan lama hingga 32 tahun yaitu Golkar. ***Ketiga*** pemilu 1999 meski secara logika politik Golkar telah merubah jadi partai akan mengalami kekalahan telak namun defakto, partai Golkar hanya sedikit bergeser pada posisi kedua pemenang pemilu. Bahkan di Parlemen (MPR) Partai Golkar masih menduduki jumlah kursi lebih banyak dibanding dengan jumlah kursi dari Partai pemenang Pemilu 1999 PDI Perjuangan. Sedangkan pemenang pemilu ketiga dan seterusnya memiliki perbedaan yang signifikan.

PERSAMAAN EMPIRIK konfigurasi politik nasional seperti yang terjadi di tiga jaman tersebut mungkin oleh asumsi-asumsi antara lain bahwa PDI Perjuangan dianggap sebagai representasi kelompok ideologis nasionalis yang didominasi oleh massa pemilih PNI. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dianggap representasi nasionalis lainnya yang berasal dari warga NU. Kelompok ideologis Islam politik Masyumi dan kelompok Islam politik ekstreem lainnya direpresentasikan oleh banyak partai yang tergabung dalam aliansi Poros Tengah. Sedangkan kelompok besar non Ideologis dalam konstelasi politik nasional adalah (Partai) Golkar. Jadi apabila diperbandingkan, maka kristalisasi kekuatan politik hasil Pemilu 1955 adalah kekuatan Nasionalis, Agama dan Komunis. Sedangkan kristalisasi kekuatan politik hasil Pemilu 1999 adalah kekuatan Nasionalis, Agama, dan Partai Golkar. Apabila diasumsikan kelompok Nasionlis dan Agama adalah tetap maka secara kuantitatif posisi Golkar amat lebih besar ketimbang kekuatan Partai Komunis yang digesernya. Dapat dimakluminya bahwa Golkar selama 32 tahun bertahan menjadi partai mayoritas tunggal (*Single*

Majority). Maka fenomena eksistensi Golkar menjadi selalu menarik untuk dicermati. Sebagai kekuatan *status quo* pada Rejim Orde Baru, daya survival Partai Golkar tergolong luar biasa. Bandingkan dengan PNI yang juga merupakan kekuatan *status quo* pada masa pemerintahan Soekarno. Di tengah ketidak percayaan publik, Partai Golkar yang masih mampu menjadi *runner up* Pemilu 1999 tersebut , yang tentu berbeda dengan komunitas politik PNI dipasca kejatuhan kekuasaan Soekarno. Oleh karenanya Golkar sebagai kekuatan status quo dengan kekuatan status quonya PNI periode politik sebelumnya.

KONFIGURASI KONFLIK. Konflik merupakan buah dari interaksi dinamis. Dalam terminologi sosiologi politik, konflik merupakan konsekuensi logis dari interaksi antar kekuatan politik. Konflik politik pada dasarnya terdapat tiga ekses yakni fungsional, disfungsional, dan kontraproduktif.



SKEMA KONFIGURASI KONFLIK

Ekses atau buah konflik politik yang cenderung disfungsional dan kontraproduktif adalah seperti yang menggejala dewasa ini. Oleh karena maka *focus* dan *locus* konflik politik dipengaruhi kekuatan politik, baik individual (aktor politik) maupun institusi politik. Dengan mempelajari dan melihat peta kekuatan politik nasional kontemporer,

terdapat tiga kekuatan politik utama, yakni PDI Perjuangan (Nasionalis), Poros Tengah (Agama), dan Partai Golkar (status quo). Masing masing dapat digambarkan oleh tiga pusat atau kutub kekuatan politik yang masing-masing berinteraksi menurut ciri konflik yang berbeda. Ciri-ciri yang dimaksud yaitu ***Pertama*** konflik ideologis, meliputi diskursus dasar dan bentuk negara (PDI Perjuangan dengan Poros Tengah). ***Kedua*** konflik kultural, meliputi benturan budaya di masa transisi antara kekuatan *status quo* dengan kekuatan reformasi (Poros Tengah dengan Golkar) dan ***Ketiga*** konflik kekuasaan (struktural), merupakan konflik paling lazim dan logis dalam kehidupan politik yang berorientasi kekuasaan baru dan status quo (PDI Perjuangan dan Golkar).

KONFLIK IDEOLOGIS. PDI Perjuangan dengan Poros Tengah merupakan dua komunitas politik yang potensial terjadinya konflik ideologis. Akar konflik yang bersifat laten adalah seputar tema klasik tentang dasar dan bentuk negara. Pęwacanaan akan tetap terus mengancam stabilitas pǫlitik tersebut adalah berupa pemaksaan aspirasi untuk memasukan Piagam Jakarta kedalam UUD 1945. Bersamaan dengan upaya perubahan bentuk negara federal. Dalam diskursus dasar dan bentuk negara tersebut, PDI Perjuangan tentu akan secara mati-matian mempertahankan dasar dan bentuk negara yang telah menjadi doktrin partainya. Sedang dilain pihak yang dipelopori oleh kelompok Islam politik yang juga tergabung dalam Poros Tengah, akan secara terus menerus berjuang hingga terjapainya cita-cita ideologi yang berbasis agama tersebut. Hal yang akan terus menerus dimunculkan pada setiap kesempatan yang memungkinkan di momen-momen politik untuk mencuatkan isue piagam Jakarta, terutama setiap diselenggaranya Sidang-Sidang

MPR. Dalam konflik idseologi tersebut, diperkirakan kelompok Islam Politik tak akan mudah memenangkannya, selagi kekuatan Nasionalis diluar PDI-Perjuangan (Golkar, PKB dan partai kebangsaan lainya) beraliansi kepada kutub kekuatan nasionalis kedalam stigmatik perlawanan Nasionalis dan a-Nasionalis. Stigma politik yang menegaskan tentang kekuatan rakyat yang konsisten untuk tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan kekuatan yang ingin melarikan diri dan menghianati cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

KONFLIK KULTURAL. Konflik yang bersumber dari perubahan budaya politik status quo kepada perubahan paradigma baru. Konsekuensi logis atas transformasi politik Orde Baru kepada orde paradoxal yang dikenal dengan istilah reformasi. Oleh karena itu benturan dan konflik yang bersifat kultural menjadi laten bagi dua komunitas politik yaitu antara Partai Golkar yang dianggap warisan dan selalu mengusung simbol-simbol dan kultur Orde Baru yang KKN dengan komunitas politik yang cukup menonjol dan berhasil membangun citra bagi kelompok yang paling reformis terutama PAN, PBB dan Partai Keadilan (semuanya juga bergabung dalam Poros Tengah). Pada konflik kultural dengan stigma pro dan kontra reformasi ini, Golkar memiliki posisi sangat lemah ketika lawannya (Poros Tengah) lebih memiliki peluang untuk berkoalisi dengan PDI-Perjuangan. Dengan kata lain konflik sangat potensial berlangsung meski Golkar tak akan mudah memenangkannya. Kecuali apabila PDI Perjuangan justru berpihak kepada Golkar dalam konflik kultural tersebut.

KONFLIK STRUKTURAL. Tradisi berpolitik adalah orientasi terhadap tujuan kekuasaan. Artinya partai politik selain disyaratkan memiliki ideologi sebagai doktrin perjuangannya, juga harus memiliki fatsun. Hanya permasyalahan yang timbul dalam praktek politik adalah digunakan cara-cara kekerasan dan kekuatan massa untuk menekan lawan. Bukan dengan cara yang "manis" atau egaliter. Oleh karena itu konflik politik yang berlatar belakangi oleh fatsun kekuasaan (struktural), adalah jenis konflik yang paling menjijikan bagi orang yang cenderung menolak berpolitik. Jenis konflik yang cenderung menerabas sekat ideologis dan kultur politik. Dalam konteks pembahasan konflik struktural tersebut, Partai Golkar dan PDI Perjuangan sama sama memiliki fatsun yang sama. Hal yang sangat lazim dalam perang politik. Golkar memiliki kepentingan pertahanan dan melanggengkan status quo kekuasaan yang telah dibangun dengan susah payah selama 32 tahun. Sedangkan PDI-Perjuangan sebagai pemenang pemilu memiliki fatsun perebutan kekuasaan dan apalagi atas dasar dendam politik atas perlakuan represif Golkar terhadap PDI-Perjuangan dimasa Orde Baru. Jegal menjegal dan saling berebut kekuasaan sangat mungkin terjadi antara dua komunitas kekuatan dan kekuasaan PDI Perjuangan dan Golkar. Potensi konflik atas perseteruan yang berlatar belakang balas dendam sulit dapat dihindari sepanjang masa. Dalam pertarungan dimedan konflik struktural ini, kecerdasan, ketrampilan dan pengalaman ada ditangan Golkar. Oleh karena itu ada kecenderungan Golkar akan selalu mendapat kemenangan disetiap saat. Namun nanti dulu! Dalam perang politik segitiga PDI-Perjuangan tentu akan mendapatkan dukungan dari poros tengah dalam melawan Golkar. Maka diatas kertas sangat tidak mudah Golkar menemukan hasil

dari ambisinya untuk memegang kekuasaan kembali, setidaknya dalam waktu dekat.

POSISI PKB YANG AMBIGU. Keberadaan PKB yang mengusung terminologi kebangsaan dan dukungan basis politik Islam tradisional dalam perjalanannya menjadi ambigu. Ambiguitas ini terlihat dari sulitnya melepaskan diri dari faktor kultur NU dan tuntutan pragmatis politik sebuah realitas yang mengharuskan bersikap rasional. Fenomena dukungan yang membabi buta kepada Gus Dur dan kenyataannya justru berakibat kekalahan bagi Gus Dur tersebut, bagi PKB kini mengalami kesulitan dalam rasionalistas politik yang dihadapinya. Semboyan PKB sebagai partai advokasi tak lebih dari upaya untuk menutupi kegagalan partai dalam memaksakan dirinya sebagai partai pemerintah semasa pemerintahan Gus Dur. Bahkan tatkala persoalan politik sudah melintasi ke persoalan pembentukan jaringan kerjasama antara kekuatan politik, PKB justru masih mencoba untuk membuat manuver-manuver memposisikan diri agar kembali eksis dalam konfigurasi politik kontempor dengan resiko dipandang tak populer. Akibatnya selanjutnya dengan konfigurasi politik yang ada? PKB telah berubah menjadi partai yang eksklusif dan seolah menghindarkan diri dari permainan politik. Dalam format dan konstelasi politik kontemporer PKB kini seakan mendapat kesulitan mendapatkan peran dan posisi yang signifikan dan cenderung berada dalam posisi yang kurang diperhitungkan. Ini semua berpangkal dari kegagalan PKB yang gagap membaca perubahan politik yang bergerak begitu cepat menjelang Sidang Istimewa MPR yang menurunkan Gus Dur akhir Juli 2001.

NUNGGU ABRUKNYA POROS TENGAH. Poros Tengah sebagai sebuah strategi politik yang bersifat temporer untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan politik Islam dalam mengisi masa start pemerintahan reformasi pasca Soeharto memang terbukti ampuh. Keampuhan yang ditandai dengan kinerja politiknya, tiga keberhasilan yang diraih sekaligus dalam waktu yang relatif pendek yakni menjegal Megawati menjadi Presiden, mengangkat GUs Dur dan 20 bulan kemudian menjatuhkannya. Mengapa Poros Tengah mampu menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional? Pertama, manajemen politiknya lebih canggih dibandingkan dengan kekuatan lainnya. Ini terlihat dari kemampuan memberikan tekanan politik yang melibatkan massanya, pengolahan manuver politik melalui issue politik serta mampu membangun aliansi dan komunikasi dengan kekuatan lain. ***Kedua***, Realitas politik yang tidak sehat tersebut justru bagi Poros Tengah adalah peluang untuk menjadi katalisator dan menstimulasi ke arah bandul politik yang menguntungkan bagi kepentingan Poros Tengah sendiri. Dan nyatanya Poros Tengah selalu menjadi 'pemain kunci' dari seluruh proses politik yang terus berkembang. Masalahnya, langgengkah bentuk koalisi Poros Tengah dalam menghadapi kenyataan politik yang akan datang. Kemungkinan terjadinya perbenturan yang mengarah pada pecahnya aliansi tersebut sangatlah besar. Ini karena faktor interest partai yang berlainan dalam tubuh Poros Tengah sendiri. Apalagi bila Poros Tengah sendiri telah memenangkan pertarungan, persoalan bagi-bagi kekuasaan sangat rentan bagi pecahnya aliansi. Oleh karena dalam membaca peta konstelasi politik selanjutnya, poros tengah semakin pudar dan tidak akan mampu secara terus menerus meraih kemenangan politik.

Hal yang menonjol justru sikap ambivalensi yang sekarang sudah mulai kentara ketika harus tetap menjaga kekritisannya terhadap pemerintah Mega-Hamzah. Mega secara historik dan ideologik adalah lawan abadi, sedangkan Hamzah Haz yang kini menjadi Wakilnya Mega adalah kawan abadi dan salah satu pilar Poros Tengah. Tinggal nunggu ambruknya saja konspirasi yang amat bersifat taktis itu.

KOALISI PERMANEN YANG TEMPORER. Dalam kepolitikan modern, pembentukan sebuah aliansi, koalisi maupun bentuk-bentuk kerjasama politik lainnya, semisal fusi bertujuan untuk mensinergikan kepentingan politik dalam menghadapi situasi politik yang dihadapinya, proyeksi kedepan. Merupakan cara strategis untuk dapat memenangkan sebuah pertarungan politik. Meskipun cara tersebut adalah amat tidak sehat. Apalagi terlihat bahwa tujuan untuk berkoalisi lebih pada tataran pragmatis semata, dan jauh dari kaidah-kaidah ideologis. Ini membuktikan bahwa jalinan politik yang terjadi pun sering kali berhubungan jauh dengan kepentingan politik masing-masing. Komitmen para penggagas koalisi, arah politik serta faktor kepentingan politik sesaat yang ada merupakan unsur-unsur yang pada suatu saat nanti dapat dipastikan menghasilkan kemunafikan-kemunafikan politik. Dengan demikian, apa yang disebut dengan koalisi permanen adalah hanya sebuah retorika politik dimana dan kapanpun tak ada pernah ditemukan dalam kamus sejarah politik. Oleh sebab itu dalam prespektif peta dan konstelasi politik nasional apa yang disebutnya koalisi permanen dapat dianggap tak pernah ada. Setidaknya hal yang akan menjadi bahan tertawaan generasi berikutnya dikemudian hari.

ILUSTRASI KONFLIK di atas semakin menunjukkan bahwasanya konflik politik nasional tidak dapat dipandang sebagai konflik parsial semata baik dalam prespektif dimensi waktu maupun ruang (kekuasaan) dan kemampuan rekayasa bagi elit politik. Oleh karena boleh dikatakan bahwa konflik politik yang terjadi di Indonesia adalah representasi yang sangat kompresensif. Hal ini disebabkan karena konflik politik yang terjadi bersifat multidimensi dan bisa jadi dalam sebuah konflik politik meliputi ketiga sifat sekaligus sebagaimana tesis diatas yakni konflik ideologis, kultural dan struktural. Namun justru karena banyaknya parameter kualitatif dan banyaknya sumber konflik politik, ada sisi lain yang menguntungkan bagi bangsa kita. Ketika kita dapat mencermati konfigurasi dan peta konflik politik (fenomena konflik segitiga) sama sisi yang artinya masing-masing komunitas politik memiliki kekuatan dan sekaligus kelemahan yang sama. Setidaknya akan memakan waktu yang sangat lama bagi kutub politik tertentu untuk memenangkan konflik dan mengambil kekuasaan absolut dan *single majority* dinegara kita seperti Golkar dahulu. Apakah itu Golkar, PDI Perjuangan maupun Poros Tengah.

Jakarta, 7 Oktober 2001

III – 01
AMANDEMEN UUD 1945
MENGAPA, SIAPA DAN UNTUK APA

GAGASAN tentang perubahan perubahan UUD 1945 bisa dirunut dari sejarah panjang kebelakang. Yang tentu memiliki makna yang sangat dalam keterkaitannya dengan politik ideologis bangsa. Mulai dari perdebatan keras mengeni perlu dan tidaknya Piagam Jakarta dimasukan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Hingga perjuangan PPP yang berkehendak meubah pasal 29 UUD 1945 itu atas substansi yang sama. Kemudian kita boleh mengingat tentang koreksi keras terhadap kegagalan pemerintahan Soeharto yang selama 32 tahun dengan menggunakan jargon-jargon keadilan dan kemakmuran rakyat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Belum tindak dan kebijakan represif Orde Baru untuk dan demi stabilitas politik dan ekonomi, berdalih menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945. Hingga terakhir me-monoloyalitaskan pancasila dan menginterprestasikan Pancasila dan UUD 1945 tersebut secara sepihak melalui P4.

AKIBATNYA, Pancasila dan terutama UUD 1945 terseret menjadikan simbol-simbol Orde Baru yang menyesatkan. Terbangunnnya opini publik bahwa kegagalan yang terjadi oleh bangsa ini adalah bersumber dari kekurang sempurnaan dan lemahnya pondasi dibawah bangunan bangsa produk daripada para pendiri bangsa. Sebuah

kesempatan dengan memanfaatkan dalih yang substansinya yaitu pelemahan terhadap dasar negara dan konstitusi dasar UUD 1945 oleh kelompok tertentu yang sejak tanggal 18 Agustus 1945 mendendam gagal memperjuangkan 'kesempurnaan' UUD 1945 tersebut. Sedangkan mengenai upaya melakulan amandemen pada pasal-pasal yang lain adalah imbas daripada semangat semata yang kadang tidak memiliki argumentasi yang kuat, selain pokoknya UUD 1945 harus direformasi.

KEMUDIAN dimasa pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto dan sejak pemerintahan transisi Habibie isue tentang mendesaknya amandemen UUD 1945 terus meluas dan untuk kemudian seolah menjadi kebutuhan mendesak mengalahkan isue yang lebih esential tentang abruknya ekonomi nasional dan kesengsaraan rakyat. Dengan dalih reformasi disegala bidang atau reformasi total yang artinya semua yang berbau status quo baik kultural maupun struktural termasuk perpolitikan nasional harus direformasi. Semangat dan sikap "Pokoknya" itulah yang kemudian disadari bahwa reformasi yang belum jelas platformnya itu menjadi kebablasan. Sehingga tak kurang terhadap perubahan UUD 1945, Badan Pekerja MPR dalam persiapan menghadapi Sidang Tahunan 2000 telah menyiapkan perubahan kuantitatif jumlah pasal dari aslinya yang hanya 37 pasal menjadi 67 pasal!. Meski tidak sebanyak itu, sebagian pasal-pasal amandemen dapat dilolosan oleh lembaga tertinggi itu.

WACANA amandemen UUD 1945 terus bergulis tak menyurut disetiap saat ada atau tidak adanya momentum politik untuk itu. Apalagi saat menjelang Sidang MPR yang menurut UUD 1945 diselenggarakan lima tahun sekali di"amandemen" oleh ketetapan MPR pada SU tahun 1999

menjadi setiap tahun. Namun dengan mulai pemerintahan baru pasca Soeharto terutama saat Gus Dur menjadi Presiden wacana tentang perubahan UUD 1945 mulai diperlemah dengan munculnya counter issue (gagsasan) akan perlunya lembaga khusus yang menangani secara cermat tentang amandemen UUD 1945. Namun *mentok* ditengah jalan saat akan meralisir dibentuknya Komisi Penyelidik Perubahan UUD yang dipimpin oleh Guru Besar Hukum Tata Negara UI, Prof. DR. Harun Al-Rasid. Namun karena kerasnya konflik politik yang terjadi saat itu antara Presiden Wahid dengan DPR (yang mayoritas anggota MPR), menjadikan komisi tersebut tak pernah eksis.

KINI SETELAH KONSTELASI politik berubah lagi dan hubungan antara lembaga kepresidenan dengan lembaga legislatif kembali normal. Ajakan Presiden Megawati dalam pidato kenegaraannya yang pertama, 16 Agustus 2001 mengenai perlunya menyusun kerangka acuan dasar untuk menerjemahkan substansi UUD 1945 dalam konteks perkembangan masyarakat sekarang, mendapat respons yang cukup hangat dari kalangan politisi di Senayan. Mega berkali-kali juga menyatakan perlunya kehati-hatian terhadap amandemen UUD 1945 yang substansinya adalah tidak berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Presiden Abdulrackman Wahid sebelumnya.

MANIFESTASI PRAKSIS penyusunan kerangka acuan dasar ini adalah pembentukan Komisi Konstitusi. Komisi yang mempunyai wewenang untuk menyusun rancangan konstitusi (mengamandemen UUD 1945) kini menjadi wacana publik yang sedang hangat. Ini terjadi sebagai reaksi atas kinerja MPR yang memproduksi perubahan pertama UUD .1945 dan perubahan kedua UUD 1945 yang sarat muatan politis dan tak mampu menjawab kebutuhan

masyarakat secara komprehensif. Sebagaimana kita ketahui bersama, produk amandemen pertama dan amandemen kedua tersebut dihasilkan oleh sebuah 'kesepakatan bersama' antara partai politik, yang tidak melibatkan komponen masyarakat lainnya di luar kekuatan politik. Oleh karena itu, tarikan kepentingan politis yang berbuah pada konsesi-konsesi politik antara partai politik menjadikan perubahan konstitusi tidak meng-*cover* substansi persoalan yang sesungguhnya, dan hanya bersifat tambal sulam belaka.

HADIRNYA WACANA mengenai perlunya pembentukan Komisi Konstitusi yang independen ini tak pelak menimbulkan pro-kontra, terutama menyangkut kewenangan, susunan personilnya serta landasan hukum pembentukannya. Ini dapat dimengerti, karena substansi persoalan yang akan diangkat adalah persoalan mekanisme dan sistem politik yang akan menjadi panduan bagi bangsa Indonesia ke depan. Disisi lain, sejarah penciptaan landasan politik yang ada selalu diwarnai dengan *vested interest* yang begitu kuat oleh kekuatan politik, dan fakta politik yang menentukan jalannya mekanisme proses politik Indonesia adalah partai politik dengan segala atribut kepentingan ideologisnya.

NAMUN DEMIKIAN, semangat untuk menghasilkan produk politik melalui amandemen konstitusi yang komprehensif dan sistematis melalui Komisi Konstitusi rupanya telah disadari sepenuhnya oleh elit politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Telah menjadi pengetahuan umum, sejarah perjalanan UUD 1945 dalam kepolitikan Indonesia selalu diwarnai dengan perdebatan interprestasi konstitusi yang demikian intens. Intensitas yang justru mematikan ruang bagi terselenggaranya sebuah mekanisme politik yang

mampu menopang perkembangan masyarakat terjadi karena konstitusi dijalankan dengan menggunakan logika kekuasaan. Manipulasi tafsir tunggal yang terjadi selama inilah yang menyebabkan konstitusi kita mengalami distorsi yang sangat akut, dan kehilangan spiritnya sebagai pemandu kehidupan kenegaraan secara normal.

KETIKA PERUBAHAN POLITIK bergulir secara cepat, menyusul gugatan publik yang dilatar belakangi oleh opini yang berkembang secara intens terhadap keharusan amandemen UUD 1945 tak terbendung lagi. Sedangkan sebagai bangsa yang baru saja terjaga dari tidur panjangnya dan tiba-tiba dihadapkan pada sebuah euphoria politik, elit politik kita seakan gagap untuk menerjemahkan dan mempertemukan amanat para pendiri bangsa dengan opini masyarakat tersebut dalam konteks politik sekarang.

PERGESERAN DOMAIN kekuasaan yang sangat signifikan dari institusi eksekutif ke institusi legislatif yang disertai semangat dekonstruksi regulasi politik yang berlebihan menyebabkan produk amandemen yang ada hanya diorientasikan pada kepentingan pragmatis lembaga legislatif, bukan untuk mencari keseimbangan politik yang memadai. Perubahan pertama dan perubahan kedua UUD 1945 menjadi contoh kongkret ambisi lembaga legislatif DPR untuk mempreteli kekuasaan eksekutif secara fragmatis. Apalagi ada pada suasana distorsif akibat ambisi elit politik yang berebut kekuasaan dalam konflik politik yang mamuncak antara pro dan kontra Gus Dur.

IMPLIKASI yang paling nyata dari realitas di atas adalah sistem pemerintahan Indonesia adalah ***quasi presidensiil***. Secara *de jure*, yang memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan adalah presiden, akan tetapi *de facto*, DPR-lah

yang sebenarnya menentukan hitam putihnya kekuasaan presiden ketika DPR 'berganti baju' menjadi MPR. Perseteruan antara Presiden Wahid dengan DPR yang berbuah pada SI MPR 2001 yang mencopot kekuasaan Presiden Wahid merupakan bukti bahwa kekuasaan DPR lebih tinggi dari presiden.

TAK JELASNYA SISTEM pemerintahan yang dianut (apakah presidensiil ataukah parlementer) menyebabkan kekacauan politik yang berkepanjangan, karena masing-masing bersikukuh pada argumentasinya masing-masing tanpa landasan konstitusi yang jelas. Secara *de jure*, sistem pemerintahan presidensiil, akan tetapi *de facto*, sistem pemerintahan kita adalah parlementer. Ibarat manusia, pria tidak, wanita pun bukan. Inilah mungkin, langkah tepat Presiden Megawati Soekarnoputri kembali mengajak MPR untuk membuat kerangka acuan dasar untuk mengamandemen UUD 1945 melalui Komisi Konstitusi sebagai bagian dari upaya politik untuk menata kembali sistem politik Indonesia yang carut marut. Tetapi bukanlah upaya yang mudah ketika arus salah kaprah tentang mendesaknya perubahan UUD 1945 yang terkait dengan interprestasi konstitusi tentang kewenangan penuh MPR yang cenderung menolak secara arogan terhadap gagasan menghadirkan komite konstitusi menjadi amat sulit terlaksana.

AMANDEMEN UUD 1945 yang dilakukan secara serampangan dan hanya untuk kepentingan fragmatis politik adalah merupakan sebuah kekhawatiran umum bangsa terhadap kesalahan yang berakibat sangat fatal menyimpang dari semangat dan kesepakatan para *the founding father's* bangsa Indonesia. Kekhawatiran tentang terselengaranya keputusan yang hanya atas dasar dan berdalih demokrasi

yang dipraktekan melalui voting. Hal yang sangatlah masuk akal karena, ***pertama***, suara kekuatan Islam politik di DPR ditambah dengan kelompok elit yang kurang concern terhadap ideologisnya, ditambah lagi dengan kelompok yang berorientasi atas dasar fragmatime kekuasaan berjangka pendek dan ditambah pula orang yang 'anut grubyug' menjadi sangat signifikan dalam memenangkan voting di MPR; ***kedua***, *pressure* kelompok Islam di luar DPR beserta jaringan organisasinya mampu mengkondisikan situasi politik nasional dan mempengaruhi secara signifikan proses pengambilan keputusan di MPR; ***ketiga***, kenyataannya kekuatan nasionalis sebagai benteng ideologi negara, mempertahankan substansi UUD 1945 semakin terpecah-belah terbawa arus kepentingan pragmatisnya sendiri; ***keempat,*** wacana dekonstruksi sistem politik kini mendapat ruang yang cukup untuk melakukan manuver/issue politik yang *acceptable.*

BILA SEMANGAT untuk menggugurkan kesepakatan *the founding fathers* dan dendam politik tersebut yang tak berkesudahan menjadi *mainstream*-nya, maka kita akan mendapati sebuah konstitusi dengan spirit komunalisme yang menegasikan realitas sosial politik yang plural. Amandemen UUD 1945 kali ini akan kembali menjadi ajang perseteruan ideologis untuk mengukuhkan pergulatan politik aliran yang seharusnya telah selesai. Dan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tak pernah beranjak dari zaman kolonialisme yang mendasarkan diri pada sikap-sikap yang diskriminatif, dengan mengingkari realitas sosial politik yang berkembang. Amandemen UUD 1945, mengapa, siapa dan untuk apa?
Sekian.

Kalibata, 30 Agustus 2001

III – 02
MEMUDARNYA "ALIANSI" ISLAM POLITIK – NASIONALIS !

APABILA ASUMSI bahwa SI MPR 2001 yang mengangkat Mega-Hamzah adalah sebagai menyatunya dua kekuatan ideologis Islam politik dan nasionalis yang selama perjalanan Republik ini menjadi bagian dari persoalan politik yang laten. Dan pula asumsi bahwa keberhasilan menduetkan Mega-Hamzah dalam pucuk kekuasaan pemerintahan RI sebagai suksesnya elit politik dalam upaya mensinergikan potensi ideologis untuk membentuk konfigurasi politik yang ideal. Maka kejadian terakhir menunjukkan bahwa semua asumsi-asumsi diatas difalsifikasikan (digugurkan) dengan sendirinya oleh kenyataan dilapangan yang justru mencoreng upaya rekonsiliasi ideologis tersebut. Mengapa ?

BAGAIMANA TIDAK, merujuk demonstrasi besar-besaran ormas Islam politik baru-baru ini yang menuntut dimasukkannya Piagam Jakarta *(Jakarta Charter)* dalam konstitusi menunjukkan menandai era kebangkitan kembali praktek politik aliran yang selama ini hampir terkuburkan. Aksi politik ini patut dicermati mengingat hasil Sidang Istimewa MPR 2001 yang menduetkan Mega-Hamzah sebagai representasi dua kekuatan politik besar, yang ditengarai merupakan bagian dari upaya perkawinan ideologis untuk meredam konflik ideologis yang tak pernah berhenti sepanjang sejarah kepolitikan Indonesia. Kini, setelah bola

politik dilepaskan melalui aksi demonstrasi tersebut, perkawinan ideologis pun berada diambang keretakan. Upaya untuk mensinergikan kekuatan ideologis melalui aliansi politik kenyataannya tak mampu untuk meng-*cover* keseluruhan persoalan bangsa yang kini sedang dihadapi.

APA YANG DILAKUKAN tersebut merupakan upaya untuk menyiram air garam diatas luka politik bangsa yang tak pernah sembuh. Kekuatan Islam politik yang akan terus memaksakan Piagam Jakarta *(Jakarta Charter)* sebagai tolok ukur tunggal keberhasilan memperjuangkan aspirasi ummat Islam merupakan sebuah sikap politik yang a-demokratis, a-historis dan sedang mengibarkan panji-panji politik rasial-ideologis. Dengan kata lain, fenomena politik aliran kembali mengemuka ditengah upaya pemulihan krisis bangsa yang tak kunjung berhenti.

MENENGOK KE BELAKANG, kita mendapati bahwa argumentasi yang dapat menerangkan realitas tersebut diatas. *Pertama*, dendam kesumat kelompok Islam politik yang telah laten akibat kegagalan memasukkan Piagam Jakarta dalam konstitusi; *kedua*, sistem pemerintahan quasi-presidensiil yang membuka peluang bagi DPR untuk berperilaku tirani; *ketiga*, langkah politik Megawati dalam penyusunan kabinetnya lebih berorientasi pada *problem solution* bangsa daripada akomodasi kekuatan politik secara penuh; *keempat*, kekuatan jaringan Islam politik yang terbentuk baik di parlemen maupun di luar parlemen cukup kuat.

DENGAN DASAR ARGUMENTASI tersebut, maka dapat dipastikan aksi demonstrasi tersebut bukanlah sebuah gerakan spontanitas ketika wacana amandemen UUD 1945 kembali mencuat. Akan tetapi, merupakan letupan gerakan

yang sistematis dan terukur yang dikendalikan oleh sebuah jaringan kekuatan politik yang lebih besar yang berada di parlemen. Indikasi ini dapat ditegaskan dari statemen-statemen politisi di Senayan dalam merespons demonstrasi ini.

KEKHAWATIRAN akan kembalinya era politik aliran yang mengerikan dalam jagad kepolitikan Indonesia mutakhir telah menemukan gejala-gejalanya melalui pembentukan opini dan serentetan peristiwa politik yang ada sekarang ini. Membuka lembaran sejarah mengenai Piagam Jakarta dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia sekarang ini menunjukkan sebuah upaya *feedback* bangsa dan kontraproduktif. Mengapa ?

Pertama, perdebatan mengenai dasar negara telah menemukan kristalisasinya ketika para pendiri bangsa tersebut bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kearifan politik para pendiri bangsa tersebut untuk memproyeksikan bangsa Indonesia sebagai sebuah komunitas politik yang plural ternyata sanggup untuk meletakkan kepentingan komunitas politik yang ideologis. Dengan demikian, kesepakatan tersebut telah final.

Kedua, sejarah menunjukkan betapa bangsa ini terkuras energi politiknya untuk sekedar berkutat pada persoalan-persoalan ideologis yang tak kunjung selesai. Fakta menunjukkan kohesivitas sosial masyarakat akan terbelah kepada solidaritas komunal yang justru akan merusak upaya konsolidasi, rekonsiliasi dan langkah mengintegrasikan komponen-komponen bangsa akibat pola kebijakan yang diambil kekuasaan Orde baru. Dengan kata lain, disintegrasi semakin tak akan terkendalikan.

Ketiga, era perseteruan politik ideologis dalam perkembangan global dewasa ini sesungguhnya tak akan menciptakan sebuah landasan struktur politik yang memadai bagi daya survival bangsa. Salah satu ciri era politik aliran adalah sifat komunalisme yang tertutup, ini bertentangan dengan karakter dialektika perkembangan masyarakat global yang bersifat terbuka, apalagi teknologi informasi akan menciptakan manusia-manusia yang mengharuskan mempunyai daya kompetitif tinggi. Oleh karena itu, struktur politik yang dibutuhkan adalah struktur politik yang dapat mengakomodasi berbagai aliran, kepentingan serta *adaptable* terhadap perkambangan global. Dan ini telah ada dalam dasar negara kita, Pancasila.

NAMUN DEMIKIAN, realitas politik seringkali tak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Dan anehnya, perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana bangsa tersebut mampu mengelola potensi politik. Pengelolaan potensi ideologis yang mendasarkan diri pada sikap komunalisme, akan menciptakan sebuah bangsa yang barbar, apalagi seandainya hal tersebut juga didukung oleh sebuah kekuatan politik yang menghambakan diri pada politik rasial-komunalisme.

MELIHAT PERKEMBANGAN politik terakhir, yang mengusulkan Piagam Jakarta kita melihat adanya benih-benih tersebut kembali tumbuh dalam situasi sosial politik yang masih rentan ini. Dan upaya penyatuan dua kekuatan politik ideologis tak akan pernah kesampaian dalam konfigurasi politik nasional, karena adanya upaya pemaksaan kehendak politik dan pengingkaran terhadap kesepakatan *the founding fathers*.

OLEH KARENA ITU, dengan memudarnya aliansi Islam politik-Nasionalis yang kini tengah terjadi akibat perilaku ormas Islam politik, maka optimisme yang pernah timbul berkaitan dengan hasil Sidang Istimewa MPR 2001 kini sedikit demi sedikit tergerus. Dan beban bangsa ini bertambah lagi. Sebagai anak bangsa, kita semua akan menyaksikan kembali sebuah akrobat politik komunalisme yang akan diprakarsai oleh kekuatan ekstreem dan kelompok opportunis politik disekitar kita. Inikah politik yang dipahami oleh awam adalah kotor ?

Waspada Bung !!

Jakarta, 31 Agustus 2001

III – 03
METAMORFOSA DEMOKRASI DI INDONESIA

BAK MEMILIH BUAH DURIAN. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan cara pemilihan presiden secara langsung yang ditawarkan kepada rakyat untuk memilih sendiri. Memang isue politik apa saja yang menggunakan stigma kerakyatan, demokrasi, dan keadilan bak buah durian yang menjajikan kepuasan. Tentu semua orang memiliki selera dan kepekaan yang berbeda dalam memilih dan menikmatinya. Sementara sebagian kecil elit polirtik anggota PAH-1 MPR, sebagai implementator gagasan pemilihan presiden secara langsung tersebut meski perlu dipertanyakan kredibelitasnya tentang penguasaan berbagai hal antara lain filosofi, analisis dampak sosial politik dan implikasi dan atau ancaman yang mungkin timbul atas kelemahan dan kendala yang terjadi apabila cara itu dipaksakan apalagi dengan menerapkan alternatif yang dilegitimasi oleh amandemen UUD 1945, di-tahun 2004. Demokrasi kita kayaknya sedang dalam kondisi periveral, sejalan dengan berlangsungnya deformasi struktural perpolitikan di Indonesia, ketika para elit politik cenderung menggunakan kekuasaan konstitusi (*constitution power*) untuk meng-golkan segala tujuan politik jangka pendeknya. Emosional, traumatik dan eforian. Karena kalau kita mau jujur bahwa idea pemilihan presiden secara langsung beralasan kuat oleh faktor histori kecelakaan konstitusi yang

terjadi pada Sidang Umum MPR 1999 ketika calon presiden dari partai pemenang pemilu digagalkan oleh kelompok poros tengah.

MAIN KEROYOK TERUS. Namun realita politik yang terjadi, pihak yang mencelakakan itu pulalah yang paling bersemangat tentang gagasan memaksakan pemilihan presiden secara langsung. Bahkan sebaliknya Fraksi dari partai pemenang pemilu yaitu PDI Perjuangan tercatat paling terakhir menyetujuinya atas pembahasan dalam PAH-1 MPR setelah seluruh fraksi "ngeroyok" PDI Perjuangan. Keraguraguan fraksi terbesar itu cukup beralasan, menyusul pernyataan Megawati Soekarnoputri Ketua Umum partai yang secara berulang-ulang sebelumnya, dan terakhir dalam pidato sebagai presiden 16 Agustus 2001 yang menyatakan agar segala hal yang berkaitan dengar perubahan UUD 1945 harus dilakukan secara hati-hat Selanjutnya Presiden menegaskan sikapnya tentan perlunya dibentuk komisi konstritusi. Tentu maksudnya terkait juga dengan adanya gagasan pemilihan presiden secara langsung yang konsekuensinya harus merubah UUD 1945. Pernyataan presiden tentang pembentukan komisi konstitusi, kini nyaris tak terdengar oleh hiruk pikuknya wacana teknis pemilihan presiden secara langsung diproses secara konstitusional, dijadikan adenda pokok PAH -1 MPR menjelang Sidang Tahunan MPR 2001.

MENANGKAP SINYAL MEGAWATI. Kehati-hatinya mengandung cara mengambilan resiko yang terkecil dalam keputusan konstitusi. Itulah sinyal yang kita tangkap dari pernyataan presiden Megawati Soekarnoputri yang syarat dengan kebijaksanaan dan kearifan politik tersebut. Kita berkewajiban menterjemahkannya secara persuasif, akademik dan kultural yang selama ini sedang mulai

ditinggalkan oleh para elit politik kita terutama yang ada di lembaga legislatif. Sudah terlalu lama rakyat sering dijanjikan, disuguhi jargon-jargon demokrasi dan keadilan tanpa karya dan upaya peningkatan kecerdasan dan pemberdayaan rakyat yang lebih manjamin terselenggaranya demokrasi dan keadilan yang sebenarnya. Demokrasi, keadilan dan kemakmuran yang berdasarkan atas kesepakatan awal para *the founding fathers* sebagaimana yang disemangati oleh pembukaan dan isi batang tubuh UUD 1945. Karena yang justru terjadinya adalah, re-interprestasi sepihak tentang UUD 1945 yang cenderung mengkambing hitamkan Undang-Undang Dasar 1945 ketika kedapatan adanya kegagalan dalam membangun bangsa selama ini.

METAMORFOSA DEMOKRASI INDONESIA. Demokrasi di Indonesia sedang mengalami metamorfosa perubahan bentuk (deformasi) meninggalkan jatidiri dan rohnya dasar negara yaitu Pancasila. Demokrasi yang oleh Bung Karno dibangun berdasarkan budaya dasar bangsa yaitu Gotong Royong sedang mengalami evolusi yang sistemik!. Berawal dari masa Orde Baru ketika "**demokrasi yang harus (dipaksa) bulat**" oleh Soeharto hingga orde reformasi "**demokrasi berbentuk segi banyak**" untuk tidak mengatakan demokrasi yang tak berbentuk. Demokrasi yang semakin jauh dari yang diamanatkan oleh dasar negara Pancasila khususnya pada sila ke empat yaitu *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"* .

Terakhir semakin jelasnya metamorfosa menuju Orde *"Demokrasi liberal yang dipimpin oleh Voting di lembaga perwakilan"*. Dalam proses konstitusi pemilihan presiden secara langsung yang sedang digodog oleh PAH – I MPR,

keputusannya dilakukan melalui voting yang terjadi di "panitia kecil – Ad Hoc". Pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar dalam mekanisme keputusan itu hanya diatur oleh tata-tertib MPR.

MAINSTREAMNYA PERUBAHAN UUD 1945. Pergulatan tentang konsep operasional pemilihan presiden secara langsung dengan mainstream perubahan UUD 1945. Terminologi pengambilan keputusan yang terbalik. Karena keputusan substansi operasionalnya mendahului substansi perubahan Undang-Undang Dasarnya. Hal yang bisa menjadi preseden konstitusi berikutnya. Disamping proses politik yang terjadi tanpa melibatkan rakyat dan uji akademis melalui tesis sosial politik yang dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari yang menyangkut perubahan UUD 1945. Hal yang riskan atas tidak adanya jaminan bahwa kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia tidak lebih baik dari keterpurukan dalam kepekaan disintergrasi seperti sekarang ini. Sebuah pertanyaan besar apakah benar rakyat dan budaya bangsa kita telah siap dengan keputusan besar tentang pemilihan presiden secara llangsung. Demikian apakah pula rakyat telah cukup diberi waktu dan ruang untuk menerima sistem pemilihan presiden secara langsung dalam pergelaran demokrasi terbesar pemilu nanti . Karena tanpa persetujuan, kesiapan dan masa sosialisasi serta pencerdasan yang cukup bagi rakyat, pemilihan presiden secara langsung akan kontra produktif. Pengambilan keputusan politik oleh MPR (baca : PAH MPR) sekali lagi sungguh sangat riskan karena menyakut perubahan UUD 1945 yang sekali lagi oleh Presiden Megawati diminta untuk diproses secara hati-hati.

PERUBAHAN ARAH BIDUK FALSAFAH BANGSA. Perubahan UUD 1945 sudah mencapai tingkat yang sangat

membahayakan ketika arah biduk demokrasi indonesia (Pancasila) berubah arah!. Bahkan menyeret sistem ketatanegaraan kita kearah liberal - federalistik. Atau Demokrasi Indonesia tengah berada dalam persimpangan antara Sistem pemerintahan parlementer dan Diktatoriat Presidential. Atau tepatnya boleh dikatakan sistim demokrasi yang banci. Presiden hasil pemilihan langsung akan lebih sulit dikontrol oleh lembaga legislatif. Kekuasaan politik mutlak bagi Presiden yang dipilih langsung olah rakyat. Demikian pula dalam keadaan terpaksa MPR sulit mendapatkan dalil konstitusi untuk menurunkan presiden kecuali pemilihan umum ulang. Artinya Supremasi kekuasaan tertinggi pada lembaga MPR sesuai dengan UUD 1945 akan runtuh. Sementara kita sedang menikmati (eforia) kemenangan supremasi kekuasaan legislatif yang nyaris kebal terhadap kontrol. Dalam proses pemilihan presidren langsung, budaya konspirasi politik yang dikenal hanya ditingkat elit politik akan merembet kepada konspirasi politik ditingkat bawah (rakyat). Wajar ada kehawatiran *money politics* terjadi dalam pemilihan presiden secara langsung. Betapa mengerikan bilamana hal tersebut terjadi. Karena Indonesia itu bukan Amerika yang memiliki Kongres dan memberikan hak-hak veto presiden!. Ketatanegaraan yang berlangsung bagi negara-negara yang menganut demokrasi liberal - federalisme!.

KONSTRUKSI TANPA PERUBAHAN UUD 1945. Oleh karena itu bagi kita disarankan agar pemilihan presiden secara langsung dapat ditempuh dengan dua alternatif masing masing tanpa harus merubah konstitusi UU Dasar 1945 yaitu, ***pertama*** cukup dengan perubahan tata tertib dan atau pembuatan UU pemilu tentang tatacara pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR yang memberikan jaminan bahwa calon presiden dari partai pemenang secara langsung

(otomatis) ditetapkan oleh MPR menjadi Presiden. ***Kedua*** pemilihan presiden tetap berlangsung seperti selama ini, yaitu melalui pemilihan dengan suara terbanyak di MPR dengan ketentuan bahwa nama calon yang "ditawarkan" oleh partai peserta pemilu pada saat pemilu tidak boleh di-rubah (ganti). Hal untuk mengghindari manuver-manuver elit dan konspirasi politik di MPR yang pernah terjadi dalam pemungutan suara pada SU MPR 1999 dimana partai-partai tertentu (yang kalah dalam pemilu) sekonyong-konyong bergabung dalam satu aliansi (konspirasi) yang disebut poros tengah di MPR, membatalkan pencalonan presidennya masing-masing, kemudian memunculkan calon dan memenangkan Abdurrachman Wahid dalam voting pemilihan Presiden. Sebuah manuver kenakalan elit politik di parlemen yang sangat menyakitkan hati rakyat!. Tetapi apakah karena kenakalan politik yang menyebabkan terjadinya tragedi konstitusi ditahun 1999 tersebut harus mengkambing hitamkan konstitusinya secara membabi buta?. Ataukah memang sedang berlangsung metamorfosa Demokrasi Indonesia menuju liberalisasi politik, yang mainstreamnya meski masih terlalu auh kedepan yaitu perubahan bentuk dari NKRI menjadi negara NKFRI (Negara Kesatuan Federasi Republik Indonesia). Waspadai Bung !!

Jakarta, 21 September 2001

BAGIAN KEEMPAT
TENTANG KABINET
GOTONG ROYONG

IV – 01
LAMBATNYA PENYUSUNAN KABINET MEGA

SUDAH DUA MINGGU suksesi kepemimpinan nasional itu terbentuk, namun pembentukan kabinet Gotong Royong (begitu rencanya kabinet ini akan diberi nama) belum juga menunjukkan tanda-tanda akan terbentuk. Munculnya statemen Sekjen PDIP bahwa Mbak Mega tidak ingin salah memilih dan tak ingin adanya bongkar pasang menteri, secara tersirat dapat dibaca sebagai bentuk kealotan dalam penyusunan kebinet ini..

LAMBATNYA PENYUSUNAN INI memang sangat mengkhawatirkan bagi *recovery* bangsa, khususnya ekonomi. Sebagaimana kita ketahui respons pasar yang sangat positif yang ditandai dengan menguatnya nilai rupiah kini menunjukkan tanda-tanda kembali melemah yang juga diikuti oleh penurunan IHSG. Sebagai warga bangsa, kelambanan ini patut kita sesali karena kecemasan akan hilangnya momentum pemulihan semakin nyata didepan mata dengan alotnya penyusunan kabinet Megawati.

PERSOALANNYA MENGAPA ini bisa terjadi? Tulisan ini ingin sekedar memberikan deskripsi mengenai alotnya penyusunan kabinet karena tarik ulur kepentingan untuk menduduki pos-pos strategis bagi masa depan partai itu sendiri. Asumsi yang mendasarinya adalah kepentingan

partai pada pemilu 2004. Disamping itu, implikasi-implikasi politik yang mungkin terjadi sehubungan dengan kenyataan tersebut.

PANGKAL TOLAK dari semuanya ini adalah proses naiknya Mega yang merupakan buah tangan politik bersama lintas fraksi yang dibangun sejak tahun lalu. Implikasinya, kabinet akan disusun lewat koalisi-koalisi partai. Dengan demikian, keadaan politik sekarang yang terjadi adalah Mega berada dikelilingi oleh kekuatan ini, yang mempunyai kepentingan untuk menguasai pos-pos dalam kementrian yang akan dibentuk nanti. Tarik ulur terjadi dalam aras ini, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masa depan partai. Koalisi kursi sebagai bentuk baku untuk memberikan jaminan politik bagi kelangsungan pemerintahan akan sarat dengan nuansa politik dagang sapi. Sebuah kedaan yang sangat dilematis antara tuntutan akseptabilitas publik dan garansi politik partai.

REALITAS ini terlihat dari rumor politik yang berkembang bahwa jumlah personel dalam kabinet adalah 34 orang sebagai bentuk akomodasi politik karena bentuknya yang *'gemuk'*, yang justru bertentangan dengan harapan publik yang menginginkan adanya bentuk yang seefisien mungkin. Disamping itu, pilihan-pilihan politik antara tuntutan pasar dengan tuntutan partai politik juga akan semakin mempersulit Megawati dalam mengambil keputusan final dalam penyusunan kabinet. Oleh karena itu, sangatlah beralasan pernyataan Frans Seda, salah seorang penasehat dalam Tim Ekonomi Megawati ini yang mengatakan bahwa kabinet Gotong Royong itu harus memperoleh dukungan pasar dan dukungan politik parpol. Sebuah keadaan yang agaknya sangat sulit.

WALAUPUN STRUKTUR dan susunan kabinet sepertinya telah selesai, namun penyusunan personilnya terjadi tarik ulur yang berkepanjangan. Beberapa partai politik yang menyodorkan nama kadernya ke Megawati, tak dapat dipungkiri merupakan beban politik yang bisa saja merupakan bom waktu bagi Megawati dalam menakhodai Republik ini. Sementara itu, perebutan departemen 'basah' semakin menambah alotnya penyusunan ini. Bagi Partai Golkar, tak terelakkan akan merebut posisi yang berkaitan dengan bidang hukum untuk melindungi para pengusaha yang bermasalah yang merupakan kroni Golkar, disamping itu untuk meminimalisir kemungkinan terkuaknya dosa-dosa politik Golkar di masa lalunya. Untuk partai lain, merupakan keniscayaan untuk dapat menguasai departemen yang berkaitan dengan ekonomi sebagai mesin uang menghadapi pemilu 2004.

KOALISI KURSI dan Implikasinya bagi Kabinet. Penjatahan kursi yang diberikan kepada setiap partai politik tak urung akan menyisakan bom waktu bagi kinerja pemerintahan ke depan. Perjalanan kabinet Gus Dur telah menjadi bukti bahwa sinergi yang diharapkan telah berubah menjadi disergi. Proses politisasi birokrasi berlangsung secara massif, karena masing-masing berkepentingan bagi *survive*-nya partai. Para menteri memberikan loyalitas ganda, yaitu kepada partai sebagai induk semang politiknya serta kepada presiden.

POLITISASI BIROKRASI untuk menopang eksistensi partai politik itulah yang merupakan biang keladi tak terbangunnya soliditas birokrasi sebagai instrumen negara untuk mengaktualisasikan kehendak rakyat. Politisasi birokrasi yang dalam bentuk kongkritnya berupa restrukturisasi

birokrasi dalam perjalanannya ke depan diperkirakan akan menguasai jalannya roda pemerintahan.

KECEMASAN INI SEMAKIN menemukan bentuknya jika kita menggali historiografi kabinet koalisi atas dasar aliran politik yang sangat berbeda, dimana potensi pertentangan semakin terbukanya ketika harus dihadapkan pada keharusan daya survival dalam realitas politik yang kompetitif sekarang ini. Kabinet selalu jatuh bangun tanpa penyelesaian program kerja secara tuntas. Dan lagi-lagi rakyat hanya kebagian getah dari 'klik' yang telah terbangun secara latent ini.

WALAUPUN KABINET belum terbentuk, namun tanda-tanda kearah terjadinya politik dagang sapi (penjatahan) kian terasa. Upaya partai politik tersebut yang secara psikologis akan memberikan tekanan bagi Megawati, semakin menghilangkan makna hak prerogratif yang dimilki oleh presiden yang tak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Apalagi bayang-bayang proses kejatuhan Gus Dur masih melekat bahwa perilaku parlementer yang *'sok kuasa'* ditengah sistem pemerintahan presidensiil semakin tak terkendali.

DITENGAH SISTEM pemerintahan yang ambigu inilah Megawati harus mengambil keputusan-keputusan politik yang cerdas. Dan salah satu ujian pertama bagi Megawati adalah dalam hal penyusunan kabinet. Dilematis memang, namun itulah yang harus dihadapi Megawati kini, apalagi banyak kalangan mencemaskan keadaan ini berlarut-larut yang tak kondusif bagi pemulihan krisis bangsa yang tak kunjung selesai.

OLEH KARENA itu, sangat masuk akal jika pengumuman kebinet tertunda-tunda. Namun tentunya ada batas toleransi

sehingga momentum yang baik untuk *recovery* tak hilang bersamaan dengan tarik ulur partai untuk memperebutkan posisi di kabinet. Kita semua mengharapkan di minggu ini semuanya akan menjadi jelas, seberapa besar harapan publik terhadap kabinet Megawati.

Kalibata, 5 Agustus 2001

IV – 02
THE DREAM TEAM OF MEGAWATI

THE DREAM TEAM, itulah komentar singkat dari publik ketika menilai susunan kabinet gotong royong. Pujian patut kita acungkan karena Mega mampu menghindari penyanderaan politik dari para politisi, khususnya partai politik yang mendorong Mega untuk naik ke kursi kepresidenan. Disisi lain, respons positip pasar yang ditandai dengan semakin menguatnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika, kegairahan akan iklim investasi semakin nyata dengan mengalirnya dukungan luar negeri terhadap pemerintahan Megawati. Pendek kata, kecemasan dan kekhawatiran akan ancaman kebangkrutan Indonesia semakin terkikis.

MEMANG PADA AWAL-AWALNYA sempat menimbulkan kekhawatiran karena lambatnya susunan kabinet tersebut diumumkan ke publik, namun kesemuanya itu hilang bersamaan ketika melihat formasi kabinet yang ramah pasar dan usaha Megawati untuk menyeimbangkan keberadaan partai politik di kabinetnya. Ini penting karena proses politik naiknya Megawati ke kursi RI-1 juga tak terlepas dari kepentingan partai politik untuk menguasai akses ekonomi dan sikap *apriori* pasar terhadap sepak terjang partai politik selama ini. Akomodasi partai politik diletakkan dalam kerangka mengantisipasi kelangsungan pemerintahannya sendiri dengan menempatkannya diluar bidang ekonomi.

ASUMSI PERTAMA ketika melihat keberadaan kabinet gotong royong adalah orientasi kabinet yang diletakkan pada upaya untuk melakukan *recovery* ekonomi. Ini dapat dilihat dari kuatnya respons Megawati terhadap tuntutan pasar. Menciptakan *the dream team* ekonomi yang *friendly market* sebagai modal awal yang sangat bagus untuk menata kembali segala kesemrawutan ekonomi. Dalam beberapa statemen yang dilontarkan sang kapten tim ekonomi, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti jelas-jelas menunjukkan *sense of crisis* dengan memprioritaskan agenda pada tiga hal, yaitu *(1)* penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran; *(2)* penyelesaian utang luar negeri; dan *(3)* restrukturisasi fiskal. Dan, tentu saja, kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) akan terus dilanjutkan.

BAGAIMANA DENGAN bidang yang lain? Sejauh melihat komposisi kabinet sekarang ini, semuanya diletakkan pada kerangka untuk menopang pemulihan krisis ekonomi. Prasyarat pemulihan krisis ekonomi yang diantaranya menuntut kondisi yang stabil dan kepastian hukum cukup mendapat ruang dengan menempatkan pos-pos ini lewat orang yang mempunyai keahlian dan profesionalitas dibidangnya. Dengan langkah awal Megawati dalam penyusunan kabinet tersebut, kita patut menyambut dengan dukungan tanpa harus kehilangan sikap *kritis-konstruktif*, agar agenda *recovery* bangsa yang sangat mendesak tersebut dapat segera tertuntaskan.

BEBERAPA KEKHAWATIRAN. Tak ada gading yang tak retak, itulah peribahasa yang tepat untuk melihat susunan kabinet sekarang ini. Faktor historis naiknya Mega yang sarat dengan akrobat politik para politisi kontra Gus Dur, menjadikan keharusan sikap akomodatif Mega terhadap kerja politik penentang Gus Dur di dalam Kabinet Gotong

Royong. Visi reformasi yang pada intinya menghilangkan peran politik TNI dalam eksekutif dan upaya untuk '*mengkotakkan*' partai Golkar sebagai representasi kekuatan Orde Baru, bila kita meneropong keberadaan kabinet Mega belum sepenuhnya dilakukan. Ini karena sifat dari proses politik itu sendiri dan keharusan untuk dapat mempunyai daya *survival* yang memadai bagi pemerintahan Megawati. Sebuah keadaan yang sulit dan sangat dilematis bagi Megawati. Oleh karena politik balas jasa tak terhindarkan dalam hal ini. Kekhawatiran akan munculnya masa represif sebagai bentuk pengkondisian untuk menopang terselenggaranya proses pemulihan ekonomi yang menuntut adanya stabilitas politik dan sosial seakan-akan hadir di kabinet Megawati. Belum lagi, situasi ini dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan Orde Baru untuk mengail di air keruh nantinya.

PEMBENTUKAN WAJAH BARU "Departemen Penerangan" untuk menata kekuatan media sebagai kontrol social dikhawatirkan akan menghadirkan pola-pola represivitas yang akan mengekang kebebasan untuk berpendapat dan hilangnya iklim dialogis yang telah diletakkan Gus Dur. Ini ditambah dengan tampilnya kekuatan TNI di kabinet secara signifikan yang dikahawatirkan akan memunculkan elemen represif dalam mengelola potensi disintegrasi yang kian menguat. Sementara lowongan di Jaksa Agung yang merupakan instrumen institusi hukum menyelesaikan kasus-kasus hukum belum tertuntaskan karena tarik-menarik kepentingan yang teramat kuat. Namun demikian , kekhawatiran tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan untuk bersikap subyektif terhadap the dream team of Megawati. Karena ditengah kuatnya tarik-menarik kepentingan dan pressure politik, Megawati telah mampu melangkah sesuai dengan harapan kita.

IV – 03

KABINET GOTONG ROYONG

MEGAWATI MANAJER. Ibarat manajer sepak bola, Presiden Megawati Soekarnoputri telah sukses pada momentum langkah awalnya, memilih pemain terbaik, dan menempatkannya di posisi yang pas. Kini, tinggal bagaimana ia akan memimpin tim itu di lapangan. Apakah bisa bermain bagus, kompak, dan menciptakan gol? Bayangkan, di bagian depan ada duet penyerang Dorodjatun-Boediono, figur yang dianggap paling punya peluang mencetak gol. Bukan gol beneran tentunya, tapi bagaimana memulihkan ekonomi. Agenda yang prioritas utama kabinet. Kedua-duanya profesional, jujur, berintegritas, dan, diterima pasar. Dorodjatun Kuncoro-Jakti sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi dan Perindustrian (Menko Ekuin) adalah seorang ekonom senior yang disegani, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono adalah bekas direktur Bank Indonesia dan ketua Bappenas, yang dikenal jujur, pandai, dan berpengalaman di birokrasi. Suatu duet yang dinilai ideal. Bahkan oleh para politisi yang mungkin menyimpan kecewa karena jatahnya tidak sesuai harapan.

KETUA DPR AKBAR TANDJUNG menyebut duet Dordjatun-Boedino sebagai tim impian. "Inilah *the Dream Team* ekonomi. Dorodjatun ekonom yang punya akses baik ke dunia internasional. Sedangkan Boediono punya pengalaman

bagus," katanya. Sedang Ketua MPR Amien Rais, yang terang-terangan mengaku agak kecewa karena jagoannya, Bambang Sudibyo, gagal jadi Menteri Keuangan, menilai kabinet sekarang sesuai harapan masyarakat. Pos "cadangan" sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pun gagal diraih mantan Menteri Keuangan di masa Abdurrahman Wahid ini, kalah dengan Rini MS Soewandi. "Kabinet ini saya beri nilai 8,2 lah," kata ketua umum Partai Amanat Nasional(PAN) ini.

MARKET FRIENDLY. Bagaimana dengan para pengamat ekonomi, pengamat dan praktisi pasar? Lebih gegap gempita tanggapannya. Hampir semuanya menyambut gembira tim ekonomi ini sebagai ideal, memenuhi harapan masyarakat, dan diterima pasat atau *market friendly*. Pengamat ekonomi Umar Juoro, misalnya, menyebut Dorodjatun-Boediono sebagai duet terbaik. Ekonom senior Emil Salim menyebutnya sebagai duet yang mampu merebut dan memulihkan kepercayan pasar. Dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin langsung menegaskan kesiapannya untuk berkerja sama dengan Bank Dunia pun tak ketinggal memberikan pujiannya. Bank Dunia menganggap, tim ekonomi ini mempunyai keahlian yang memadai untuk mengatasi masalah perekonomian Indonesia yang kian menumpuk. "Ini tim ekonomi yang sangat menjanjikan dan akan diterima baik oleh pasar. Tim ini menggabungkan keahlian profesional dan pengalaman birokrasi," tukas Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Mark Baird.

YANG PENTING GOL-NYA, BUNG. Lalu, bagaimana tanggapan pasar sendiri? Positif, tentu saja. Penguman kabinet pada pukul 11.00 Kamis (9/8) kemarin mendorong pelaku pasar membeli rupiah di pasar spot, sehingga mata uang Indonesia melonjak mendekati level 9.000 per dollar AS. Ketika perdagangan ditutup, rupiah mencapai level

9.110/9.160 atau naik 215 poin dibanding hari sebelumnya yang 9.325/9.370 per dollar AS atau naik 215 poin.

TAMPILNYA DUET DORODJATUN-BUDIONO ini memang menggembirakan. Orang semula orang hanya bisa mengira akan mendapat salah satunya saja. Yaitu Dorodjatun atau Boediono sebagai Menko Ekuin. Sedang Menkeu, antara lain, diperebutkan Bambang Sudibyo (PAN), Laksamana Sukardi (PDI Perjuangan), dan Menkeu (demisioner) Rizal Ramli. Laksamana Sukardi akhirnya menempati pos lamanya, Menteri Negara BUMN. Sementara pos ekonomi lainya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas, diisi kolega Laksamanan', Kwik Kian Gie. Walaupun keduanya dari kalangan partai, tapi kedua figur ini juga dinilai kredible dan kapable sehingga diterima pasar. Atau minimal tidak menimbulkan sentimen negatif dari pasar. Pos penting ekonomi lainya, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, diduduki oleh pejabat lamanya, Purnomo Yusgiantoro.

REVRISOND BASWIR, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menilai Megawati bisa menghindari politik balas jasa atau membuat kabinet jadi ajang bagi-bagi kue dengan para politisi yang berjasa menaikkannya ke kursi RI-1. Mega mengisi tim ekonominya dengan para profesional, dan aspirasi politik ditampung di tempat lain. "Kesan saya, Mega berhasil menghindari penyanderaan partai-partai politik," ujar pengamat ekonomi Revrisond Baswir, kepada **detikcom.**

TAPI, TIM EKONOMI yang bagus bukanlah jaminan untuk berhasil dicapainya hasil yang baik. Seperti sebuah dream team dalam sebuah kesebelasan sepak bola pasti akan menang dalam pertandingan. Salah satu anggota tim ekonomi yang juga dikenal sebagai orang kepercayaan

Megawati, Laksamana Sukardi, menyadari hal ini. "Tim yang bagus bukanlah jaminan. Tapi, ini memang modal awal baik yang baik untuk melangkah," katanya.

TENTANG APA yang akan dilakukannya, mantan bankir ini menyatakan akan akan memaksimalkan kontribusi BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laks, demikian ia bisa dipanggil, juga menyatakan sudah memiliki blue print yang dulu belum sempat dilaksanakan karena keburu diganti oleh Gus Dur. Program utama yang akan dilakukannya adalah melakukan efisiensi BUMN untuk meningkatkan keuntungan, serta melanjutkan program-program yang telah disepakati dengan IMF yang tercantum dalam LoI, yaitu melakukan privatisasi BUMN untuk menutup defisit anggaran. Bagi Laks, pemerintah memang harus memilih antara asas kepemilikan atau asas manfaat dalam BUMN.

"BUAT APA MEMILIKI BUMN kalau tidak ada manfaatnya, malah membebani APBN," katanya. Defisit APBN memang salah satu masalah ekonomi terberat yang dihadapi, selain masalah seperti merosotnya investasi asing, buruknya kondisi perbankan, dan anjlognya nilai rupiah.

MENKEU BOEDIONO memprioritas membereskan masalah anggaran dan melanjutkan letter of intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF), dan Rini Soewandi akan mencoba memperbaiki tatanan industri dan perdagangan dan menerapkan good corporate governance melalui peraturan dan aturan main yang setransparan mungkin.

SEMENTARA SANG KAPTEN tim ekonomi, Dorodjatun memprioritaskan agenda pada tiga hal, yaitu penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, penyelesaian utang luar negeri, dan restrukturisasi fiskal.

Dan, tentu saja, kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) akan terus dilanjutkan.

Nah, *the dream team* sudah menyatakan tekadnya. Sekarang, tinggal ditunggu bagaimana aksi dan realisasinya.

IV – 04
GANJALAN KABINET MEGA

DIAM TAPI MENGHANYUTKAN. Itulah yang berhasil dibuktikan Presiden Megawati Soekarnoputri di awal pemerintahannya. Setelah dituding lamban dalam pembentukan kabinet, serta "dicurigai" akan tunduk pada kemauan para pimpinan partai politik dlam menyusun kabinet, Megawati tampil mengejutkan. Ia berhasil menyusun kabinet yang kuat, dan hanya mengakomodasi aspirasi partai politik seperlunya. Megawati berhasil membebaskan diri dari penyanderaan politik dari para politisi yang berjasa mengantarkannya ke kursi presiden, dengan membentuk tim ekonomi yang kuat dan terdiri dari para profesional di bidangnya. Akomodasi terhadap partai-partai politik diberikan untuk selain ekonomi.

SINYAL BAHWA Megawati akan mendesain susunan kabinetnya sendiri sudah terlihat ketika ia membacakan pidato pengantar sebelum komposisi kabinet diumumkan. Kedudukan menteri negara, kata Megawati, tidak tergantung pada DPR, dan Presiden tidak bertanggungjawab pada DPR, atau kedudukan Presiden tidak tergantung pada DPR. Dalam sistem Presidensiil, maka penyusunan kabinet harus taat asas pada sistem ini. Ini, artinya, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif. Tapi, Megawati juga menyatakan kalau dirinya menyadari realitas yang berkembang. Maka dalam penyusunan kabinet ia juga mendengarkan aspirasi

rakyat yang disalurkan melalui partai politik, media massa, atau secara langsung. Nah , Megawati ternyata berhasil memadukan ini semua. Sesuai hak prerogatifnya, ia membentuk tim ekonomi yang sesusai harapan pasar, atau masyarakat pada umumnya. Tapi ia juga tidak melupakan jasa para politisi yang mendukungnya dengan tetap memberi tempat pada mereka, walau porsinya tidak sebanyak dan "sebasah" yang didinginkan.

PARA MOTOR LINTAS FRAKSI, yang sukses menggusur Abdurrahman Wahid dari kursi Presiden sehingga Mega naik menjadikannya, misalnya diakomadasinya secukup dan seperlunya. Ketua Fraksi Reformasi Hatta Radjasa, Ketua Fraksi Partai Golkar Syamsul Muarif sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, mantan Ketua Pansus Buloggate dan Bruneigate Bachtiar Chamsyah sebagai Menteri Sosial, dan Alimarwan Hanan sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Mantan Ketua Umum PKB Matori Abdul Djalil, yang dikenal sebagai pendukung setia Mega sejak lama, dan berani membangkang dari kebijakan partainya dengan menghadiri Sidang Istimewa MPR, "dihadiahi" kursi Menteri Pertahanan. Sementara Yusril Ihza Mahendra yang mewakili Partai Bulan Bintang, kembali pos lamanya di Departemen Kehakiman dan HAM.

UNTUK MILITER yang telah mendukung proses dan SI MPR, Megawati juga memberikan "balasan". Mantan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono dikembalikan ke pos lamanya, cuma sekarang namanya Menko Polkam. Demikian juga Agum Gumelar dikemalikan ke pos lamanya sebelum menjabat Menko Polsoskam sebentar menggantikan Susilo, yaitu Menteri Perhubungan. Sedang Wakil Ketua MPR dari TNI/Polri Hari Sabarno ditunjuk menjadi Menteri Dalam

Negeri. Kadar akomodasi yang dilakukan Mega dinilai sudah pas dan sesuai oleh banyak kalangan. Pertama-tama karena untuk tim ekonomi ternyata Megawati benar-benar bisa independen. Sedang untuk tim lainnya Mega telah menempatkan orang cukup sesuai dengan bidangnya. "Kesan saya, Mega berhasil menghindari penyanderaan partai-partai politik," ujar pengamat ekonomi Revrisond Baswir, kepada **detikcom**.

BERBEDA dengan tanggapan atas tim ekonomi, tanggapan para elit, masyarakat atau pengamat, ternyata berbeda-beda. Ketua DPR Akbar Tandjung, misalnya menilai trio Susilo Bambang Yudhoyono, Hari Sabarno, dan Matori, sebagai figur yang pas untuk masing-masing posisi yang ditempatinya. Tapi kalangan pengamat politik ternyata bersilang pendapat. Rektor UGM Ichlasul Amal misalnya menilai penempatan Matori sebagai Menhan tidak pas. Sebab, Matori merupakan orang politik yang tidak pernah terdengar memiliki konsep seputar pertahanan negara. Sedang pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin haris, menilai Matori perlu diberi kesempatan untuk belajar.

SYAMSUDDIN JUGA menilai, Susilo tepat sebagai Menko Polkam, karena walaupun militer ia dikenal sebagai seorang pemikir yang moderat. Yang dikhawatirkan justru posisi Mendagri yang dijabat militer. Ia khawatir, Hari Sabarno akan melakukan pendekatan sentralistik yang akan kontraproduktif di tengah tuntutan otonomi daerah sekarang ini. "Ia harus banyak belajar dari pengalaman 3-4 tahun terakhir untuk menangani gejolak lokal dan otonomi daerah," ujarnya.

KRITIK LEBIH keras dilontarkan Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Munir. Aktivis hak asasi manusia ini kuatir Hari Sabarno melihat munculnya elemen represif Hari Sabarno sebagai Mendagri, SBY sebagai

Menko Polkam, plus terpilihnya Hendropriyono sebagai Ketua Badan Intelijen Negara (BIN). "Agar agenda reformasi tetap berjalan, Mega sebaiknya mengontrol ketat ketiga menteri ini," tegasnya.

DISISI LAIN, keberadaan para "*cowboy*" Senayan yang ketika masa pemerintahan Gus Dur sangat garang dalam melakukan kritik, tentunya dengan tujuan dapat memperoleh akses politik dan kekuasaan. Namun kemudian tak mendapat tempat sama sekali dalam pemerintahan Megawati. Rumor dimasyarakat berkembang tentang nama yang dianggap memiliki peluang karena ambisinya antara lain, Ade Komaruddin, Alvin Lee, Arifin Panigoro, Heri Akhmadi, Pramono Anung, Soetjipto dll, merupakan orang-orang yang sangat berharap masuk dalam 'team' Megawati, namun nyatanya mereka tak dapat masuk. Lontaran ucapan kekecewaan yang diungkapkan setelah pengumumar Kabinet merupakan ekspresi kekecewaan mereka. Dar. dengan kekuatan yang mereka punyai, bukan tidak mungkin para "*cowboy*" politik ini akan menjadi batu sandungan dalam pemerintahan Megawati.

KEKUATIRAN akan kembalinya masa represi juga muncul dengan dibentuknya "wajah baru" Departemen Penerangan, yaitu Kementerian Negara Informasi dan Telekomunikasi. Kehadiran kementerian ini memunculkan kekhawatiran kembalinya era pengekangan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers. "Megawati harus memberi jaminan, kementerian ini tak lebih dari humas pemerintah," tegas Sekjen Aliansi Jurnalis Independen, Didik Supriyanto.

Jakarta, 15 September 2001

IV – 05
REVOLUSI, REFORMASI ATAU DEKONSTRUKSI

Catatan dari Pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus 2001

REFORMASI TELAH hampir memangsa bangsanya sendiri. Itulah mungkin ungkapan tersirat yang dikatakan Presiden Megawati mengawali konvensi ketatanegaraan kita di depan Sidang Paripurna DPR, 16 Agustus 2001. Pidato yang diungkapkan penuh retorik tersebut secara garis besar merupakan sebuah refleksi kritis terhadap perjalanan bangsa ini, khususnya sejak era reformasi digulirkan.

SEBAGAIMANA KITA ketahui bersama, transisi politik yang menghasilkan orde reformasi selama ini cenderung berkutat pada persoalan klasik kekuasaan yang stagnan. Terbukanya kran-kran politik yang selama ini tersumbat akibat represivitas rejim Soeharto menghasilkan euphoria politik yang berlebihan, tak terkendali, dan kontraproduktif bagi *recovery* bangsa yang sedang kronis ini.

VISI REFORMASI yang memberikan janji-janji dan harapan akan Indonesia Baru yang lebih demokratis ternyata hanya merupakan arena baku hantam antara berbagai kekuatan politik. Sementara pembentukan sistem general baru belum mampu menopang agenda reformasi, bahkan terkesan *loyo* menghadapi berbagai manuver politik dan tindakan anarkhisme massa. Disisi lain pergelaran praktek-praktek

politik yang korup justru semakin mendapat tempat di alam sekarang ini. Sebuah keadaan yang sangat ironis dan paradoksal memang dengan cita-cita awal berdirinya sebuah orde reformasi.

ITULAH MUNGKIN mengapa Presiden Megawati dalam kesempatan pertamanya setelah menjadi presiden dalam bertatap muka dengan para wakil rakyat mencoba memaparkan *praksis reformasi sebagai sebuah realitas kerja pengubahan*. Ungkapan dengan menyodorkan fakta empiris secara reflektif-kritis-optimistik tersebut memberikan gambaran secara lugas bahwa reformasi bukanlah sebuah era yang memberikan *cek kosong* akan kemakmuran dan sederet cita-cita lainnya yang membumbung tinggi.

NAMUN, REFORMASI berarti *via dolorosa*, jalan panjang yang harus ditempuh bangsa ini secara gradual dan terkadang menyakitkan. Untuk itu, stamina Indonesia sebagai kesatuan antara *nation* dan *state* harus terus terpelihara. *Nation* mengacu pada kolektivitas sosiologis, sedangkan *state* mengacu pada kolektivitas politik. Membangun sinergi antara *nation* dan *state* diharapkan menjadi modal politik yang sangat berharga untuk kembali merajut agenda reformasi yang telah tertelan oleh derasnya hasrat berkuasa sekelompok orang.

DENGAN KATA LAIN, lewat pidato tersebut Presiden Megawati sedang mensosialisasikan apa yang dinamakan *dekonstruksi reformasi*. Dekonstruksi reformasi sebagai bentuk praksis politik yang mengharuskan segenap komponen bangsa ini mulai dari awal untuk mencerna substansi reformasi yang dalam realitas politiknya menimbulkan berbagai macam tafsiran yang menyimpang. Presiden Megawati rupanya ingin mengembalikan arah

reformasi pada tempat yang semestinya sebagai ajang kristalisasi keringat bangsa untuk menemukan visi dan misi bangsa yang hampir hilang.

ITULAH MENGAPA 6 (enam) program pemerintah itu antara lain (1) pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka NKRI; (2) melanjutkan proses reformasi dengan program dan agenda yang jelas; (3) normalisasi kehidupan ekonomi; (4) penuntasan kasus-kasus hukum; (5) melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif; serta (6) mempersiapkan pemilu 2004.

LANGKAH PERTAMA yang dilakukannya adalah dengan membangun kembali pola hubungan yang sehat dan konstruktif dengan parlemen. Ini disadari betul, karena pengalaman pengelolaan negara di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tak efektif karena tak adanya dukungan politik dari parlemen. Ambiguitas sistem pemerintahan kita antara sistem presidensiil dan parlementer yang terkesan rancu, ditangkap secara cerdas oleh Presiden Megawati dengan menjadikan setiap langkah politiknya juga merupakan akomodasi kekuatan politik di parlemen. Dengan ini diharapkan dapat terbangun sebuah kerangka hubungan yang didasarkan pada sinergisitas, sebagai modal politik untuk mengusung agenda reformasi Indonesia.

DENGAN SEGENAP kekuatan dan dukungan yang dimilikinya, Presiden Megawati sedang merajut harapan masyarakat yang terlanjur besar dan realitas sosial politik yang begitu patologis bagi pembentukan bangsa yang demokratis. Semoga mampu melewati *via dolorosa* ... !

Kalibata, 16 Agustus 2001

IV – 06
MEGAWATI, MENGHADAPI SPARATISME DI INDONESIA

KEHADIRAN MEGAWATI dalam pucuk kekuasaan republik ini menandai adanya era optimisme baru untuk menata kembali sosok bangsa yang hampir bangkrut diterpa sekian banyak persoalan pelik yang tak kunjung usai. Kendati proses politik yang berlangsung masih menyisakan luka politik yang tak ringan, namun dukungan dan simpati yang mengalir deras pada sosok dan karakter kepemimpinan yang dibawa Megawati memberikan banyak harapan bagi *recovery* bangsa. Menguatnya nilai tukar rupiah, kembalinya dukungan internasional serta dukungan dari kekuatan politik merupakan modal yang sangat berharga untuk menggairahkan kembali aktivitas kehidupan kemasyarakatan dan perekonomian yang terkesan *stagnan*.

BEBAN PERMASALAHAN bangsa yang diemban pemerintahan Megawati memang sangat berat. Reproduksi politik, sosial dan ekonomi warisan yang diterima semuanya berada dalam keadaan *'koma'* dan rawan konflik. Komponen territorial pembentuk bangsa satu persatu menjauh dari apa yang dinamakan 'konsensus Indonesia' dengan memproklamirkan pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, disintegrasi bangsa sebagai ancaman terbesar bagi Indonesia sekarang menemukan

momentumnya ketika kompleksitas persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saling tumpang tindih.

SEMENTARA di belahan negara-negara lain, kini telah siap untuk memasuki abad baru 'globalisme' yang mengharuskan adanya stamina bangsa yang kuat untuk bisa *survive*, bangsa Indonesia justru masih berkutat pada persoalan konsolidasi bangsa yang tak pernah tuntas. Keadaan bangsa Indonesia akibat manajemen politik yang tak mengindahkan karakter dan identitas plural, kini berbuah dengan berbagai gerakan separatis yang bergerak secara sporadis menggerogoti bangsa ini.

BAGAIMANAKAH pemerintahan Megawati menghadapi realitas ini? Melihat program pemerintahan Megawati yang telah kita ketahui bersama, asumsi dari visi pemerintahan Megawati dalam menghadapi berbagai tuntutan daerah untuk melepaskan diri dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada berbagai hal. ***Pertama***, pemerintahan Megawati mengusung beban historis bangsa untuk tetap berada dalam koridor konsensus *the founding fathers* yang menempatkan NKRI sebagai instrumen final. ***Kedua***, realitas disintegratif ini disebabkan karena bangsa ini mengalami erosi wawasan kebangsaan dan pengelolaan negara yang tak berpihak pada daerah. ***Ketiga***, pergeseran nilai-nilai mondial yang disertai tindakan politik tertentu dari asing turut mewarnai berbagai gejolak separatisme yang ada di Indonesia. ***Kempat***, keadaan di daerah tak terlepas dari penggunaan momentum di tingkat pusat penuh klik politik. ***Kelima***, implikasi negatif bagi *recovery* bangsa, terutama pemulihan ekonomi nasional.

ATAS DASAR ASUMSI tersebut, maka sangatlah bisa dipahami langkah Megawati yang terkesan 'keras'

menghadapi gerakan yang menjurus pada separatisme. Komitmen Megawati untuk menjaga kesepakatan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia diterjemahkan sebagai sebuah tugas ideologis untuk mengusung panji-panji 'nasionalisme' di alam yang penuh keterbukaan dan euphoria politik. Selanjutnya nasionalisme seperti apakah yang akan dijadikan model Megawati untuk mengatasi persoalan bangsa ini?

PERGESERAN TATA DUNIA BARU yang mewarnai kehidupan bangsa kini telah berubah secara drastis. Sejarah bangsa ini mendapati bahwa simbol-simbol perekat bangsa yang diyakini mampu mengintegrasikan komponennya telah mengalami distorsi yang sangat akut dan terkesan retorik. Ini terjadi karena menguatnya hasrat kekuasaan dan ketakutan akan kehilangan tahta, sehingga pengelolaan ideologi 'nasionalisme' mengarah pada dogmatisme, ideologi mengalami kebekuan makna terdalam dan tak memberikan arti lagi bagi proses berbangsa yang penuh dialektika ini. Ini terlihat dari pola-pola manajemen konflik yang justru mematikan potensi emansipatoris melalui pendekatan yang militeristik dan a-demokratis.

APA YANG DIUNGKAPKAN Presiden Megawati dalam mengawali langkahnya untuk mendekonstruksikan bangsa ini di depan DPR dapat dibaca sebagai manifestasi nasionalisme yang inklusif, lugas dan selalu dialogis. Mempertahankan NKRI sebagai jawaban kongkrit dari sederet persoalan yang mengarah pada gerakan pemisahan yang akhir-akhir menunjukkan intensitasnya yang yang meninggi. Apakah nanti Megawati tak terjebak kedalam pola-pola yang digunakan rejim Orde Baru ?

SAMPAI KINI RUANG dialog yang dibuka lebar-lebar pemerintahan Megawati dan ajakan untuk membangun kebersamaan dalam kerangka NKRI serta seperangkat regulasi politik yang telah ditawarkan setidaknya memberikan jaminan bahwa praktek-praktek pengelolaan politik yang dilakukan rejim Orde Baru tak akan terulang lagi. Disamping kontraproduktif, juga membangun integritas wilayah yang demikian justru akan memberangus visi nasionalisme itu sendiri.

MEGAWATI MENYADARI bahwa kekuatan 'nasionalisme' itu mendapat tempat untuk berkembang ketika ideologi itu mampu menjadi parameter dan spirit dari keseluruhan proses sosial yang sedang berlangsung. Bagi Indonesia sekarang, *survive*-nya bangsa ini adalah ketika negara (pemerintah) mampu mengintegrasikan komponen bangsa dan elemen bangsa secara seimbang dan dialogis. Oleh karena itu, Indonesia berarti juga sebuah konstruksi sosial yang selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta percaturan global yang sedang terjadi. Indonesia selalu berproses, Indonesia selalu berdialektika.

SIMPUL-SIMPUL nasionalisme yang terurai kedalam kepentingan primordialisme sempit yang menyebabkan lunturnya spirit berbangsa harus ditangkap sebagai sebuah realitas sosial yang harus dihadapi secara egaliter. Oleh karena itu, seiring dengan upaya untuk *recovery* bangsa, keharusan untuk melakukan dekonstruksi nasionalisme rupanya sedang dilakukan Megawati untuk mengembalikan bangsa ini sebagaimana cita-cita *the founding fathers*, Indonesia yang satu.

Dukungan harus kita berikan kepada kerja pemerintah untuk menyongsong Indonesia Baru. Selamat bekerja ...!

BAGIAN KELIMA
AGENDA MENDESAK

V-01
BISAKAH APBN 2002 PULIHKAN EKONOMI ?

PERMASALAHAN ekonomi makro dalam jangka menengah, setidaknya hingga tahun 2005 akan berkisar pada kemampuan pemerintah baru ini menciptakan kedamaian dan menghindarkan diri dari anarki atau kehidupan dengan hukum rimba.Sudah jelas betapa besar pengaruh kondisi sosial politik terhadap usaha pemulihan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, yang mengalami kesulitan amat berat tentunya rumah tangga pemerintah sendiri, yang tampaknya dalam tahun-tahun mendatang akan dihadapkan pada pergulatan masalah defisit APBN yang mengancam dihadapan kita setiap saat seperti yang pernah terjadi dimedio semester tahun 2001 yang lalu. Revisi APBN yang kontraversial dengan konsekuensi kebijakan pemerintah yang sangat tidak populer hingga menjadi faktor mempercepat kejatuhan Gus Dur saat itu, antara lain berfokus kepada kebijakan menurunkan subsidi BBM dalam bentuk menaikan harga BBM dalam negeri hingga maksimum 30%.

TANPA MENYAMPINGKAN faktor-faktor lain, beban sangat berat dari bagi keuangan pemerintah adalah utang luar negeri. Jumlahnya sudah sedemikian besar sehingga untuk pertama kalinya Indonesia menyatakan tidak mampu membayar cicilan utang pokok sejak tahun 1999. Selain itu, beban tambahan juga akan terus menimpa siapa pun yang

menjabat otoritas moneter dan fiskal, presiden sekalipun. Lebih-lebih manakala utang dalam negeri pemerintah dalam bentuk obligasi rekapitalisasi perbankan juga jatuh tempo.

MAKA, TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI bahwa ketergantungan Indonesia terhadap kebijakan politik ekonomi internasional masih akan sangat besar. Disamping itu laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi sangat lemban untuk tidak dikatakan berhenti. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh elite dan komponen intelektual bangsa harus diajak berdiskusi secara intensif agar mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah hutang negara ini. Mengingat beratnya beban pemerintah dalam mempertahankan keuangannya sendiri. Dan ternyata sangat sulit memberikan jaminan ketika ekonomi dapat tumbuh dengan kegiatan produksi dan distribusi diserahkan kepada pihak swasta. Hal yang hanya memberikan sinyal yang terbentuk dalam mekanisme pasar. Oleh karena itu pula tidak terus terlalu mudah pemerintah melaksanakan pembatasan diri dalam penyediaan infrastruktur ekomoni dan mekanisme dukungan perizinan usaha yang sederhana, tidak berbelit. Maksudnya adalah mungkinkan pemerintah melepaskan burung yang bernama rupiah itu dilangit bebas, namun tidak cukup mampu memberikan arahan yang jelas kemana burung itu harus terbang dilangit. Sementara rupiah masih dihinggapi perasaan was-was akibat fluktuasi nilai dollar terhadapnya.

GARIS KEBIJAKAN yang dilakukan pemerintahan tahun lalu dalam bidang pengelolaan ekonomi makro, sebenarnya sudah benar. Yang kurang benar adalah masih kentalnya mental dan masih berkembangnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), dan makin tidak kredibelnya para anggota kabinet dan birokratnya. Dan dengan bergantinya presiden baru, apakah dapat dijadikan pertanda hilangnya

atau berkurangnya budaya KKN tersebut masih harus diuji oleh waktu. Dengan demikian, pemecahan permasalahan ekonomi makro dalam jangka menengah akan sangat tergantung pada stabilitas sosial dan politik dalam jangka menengah, dan konsep-konsep tentang pemberhentian praktek KKN serta apakah Presiden yang baru kali ini akan mampu mewujudkan kabinet yang kredibel dan berwibawa.

YANG TIDAK KURANG PENTINGNYA adalah, setahap demi setahap aparatur pemerintah dan kalangan elite bangsa lainnya harus membersihkan diri dari mental dan praktik KKN, penegakan hukum yang konsisten, dan melakukan hal-hal normal saja sebagaimana dilakukan oleh negara yang normal. Atau dengan kata lain di Indonesia perlu re-aktualisasi dari konsep "*Nation and Character Building*" yang dicetuskan oleh Bung Karno pada era enampuluhan itu. Pembangunan bangsa yang sejati dapat dipahami, yaitu yang dimulai dengan membangun mentalitas moral bangsa dan dengan secara bersamaan pembangunan ekonomi. Sebuah pembuktian hipotesa atas gagalnya pemerintahan Pak Harto (Orde Baru) atas kuatnya pembangunanisme, ekonomi yes, politik no!. Akibatnya adalah .... KKN terbangun seiring dengan pembangunan secara fisik tanpa roh!.

PERTUMBUHAN PDB. Secara lebih khusus, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 1993, tertinggi yang pernah dicapai Indonesia terjadi pada tahun 1977, yakni mencapai Rp 433,25 trilyun. Selama periode 1997-2000, PDB berubah menjadi Rp 376,37 trilyun tahun 1998 (berkurang 13,13 persen), Rp 379,56 trilyun tahun 1999 (bertambah 0,85 persen), dan Rp 397,67 trilyun pada tahun 2000 ((bertambah 4,77 persen). Relatif rendahnya laju pertumbuhan pada tahun 1999 disebabkan karena pertumbuhan PDB baru terjadi mulai Triwulan II tahun 1999, sedangkan pada Triwulan I/1999 masih menunjukkan

penurunan sebesar 5,92 persen. Tegasnya, laju pertumbuhan PDB selama April-Desember 1999 dan April-Desember 2000 masing-masing adalah 3,31 persen dan 4,95 persen.

DENGAN MENGGUNAKAN hasil sementara Sensus Penduduk tahun 2000 yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk dalam tahun 1990-an rata-rata 1,35 persen per tahun, maka dengan perkembangan PDB seperti itu, PDB per kapita pada tahun 2000 adalah 11,83 persen lebih rendah dibandingkan tahun 1997. Jika sasaran laju pertumbuhan yang digunakan dalam revisi APBN 2001 dan APBN 2002 diasumsikan dapat dicapai, yaitu masing-masing 3,5 persen dan antara 4,5-5,5 persen, maka PDB pada tahun 2002 akan mencapai antara Rp 430,11 trilyun dan Rp 434,22 trilyun. Sebagai konsekuensinya, PDB per kapita pada tahun 2002 akan berada pada angka sekitar 7,16 persen dan 6,27 persen lebih rendah dibandingkan tahun 1997.

SEANDAINYA dikehendaki PDB per kapita pada tahun 2004 antara 2-4 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 1997, serta dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk tetap 1,35 persen per tahun, maka laju pertumbuhan rata-rata PDB selama periode 2003-2004 adalah antara 6,2 persen dan 6,8 persen per tahun. Hal ini menunjukkan, sampai tahun 2004 tingkat kesejahteraan penduduk rata-rata, dihitung dengan menggunakan PDB per kapita atas dasar harga konstan, tidak banyak berbeda dari yang pernah dicapai pada tahun 1997.

LAJU INFLASI. Setelah berhasil menurunkan laju inflasi pada tahun 1999, maka tampaknya tantangan laju inflasi yang meningkat mulai berlangsung sejak tahun 2000. Tegasnya, setelah laju inflasi meningkat dari 10,31 persen

pada tahun 1997 menjadi 77,63 persen dan 2,01 persen pada tahun 1998 dan 1999, maka pada tahun 2000 laju inflasi menjadi 9,35 persen. Gejala mulai meningkatnya laju inflasi terlihat dari laju inflasi tahunan bulan September 2000 sebesar 6,79 persen yang kemudian menjadi 9,35 persen pada Desember 2000. Kemudian juga 10,62 persen pada Maret 2001 dan 12,11 persen bulan Juni 2001.

PENINGKATAN LAJU INFLASI pada tahun 2000 dan 2001 dipengaruhi antara lain karena di satu pihak makin lemahnya nilai tukar rupiah terutama terhadap dollar AS, penyesuaian tarif dan harga barang yang dikendalikan pemerintah, serta adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gaji pegawai negeri di lain pihak. Laju inflasi pada tahun 2000 yang mencapai 9,35 persen, sampai Juni baru mencapai 2,86 persen sehingga inflasi pada Semester II/2000 adalah 6,31 persen. Sedangkan revisi APBN tahun 2001 mengasumsikan laju inflasi tahun 2001 sebesar 9,3 persen. Kenyataannya, inflasi sampai Juni 2001 sudah mencapai 5,46 persen, sehingga untuk meraih sasaran inflasi satu digit, atau setidaknya 9,3 persen sesuai target APBN, tinggal tersisa sedikit ruang gerak. Tegasnya, harus diupayakan laju inflasi dalam paruh kedua tahun ini tidak melebihi 3,64 persen. Tentu hal ini suatu sasaran yang sangat sukar dicapai sehingga inflasi tahun ini diperkirakan akan lebih dari 10 persen atau dua digit.

TRANSAKSI MODAL. Berbeda dengan keadaan sebelum krisis, di mana transaksi modal pada umumnya senantiasa menunjukkan surplus, maka sejak krisis ekonomi berlangsung transaksi modal Indonesia senantiasa menunjukkan defisit, atau kalaupun mengalami surplus jumlahnya relatif kecil dibandingkan surplus sebelum krisis berlangsung. Faktor penyebabnya, terutama terjadi pada transaksi modal swasta. Transaksi modal swasta sejak

Triwulan IV tahun 1997 senantiasa defisit. Jumlah kumulatif surplus dan defisit dalam transaksi modal swasta selama 3,5 tahun sebelum dan sesudah krisis masing-masing adalah 31,74 milyar dollar AS dan 39,31 milyar dollar AS.

SEBAGAI KONSEKUENSI untuk menanggulangi defisit dalam transaksi modal swasta maka posisi jumlah pinjaman luar negeri pemerintah telah bertambah dari 54,04 milyar dollar AS pada bulan Juni 1997, menjadi 55,41 milyar dollar AS pada Juni 1998, dan 74,92 milyar dollar pada Desember 2000. Sedangkan pinjaman luar negeri swasta berubah dari 70,44 milyar dollar pada Juni 1997 menjadi 85,20 milyar dollar pada Juni 1998, dan 66,77 milyar dollar AS pada Desember 2000. Menjadikan total jendral hutang luar negari mencapai 150 Milyar Dollar AS atau Rp. 1500 Trilliun, ditambah hutang dalam negeri atas SBI / BLBI yang telam necpai hampir Rp. 700 Trilliun. Masalah lain juga terjadi pada penanaman modal asing (PMA). Defisit dalam PMA berarti jumlah implementasi PMA lebih kecil dibandingkan dengan repatriasinya kembali ke luar negeri. Diketahui bahwa kumulatif implementasi PMA selama 3,5 tahun sebelum dan sesudah krisis adalah masing-masing 22,53 milyar dollar AS dan 16,64 milyar dollar. Sementara repatriasinya meningkat dari 6,28 milyar dollar menjadi 22,59 milyar dollar. Oleh karena itu sangat perlu dicatat bahwa hampir semua persoalan investasi dan disinvestasi adalah persoalan hutang negara. Maka apabila dijumlah hutang luar negeri (pemerintah dan swasta) .dan dalam negeri telah hampir mencapai AS $140 Millyar dan obligasi dalam negeri sebesar hampir Rp.700 Trilliun atau seluruhnya telah mencapai Rp. 2.200 Trilliun, eqivalen 6 (enam) kali APBN 2001 atau menjadikan beban hutang perkapita rakyat kita sebesar AS $ 1.000 (Seribu dollar AS)

untuk setiap gundul rakyat Indonesia!. Termasuk pembaca tulisan ini.

RAPBN 2002. Sirkulasi pembahasan RAPBN yang berkangsung di Panitia Anggaran DPR-RI layaknya tak akan ada perubahan system dan mekanisme keputusan yang sama sekali tidak ada perubahan yang signifikan. Terutama dalam pengambilan asumsi yang pada tahun ini cenderung tidak memiliki fatsun (keberanian) mengambil sikap yang lebih agresif dalam mematok target kecuali secara konservatif mempertahankan target propenas 4,5 – 5% tanpa melihat realita bahwa pertumbuhan ekonomi 2000 sebesar 4,8%, perkiraan empiris 3,5 pada tahun 2001. Sedangkan asumsi bagi parameter lainnya yang diandalkan sebagai sumbangan terhadap pertumbuhan tersebut bergerak sangat terbatas dan cenderung menurun adalah sektor komnsumsi pemerintah masing-masing pada tahun 2000, 2001 dan proyeksi 2002 adalah 0,5%, 0,3% dan 0,2%. Ekspor Netto 0,1%, - 1,3% dan –1,4%, terdiri dari Ekspor barang dan jasa 3,9%, 2,0% dan 2,3%. Impor barang dan jasa –3,8%, - 3,3 dan – 3,7%. Sedangkan sektor pertumbuhan yang diproyeksikan naik hanya pada Konsumsi rumah tangga 2,6%, 3% dan 3,5%. - dan pembentukan modal tetap bruto 1,6%, 1,5% dan 2,7%. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah faktor-faktor pendukung tersebut diatas untuk memenuhi `target pertumbuhan ekonomi 5% tersebut realistis dan rasional?.

Tingkat infklasi 2001 ; 8 % - diasumsikan akan terjadi penguatan nilai tukar Rupiah pada tahun 2002 menjadi rata-rata Rp. 8.500,- / Dollar AS dari perkiraan empirik pada tahun anggaran 2001 rata-rata sebasar Rp. 9.500 /Dollar AS dengan nilai inflasi sebasar 9,3%. Kemudian berturut-turut dengan meng-asumsikan Harga Ekspor Minyak sebesar 22 Dollar AS / barel, Produksi Minyak menurun menjadi 1,232

Juta Barel per hari dari 1, 320 Juta Barel / Hari di tahun 2001. SBI 3 Bulan tahun 2002 sebesar 14 persen tetap seperti tahun yang lalu 2001.

Yang Menarik adalah, bahwa kenaikan pendapatan negara dan hibah tahun 2002 diproyeksikan hanya naik sebasar Rp. 3 Trilliun atau turun dari 19,5% terhadap PDB 2001 menjadi 17,1% terhadap PDB 2002. Belanja Negara turun dari Rp. 340 Trilliun menjadi Rp. 332 Trilliun. Dana Perimbangan Daerah naik hanya sebasar 10% dari Rp. 81 Trilliun di tahun 2001 menjadi Rp. 90 Trilliun di tahun 2002. Pinjaman Proyek praktis tidak banyak berubah yaitu sebesar Rp. 23 Trilliun ditahun 2001 manjadi Rp. 14 Trilliun di Tahun 2002. Pembayaran cicilan hutang luar negari meningkat dari Rp. 20 Trilliun pada tahun 2001 meningkat lumayan Rp. 24 Trilliun. Bunga pinjaman hutang LN naik Rp. 28 Trilliun turun sedikit menjadi Rp. 27 Trilliun. Sedangkan pembayaran hutang dalam negari turun sedikit dari Rp. 61 Trilliun menjadi Rp.59 Trilliun. Secara ichtisar RAPBN 2002 dapat diuraikan secara global sebagai berikut,

- Pendapatan Negara Total Rp. 289,432 Trilliun
- Belanja Negara Pem. Pusat Rp. 242,124 Trilliun
- Belanja Perimbangan daerah Rp. 90,330 Trilliun
- Defisit Anggaran Rp. 43,032 Trilliun
- Total RAPBN Rp. 332.464 Trilliun

PRAKTIS, secara obyektif RAPBN 2002 yang sedang digodog oleh Panitia Anggaran DPR-RI dengan segala keterbatasan dan kendala ekonomi makronya cenderung pesimistik. Segudang masalah memerlukan curahan perhatian dan konsentrasi penuh dari pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi. Kalau konsentrasi terganggu, energi bangsa ini akan kembali tersedot pada masalah-masalah politik, yang ujung-ujungnya konflik sosial politik dan ***gonti-ganti***

presiden lagi, atau Indonesia akan semakin runyam. Dan bukankah itu merupakan tantangan berat bagi pemerintahan Megawati Soekarnoputri?. Tantangan bagi segenap anak bangsa. Tantangan bagi DPR yang katanya pemegang hak Budget dalam menentukan besaran dan kualitas APBN. Hal yang perlu melakukan introspeksi, dan tidak hanya kesombongan bagi para anggota DPR yang karena kekuasaannya menentukan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.

*) *Disampaikan dalam Seminar Sehari Tentang Hutang LN Ri dan Globalisasi - diselenggarakan oleh STIE Nusantara Jakarta tanggal 10 Oktober 2001.*

V – 02
PERBANKAN NASIONAL MASIH KOMA

MESKIPUN sudah hampir tiga tahun berada dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kondisi perbankan nasional bisa dikatakan masih jauh dari sehat. Dilihat dari beberapa indikator, kondisi saat ini memang lebih baik dibandingkan kondisi waktu mereka *collapse* dulu, tetapi tetap saja masih mengenaskan.

MENGUTIP istilah seorang petinggi Bank Indonesia (BI), ibarat pasien, perbankan nasional sekarang ini belum jadi mayat, tetapi masih terbaring koma di Unit Gawat Darurat (UGD), dan sewaktu-waktu bisa kritis lagi. Sampai saat ini, secara umum perbankan nasional belum bisa melakukan fungsi intermediasinya.

BAHKAN beberapa bank kembali dalam posisi rawan, akibat terus meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) akhir-akhir ini. Meskipun belum sampai mengalami *negative spread* (bunga simpanan lebih tinggi ketimbang bunga pinjaman), terus meningkatnya bunga SBI ini dipastikan akan semakin mengikis *spread margin* antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman.

PADAHAL, untuk restrukturisasi bank-bank yang selama ini menjadi sumber darah bagi perputaran roda perekonomian sekaligus jadi mesin pengeruk uang para konglomerat

bobrok itu, hingga Desember 2000 pemerintah sudah mengeluarkan tak kurang dari Rp 659 trilyun. Jumlah itu sudah termasuk jumlah yang dikeluarkan pemerintah untuk penjaminan (*blanket guarantee*) simpanan pihak ketiga dan kreditor di bank-bank yang bermasalah.

RINCIANNYA, untuk penjaminan pemerintah Rp 218 trilyun, kredit program Rp 10 trilyun, untuk rekapitalisasi bank-bank pemerintah Rp 283 trilyun, rekapitalisasi tujuh bank swasta Rp 33 trilyun, rekapitalisasi bank yang diambil alih oleh pemerintah (*bank taken over*/ BTO) Rp 106 trilyun, rekapitalisasi bank-bank pembangunan daerah (BPD) Rp 1 trilyun serta obligasi untuk bank-bank nonrekap (Bank Mega, Deutsche Bank, dan Bank Buana Indonesia) Rp 9 trilyun.

DALAM RANGKA restrukturisasi, pemerintah juga telah melikuidasi 16 bank pada 1 November 1997. Di luar itu, pemerintah juga membekukan 51 bank, dengan rincian 4 April 1998 sebanyak tujuh bank, 21 Agustus 1998 sebanyak tiga bank, 13 Maret 1999 sebanyak 38 bank, 29 Januari 2000 sebanyak satu bank, dan 20 Oktober 2000 sebanyak dua bank lagi.

PEMERINTAH juga mengambil alih 13 bank, meliputi tiga bank pada 14 Februari 1998, satu bank pada 28 Mei 1998, tujuh bank pada 13 Maret 1999, satu bank pada 21 April 1999, dan satu bank pada 23 Juli. Selanjutnya, pada 21 April 1999, pemerintah merekapitalisasi tujuh bank. Pada saat yang sama, pemerintah juga terus mendorong bank-bank untuk melakukan merger untuk membentuk bank-bank yang lebih kuat.

SALAH SATU konsekuensi dari ongkos mahal yang harus dibayar bangsa akibat tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bank di masa lalu itu adalah menggelembungnya utang pemerintah.
Utang pemerintah yang sebelum krisis hanya 55 milyar dollar AS (berupa utang luar negeri), kini membengkak menjadi 77 milyar dollar AS (utang luar negeri) ditambah Rp 659 trilyun (utang dalam negeri, terutama dalam bentuk obligasi rekapitalisasi) dalam waktu tidak sampai empat tahun terakhir.

Ini menyebabkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai di atas 100 persen pada akhir 2000. Utang sebesar itu menyebabkan dalam 10-25 tahun ke depan, kondisi perekonomian diperkirakan akan terus mengalami tekanan dan ancaman destabilisasi, terutama jika pemerintah tak mampu mengelola utang publiknya secara baik.

UNTUK BUNGA obligasi rekapitalisasi saja, pemerintah harus mengeluarkan sekitar empat persen dari PDB pada tahun 2000 lalu dan 2001 ini. Dari simulasi Bank Indonesia, kewajiban obligasi rekapitalisasi yang jatuh tempo tahun 2001 sekitar Rp 12,9 trilyun.

JUMLAH ini akan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp 73,98 trilyun tahun 2007 dan Rp 138 trilyun tahun 2018. Biaya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti juga menjadi beban rakyat pembayar pajak.

BEBAN BUNGA obligasi ini akan semakin menjadi-jadi dengan kecenderungan terus naiknya suku bunga beberapa bulan terakhir. Berdasarkan hasil lelang pekan ini, suku

bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jangka waktu satu bulan sudah mencapai 17,17 persen, naik dari sekitar 10 persen pada semester I 2000 lalu.

SETIAP KENAIKAN suku bunga sebesar satu persen, akan menyebabkan biaya bunga obligasi yang harus dibayar pemerintah naik Rp 2,2 trilyun.

OBLIGASI PEMERINTAH Rp 659 trilyun yang akan jatuh tempo mulai 2001-2018 itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yakni, obligasi dengan suku bunga tetap (*fixed rate bonds*), obligasi dengan bunga variabel (*variable rate bonds*), obligasi dengan bunga terindeks (*indexed rate bonds*). Berbeda dengan obligasi *fixed rate*, kedua jenis obligasi terakhir bunganya dipengaruhi juga oleh pergerakan suku bunga (SBI), inflasi, dan nilai tukar rupiah.

OBLIGASI *FIXED RATE* sendiri dibagi menjadi dua, yakni obligasi dengan suku bunga 12 persen dan masa jatuh tempo lima tahun, serta obligasi dengan suku bunga 14 persen dan masa jatuh tempo 10 tahun. Bunga ini dibebankan pada APBN dan harus dibayarkan setiap enam bulan.

SETIMPALKAH biaya ratusan trilyun rupiah yang sudah dikeluarkan tersebut dengan hasil yang sudah dicapai sejauh ini? Injeksi dana ratusan trilyun rupiah itu tampaknya belum bisa menjadi obat mujarab yang langsung menyembuhkan berbagai penyakit kronis yang dihadapi perbankan nasional selama ini. Meskipun demikian, setidaknya tanda-tanda membaiknya kondisi perbankan nasional, mulai terlihat.

LANGKAH penutupan atau pembekuan dan merger sejumlah bank yang ditempuh dalam tiga tahun terakhir, membuat perbankan nasional lebih terkonsolidasi, dengan jumlah bank menciut drastis dari 237 bank pada akhir Juni 1997 menjadi 151 bank pada akhir Desember 2000. Jumlah bank swasta menciut dari 160 bank menjadi hanya 81 bank. **UNTUK BANK PEMERINTAH**, jumlahnya berkurang dari tujuh bank menjadi lima bank. Jumlah bank asing dan bank campuran berkurang dari 43 bank menjadi 39 bank. Sedangkan bank-bank pembangunan daerah (BPD) turun dari 27 bank menjadi 26 bank.

SEBAGAI AKIBAT dari langkah restrukturisasi yang sudah ditempuh pemerintah, kondisi perbankan juga lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Ini antara lain tercermin dari semakin jarangnya terdengar isu likuidasi, di luar rencana akuisisi Bank Internasional Indonesia (BII) yang terancam kesulitan keuangan besar oleh Bank Mandiri baru-baru ini.

DARI SISI RASIO. kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/ CAR), jika sebelumnya ada bank yang memiliki CAR negatif hingga ratusan persen, akibat rekapitalisasi kini semua bank memiliki rasio kecukupan modal tertimbang menurut risiko (*risk-weighted capital adequacy ratio*) di atas empat persen.

Dari hasil *stress test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia, jumlah bank yang diperkirakan akan kesulitan untuk memenuhi ketentuan CAR minimum delapan persen pada akhir 2001 juga berkurang dari 12 bank menjadi tinggal hanya enam bank. Keenam bank ini pun menurut Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution, pangsa pasar (*market share*)-nya kecil. Dari enam bank itu, lima di antaranya juga sudah ada di BPPN.

SEMENTARA, rasio kredit bermasalah (*nonperforming loans*/ NPL) terhadap total kredit perbankan nasional juga menurun tajam dari 48,6 persen tahun 1998 menjadi 18,8 persen tahun 2000, meskipun harus diingat bahwa menurunnya NPL ini lebih banyak karena NPL tersebut ditransfer ke BPPN.

NPL DI PERBANKAN nasional ini terutama terkonsentrasi di bank-bank BUMN, karena selama ini bank-bank BUMN itu yang menjadi sumber kredit program yang kemudian macet. Sejumlah 50 obligor terbesar di BPPN, juga merupakan nasabah bank-bank BUMN ini.

MULAI STABILNYA perbankan juga ditunjukkan oleh mulai kembalinya bank-bank melakukan perekrutan karyawan baru, meskipun ini lebih banyak dilakukan oleh bank-bank asing. Bank-bank nasional yang semula hanya menggunakan orang asing sebagai konsultan, belakangan juga banyak memasukkan orang asing ke dalam jajaran manajemen dan komisarisnya, meskipun ini lebih dalam rangka perbaikan internal..

SELAIN ITU, semakin stabilnya perbankan juga ditunjukkan oleh mulai meningkatnya pertumbuhan kredit, meskipun masih sangat lambat. Pertanyaannya, akankah kecenderungan mulai stabilnya perbankan ini akan berkesinambungan, sehingga keyakinan salah satu pimpinan BI bahwa perbankan nasional akan jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya akibat program restrukturisasi, benar-benar menjadi kenyataan?

HARUS diakui bahwa proses restrukturisasi perbankan bukan merupakan suatu proses yang berdiri sendiri karena dipengaruhi pula oleh kondisi makro ekonomi secara keseluruhan dan faktor-faktor lain (non-ekonomi). Sejumlah

langkah telah ditempuh oleh pemerintah untuk menurunkan NPL. Termasuk di antaranya dengan mengalihkan NPL ke BPPN, merestrukturisasi NPL, menjual NPL (*debt sale*) dan menghapusbukukan (*write-off*) NPL dari bank.

NAMUN, adanya faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi politik yang tidak stabil yang membuat suku bunga SBI tidak kunjung bisa ditekan, kurs rupiah terus terdepresiasi, inflasi tinggi, dan pertumbuhan ekonomi mandek, juga bisa kembali mengancam perbankan.

SEMUA FAKTOR-FAKTOR tersebut, ditambah lambannya restrukturisasi utang dunia usaha, akan menggerogoti basis permodalan bank dan mengancam status aset-aset yang sudah direstrukturisasi, karena aset-aset yang tidak lagi bermasalah bisa kembali bermasalah.

HAL INILAH yang menjadikan target CAR minimum delapan persen dan target indikatif penurunan NPL perbankan nasional menjadi maksimal lima persen pada akhir 2001 sebagaimana ditetapkan BI, menjadi sulit dicapai. Kerugian langsung yang diakibatkan oleh NPL pada bank adalah, bank-bank perlu menyediakan cadangan kerugian sampai mereka bisa merestrukturisasi atau menghapusbukukan NPL tersebut dari neraca keuangannya.

SELAIN ITU, NPL juga menyebabkan biaya bunga yang harus dibayar perbankan menjadi meningkat dan memungkinkan kembali terjadinya *negative interest rate spread/negative interest margin* (NIM) seperti yang melanda sebagian besar bank sebelum rekapitalisasi.

ITU BARU SALAH satu masalah struktural yang dihadapi perbankan. Masalah struktural lainnya adalah adanya

aturan prudensial perbankan yang membolehkan pajak terutang (*deferred tax*) dimasukkan dalam perhitungan modal suatu bank. Aturan ini menyebabkan aset berupa pajak terutang dalam jumlah besar yang ada di sejumlah bank swasta juga harus dihapusbukukan dari neraca keuangan bank-bank tersebut. Akibatnya, ada kemungkinan CAR bank-bank yang ada sekarang ini bisa turun lagi.

DI LUAR ITU, meningkatnya persaingan dengan bank-bank asing dan keberadaan obligasi pemerintah diperkirakan juga akan semakin menggerogoti margin laba bank-bank tersebut. Padahal, dari data perbankan yang ada di Bank Indonesia, komposisi aktiva produktif perbankan saat ini masih didominasi oleh surat berharga atau obligasi pemerintah (yakni 44,5 persen).

INI MENYEBABKAN pendapatan bunga perbankan secara keseluruhan sangat tergantung pada bunga surat berharga, terutama obligasi pemerintah (41,3 persen), di samping SBI (10,6 persen) dan kredit (32,6 persen).

UNTUK KELOMPOK bank eks BTO, ketergantungan pendapatan bunga pada surat berharga (terutama obligasi pemerintah) bahkan mencapai 69,8 persen dan untuk bank-bank BUMN 58 persen. Angka ini menempatkan kedua kelompok bank dalam posisi sangat rentan, karena kondisi likuiditasnya bisa terancam jika sampai terjadi penundaan terhadap pembayaran bunga obligasi oleh pemerintah.

DAN KALAU INI TERJADI, perbankan nasional secara keseluruhan juga akan sangat kritis, sebab bank BUMN dan eks BTO menguasai 67 persen dari aset perbankan nasional. Ketergantungan pendapatan bunga pada obligasi perbankan

ini juga menyebabkan NIM perbankan yang mencapai titik terendah pada periode Desember 1998, mulai meningkat sejak Juni 2000.

UNTUK MENGATASI tali-temali berbagai persoalan yang dihadapi perbankan serta ancaman kesinambungan fiskal yang diakibatkannya inilah, perlu ditempuh sejumlah langkah. Termasuk dalam langkah-langkah ini adalah percepatan restrukturisasi aset dan penjualan aset-aset yang ada di BPPN, privatisasi atau divestasi kepemilikan saham pemerintah di bank-bank yang telah direstrukturisasi, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

SELAIN ITU, dari pihak bank-bank itu sendiri harus ada upaya perbaikan dinamisme internal, *outlook*, dan manajemennya. Langkah yang juga sangat penting adalah mengembangkan pasar sekunder untuk obligasi pemerintah secara bertahap. Pasar obligasi di Indonesia saat ini masih sangat tipis dan belum ramai sehingga obligasi belum bisa menjadi instrumen yang likuid. Hingga akhir Desember 2000, volume transaksi baru Rp 27,905 milyar.

V - 03
HIBAH UNTUK PEJABAT, SUATU TINJAUAN SOSIAL POLITIK

MAINSTREAM ISSUE yang dibawa kalangan prodemokrasi ketika membawa panji-panji reformasi adalah persoalan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Hingga proses *interplay* yang bermuara pada lengsernya kekuasaan orde baru, persoalan tersebut hingga kini masih menjadi bagian dari persoalan bangsa. Era reformasi yang mengusung *clean goverment and good governance*, dengan demikian bermakna sebagai *counter spirit* terhadap orde baru yang dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara didominasi oleh mentalitas KKN.

KINI, setelah era reformasi bergulir sekian lama, bangsa Indonesia pun seakan tak pernah beranjak dari tempat semula. Spirit *clean government and good governance* dalam banyak hal masih jauh dari memadai, dan terkesan hanya sebagai komoditi politik yang penuh retorika. Dalam situasi euphoria politik dimana sistem general tak banyak berfungsi, ketakutan banyak kalangan kehilangan asset kehidupan yang dikuasainya serta berubahnya struktur penyelenggara negara, maka praktek-praktek orde baru pun kini masih terus merajalela. Bahkan ditengarai dalam kondisi sekarang ini terjadi perebutan asset-asset negara secara besar-besaran melalui berbagai upaya politik konspirasi dengan kekuasaan.

KETERKAITAN LANGSUNG dengan persoalan diatas adalah pejabat negara. Mengapa? Karena posisinya yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan atas berbagai keputusan politik dan kebijakan publik yang ada. Produk yang dihasilkan merupakan agregasi kepentingan publik yang tertuang dalam berbagai regulasi, baik itu menyangkut aspek ekonomi, sosial maupun politik. Akibat posisinya tersebut, pejabat negara sangatlah rentan akan berbagai praktek kotor dan tidak *fair* melalui praktek persekongkolan dengan komponen masyarakat yang terkait langsung dengan kebijakan penyelenggara negara tersebut.

SALAH SATU PERSOALAN yang kini sedang menjadi pembicaraan publik adalah persoalan hibah. Hibah sebagai bentuk pemberian sukarela dalam konteks perkembangan masyarakat kontemporer akan memperoleh pengertian baru ketika pemberian tersebut harus diberikan kepada pejabat negara. Dalam konteks *clean government and good governance*, bagaimakah kita memandang persoalan ini?

TULISAN INI INGIN membatasi diri pada persoalan hibah kepada pejabat negara dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan publik, terutama yang terkait dengan proses, produk serta implikasi sosial yang mungkin dapat ditimbulkan.

HIBAH, SUATU TINJAUAN SOSIO-HISTORIES. Menengok ke belakang, kita akan mendapati sejarah bangsa Indonesia yang didominasi oleh relasi-relasi sosial yang tak tertulis sebagai sebuah kelaziman. Kontrak sosial yang tak tertulis tersebut anehnya terlembagakan oleh sebuah konvensi bangsa menjadi sebuah budaya yang disepakati sebagai keluhuran bangsa. Salah satu diantaranya adalah membangun relasi sosial atas dasar saling pengertian yang

di*embel-embeli* dengan pemberian sesuatu sebagai bagian dari jaminan saling pengertian tersebut. Dalam konteks tersebut , sepanjang hal tersebut tak mengganggu kepentingan publik kita harus memberikan 'permakluman', karena memang itu bagian dari upaya membangun relasi sosial. Namun ketika, hal tersebut bersinggungan dengan kepentingan publik dan membawa implikasi luas, sepatutnya hal tersebut harus dicarikan padanan aturan yang memungkinkan sebuah bangunan relasi itu tetap dalam koridor *fairplay*. Ketika perkembangan masyarakat semakin rasional yang ditandai dengan terbentuknya sebuah organisasi modern yang bernama "negara", sebagai tempat pengelola dan pengatur relasi sosial, kita mendapati seluruh proses sosial yang terjadi berada dalam jangkauan negara. Pejabat negara, itulah instrumen negara yang menjadi tulang pungung keberlangsungan relasi sosial dalam masyarakat modern.

DALAM MASYARAKAT modern, logika relasi sosial pun telah berganti dari *altruisme* (membangun relasi tanpa pamrih) menjadi *pro sosial* (membangun relasi dengan pamrih memperoleh pengakuan sosial). Oleh karena itu, ketika pengelolaan masyarakat diserahkan kepada pejabat negara, maka dapat dipastikan terjadi gerakan *sentripetal* sosial mengarah ke pejabat negara. Karena kebutuhan untuk mempertahankan relasi sosial dan survival tersebut, maka upaya membangun kontrak sosial yang terjadi seringkali karena 'saling pengertian' antara pejabat negara dengan komponen masyarakat yang berkepentingan dengan produk politik dari pejabat negara tersebut. Saling pengertian dalam konteks ini adalah upaya memberikan sesuatu dengan sukarela kepada pejabat negara. Atau dengan kata lain "***hibah***".

MENGAPA HARUS KEPADA PEJABAT NEGARA ? Hibah sebagai upaya untuk membangun relasi sosial kemudian menimbulkan persoalan ketika pemberian tersebut harus diberikan kepada pejabat negara. Pejabat negara adalah sosok yang ekslusif. Eksklusivitas ini terjadi karena *(1)* secara ekonomi, pejabat negara lebih tidak membutuhkan dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Ini bertentangan dengan kelaziman substansi pemberian yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan; *(2)* pejabat negara adalah produsen kebijakan publik. Keberadaannya tersebut mengharuskan adanya posisi yang independen (berpihak kepada masyarakat umum/publik), obyektif serta antisipatif terhadap perkembangan sosial; *(3)* pejabat negara adalah agen sosial. Sebagai agen sosial, pejabat negara juga turut bertanggungjawab terhadap perkembangan sosial politik yang terjadi, termasuk didalamnya pembentukan karakter, mentalitas serta kepribadian dalam pembangunan relasi sosial.

MERUJUK PADA PEMAHAMAN tersebut di atas, apabila hibah diberikan kepada pejabat negara, sedangkan struktur masyarakat yang ada didominasi oleh perilaku *prososial.* Maka dapat dipastikan terjadi sebuah 'saling pengertian' yang didasarkan pada pemberian tersebut. Konspirasi tak akan terhindarkan lagi. Apalagi ini ditegaskan dengan mentalitas bangsa ini yang selama berpuluh-puluh tahun berada pada kungkungan masyarakat dengan mental korup. Dan kenyataannya, sampai sekarang mentalitas korup tersebut telah mendarah daging dalam segenap kesadaran sosial bangsa ini.

IMPLIKASI SOSIAL POLITIK. Mencermati fenomena mutakhir yang sedang terjadi, dimana banyak pejabat negara

menerima hibah. Maka jika hipotesis diatas dijadikan rujukan, realitas tersebut akan menimbulkan berbagai ekses-ekses sosial politik yang tak ringan. Implikasi-implikasi tersebut antara lain :

a) upaya menciptakan *clean government and good governance* akan mengalami hambatan yang serius;
b) produk kebijakan publik yang ada cenderung lebih menguntungkan sekelompok masyarakat/golongan dari pada berorientasi pada kepentingan publik;
c) mentalitas dan perilaku 'jalan pintas' dengan cara berkongsi dengan pejabat negara semakin subur, dan ini akan menggerogoti stamina berbangsa ditengah kuatnya arus kompetisi global;
d) upaya memberantas KKN sebagai amanat reformasi akan mengalami kemandekan, karena secara tak langsung praktek hibah kepada pejabat negara juga sebagian dari praktek-praktek kolusi;
e) akan menimbulkan kecemburuan sosial yang tinggi yang dapat berakibat terjadinya chaos sosial;
f) pemulihan ekonomi akan tersendat-sendat karena tak ada kemauan untuk bersikap *fairplay*;
g) upaya menarik investor akan sulit, karena tak adanya seperangkat kebijakan dan regulasi yang memungkinkan bagi terciptanya sebuah situasi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian global.

Mengingat pentingnya untuk menyelesaikan agenda reformasi dengan menciptakan *clean government and good governance*, maka persoalan hibah harus dijadikan sebagai issue politik yang terkait dengan KKN. Disamping itu, regulasi politik dan hukum yang mampu meng-*cover* persoalan hibah harus segera dibentuk dan implementasinya harus disertai dengan political will pemerintah maupun

komponen masyarakat lainnya. Itulah sedikit pokok-pokok pikiran yang berhubungan dengan persoalan hibah sebagai concern saya selaku anak bangsa. Semoga dapat bermanfaat.

*) *Disampaikan pada Diskusi Terbuka "Hibah Untuk Pejabat Diselenggarakan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jakarta, 3 September 2001*

V – 04
MEMORANDUM
TANTANG UU APBN 2002

UNDANG-UNDANG TENTANG APBN adalah undang-undang *lex spesialis* yang langsung diamanatkan oleh pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Yaitu walaupun memiliki jangka waktu masa berlakunya yang hanya selama satu tahun anggaran namun memiliki nilai-nilai yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup suatu negara dan sebagai pencerminan dari itikad dan semangat penyelenggara negara antara lain, **Pertama** bahwa, APBN adalah merupakan kebijaksanaan fiskal yang harus harus merespons persoalan materiil dalam kerangka mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945; **Kedua,** bahwa kebijaksanaan pemerintahan yang tertuang dalam APBN adalah merupakan langkah konkrit bagi kewajibannya memenuhi hak-hak materiil atau hak-hak sosial warga negara sebagaimana tercantum dalam haluan negara (UUD 1945), yaitu hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2); hak memperoleh pengajaran (pasal 31 ayat 1); hak memperoleh kemakmuran dari bumi dan air serta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (pasal 33 ayat 3); serta hak fakir miskin dan anak terlantar memperoleh tanggungan negara (pasal 34).

SETELAH MELALUI PENCERMATAN dan proses pemahaman serta melalui perdebatan yang alot dan

memakan waktu, tenaga dan pikiran Panitia Anggaran sebagai representasi dari hak dan tugasnya sebagai pemegang hak budget Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mendapatkan keputusan yang cukup demokratis menyetujui asumsi-asumsi dan implementasinya dalam mengisi struktur APBN 2002 yaitu,

- Pertumbuhan ekonomi 4%, turun dari yang diusulkan Pemerintah yakni 5%.
- Kurs Rp. 9.000,- per-US$, naik dari yang diusulkan Pemerintah yakni Rp. 8.500 per-US$
- Suku Bunga SBI 14% tetap.
- Inflasi 9%, naik dari yang diusulkan Pemerintah, yakni 8%.
- Harga Dasar Minyak 22 US$ per-barrel, tetap.

Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima asumsi-asumsi demikian, sebab cenderung lebih realistis mengingat perkembangan yang ada seperti kondisi ekonomi Indonesia kondisi sosial, politik dan keamanan, serta perkembangai ekonomi dunia.

BERDASARKAN EVALUASI bahwa selama semester I tahun 2001 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat, terutama yang bersumber dari depresiasi rupiah yang berlebihan, laju inflasi yang cukup tinggi, naiknya suku bunga SBI, serta tingginya resiko ketidakpastian yang berasal dari situasi politik dan keamanan dalam negeri. Begitu juga perkembangan perekonomian global dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari yang diperkirakan semula, khususnya akibat dari tragedi WTC di AS tanggal 11 September 2001 yang lalu turut memberikan tekanan yang kurang menguntungkan bagi perekonomian nasional. Maka meskipun tekanan demikian dirasakan kurang menguntungkan saat ini, pada tahun 2002 diharapkan

pertumbuhan ekonomi nasional dan global akan terkoreksi meski belum dapat disebut mulai pulih. Pertumbuhan ekonomi dunia yang terus merosot diharapkan meningkat, sebagaimana yang diperkirakan berbagai pengamat seperti *World Economic Outlook* dalam terbitannya bulai Mei 2001 bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan naik 0,7% pada tahun 2002 yakni dari 3,2% menjadi 3,9%, harapan ini semakin bertambah mengingat adanya kecenderungan yang positif tentang semakin terjaminnya keamanan dan stabilitas sosial politik dalam negeri. Dan tentu hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi masyarakat serta mendorong meningkatnya investasi luar negeri ke Indonesia. Baik itu investasi asing langsung *(Foregn Direct Investment)* maupun investasi tidak langsung *(Potopolio investment).* Hal ini selanjutnya akan memberikan konstribusi positip bagi peningkatan kinerja ekonomi Indonesia. Itulah gambaran umum perekonomian nasional.

SEBUAH PRESTASI POLITIK yang merupakan produk dari proses pembahasan RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah melalui pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2002 II oleh Ibu Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 9 September 2001 yang lalu antara lain, bahwa pembahasan RAPBN 2002, pendapatan negara yang semula direncanakan sebesar Rp 289,4 triliun, berubah naik Rp. 12,4 Trilliun menjadi Rp.301,8 triliun atau Rp.25,8 triliun 12 % kebih tinggi dari APBN Penyesuaian tahun 2001, sebesar Rp.286,0 triliun. Oleh karena sebagaimana lazimnya dalam penetapan APBN yang didahului oleh menetapan asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai parameter yang merupakan variabel determinan dari penyusunan dan pengisian format APBN hingga lebih detail program dan proyek maka hal tersebut sudah barang tentu mengandung konsekuensi-konsekuensi, tanggung

jawab administrasi, yuridis, konstitusi dan moral bagi semua komponen penyelenggara negara yaitu,

1. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif harus senantiasa menunjukan kesungguhan dan upaya konkrit dalam rangka melaksanakan UU APBN 2002 yang *nota bene* amanat rakyat dalam rangka menciptakan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa dan menciptakan keamanan, dan serta kondisivitas bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
2. DPR sebagai lembaga legeslatif hendaknya secara konsisten atas fungsinya bukan saja sebagai pemegang hak budget tetapi juga sebagai lembaga pengawas pelaksanaan UU APBN yang secara efektif melakukan upaya-upaya konkrit dalam keikut sertaannya menciptakan *good governance and clean goverment.*
3. Kehakiman, kejaksaan, lembaga yudikatif lainnya dar lembaga-lembaga pengawasan lainnya hendaknya juga dapat meningkatkan fungsi kontrol dan penegakan ketertiban administrasi, hukum dan keadilan sebagaimana seharusnya, khususnya dalam konteks pelaksanaan APBN 2002 tersebut.

Bahwa tanpa adanya kerjasama dan penegakan fungsi serta peran yang efektif bagi masing-masing komponen penyelenggaraan negara, maka segala keputusan yang bersumber dari amanat rakyat melalui APBN 2002 tersebut tak akan bisa menghasilkan yang optimal. Apalagi dalam APBN 2002, dapat juga ditengarai adanya hal-hal yang spesifik, hal mana diperlukan perhatian-perhatian khusus sehubungan dengan penetapan asumsi, target pencapaian serta faktor-faktor kunci dari suksesnya APBN 2002 antara yaitu,

1. Ketergantungan dari kinerja yang berdasarkan kualitas kerjasama bagi pelaku-pelaku ekonomi nasional, khususnya Departemen/Lembaga, BUMN/D, dan juga pihak swasta nasional dalam perbaikan dan perbaikan sistem manajemen, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang optimal guna meningkatkan kinerja instansi masing-masing agar setiap rupiah yang menjadi penerimaan negara di setorkan ke Kas Negara, mencegah kebocoran uang negara serta menghapus timbulnya kembali dana non-budgeter.
2. Ketergantungan dari kinerja pemerintah dalam menyelenggaraan perpajakan nasional yang diamanatkan oleh APBN 2002. Dimana sumber penerimaan pajak dalam negeri ditargetkan sebesar Rp. 207,0 triliun atau meningkat sebesar Rp. 32,8 triliun dari tahun 2001. Faktor yang signifikan dari sektor penerimaan pajak sebesar 12,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih kurang 70% dari total pendapatan negara. Dan hendaknya dalam mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak dalam negeri tersebut dilaksanakan dengan cara yang sejauh mungkin mengindari bertambahnya beban ekonomi rakyat.
3. Ketergantungan dari efektifitas terhadap sasaran pembeayaan negara yaitu bahwa agar setiap rupiyah yang dikeluarkan sebagai beaya oleh APBN harus dan sejauh mungkin menyentuh langsung kepada kepentingan dan sekaligus dapat dinikmati oleh rakyat.
4. Ketergantungan dari kualitas koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan serta efektifitas daripada pembeayaan APBN terutama dalam rangka amanat UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena pada hakekatnya komponen dana perimbangan yang terdapat pada APBN disadari tidak mungkin memenuhi sepenuhnya kebutuhan

pembangunan daerah. Namun hendaknya latar belakang dari sasaran yang hendak dicapai adalah merupakan besaran stimulan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam APBN 2002 Dana Perimbangan daerah ditetapkan naik sebesar 8,6 triliun dari Rp. 60.516,7 triliun dengan ketentuan bahwa totalitas kontribusi dana perimbangan bagi setiap daerah tidak kurang dari dana total yang diterima pada APBN 2001.

5. Ketergantungan dari terpenuhinya agenda pembayaran bunga hutang yang dialokasikan sebesar Rp. 88,7 triliun digunakan untuk pembayaran hutang dalam negeri yang berasal dari bunga obligasi rekapitalisasi perbankan sebesar Rp. 59,7 triliun dan pembayaran pinjaman luar negeri Rp. 28,9 triliun. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat agar Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban belanja negara dengan cara bank tetap diberikan kesempatan membeli aset lancar yang berasal dari kredit macet dalam pengelolaan BPPN *(asset to bond swap)*. Untuk mengurangi pembayaran beban hutang luar negeri, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah agar lebih aktif dalam pertemuan dengan negara donor untuk dapat melakukan penangguhan pokok pinjaman luar negeri. Obligasi yang sudah diterbitkan Pemerintah sebesar Rp 657,5 triliun dan pengurangan dengan mempercepat restrukturisasi aset yang berada dalam pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
6. Ketergantungan dari suksesnya penyelenggaraan subsidi dan sosialisasinya dimana dalam APBN 2002, penyediaan dana subsidi BBM dan Non BBM tahun 2002 yang dialokasikan sebesar Rp 47,2 triliun berkurang Rp 19,0 triliun dibanding tahun 2001. Pengurangan dana subsidi tersebut sebagai akibat pengurangan subsidi BBM yang direncanakan secara bertahap pada tahun 2002. Subsidi

lainnya berupa subsidi listrik, subsidi kredit program dan subsidi pangan yang dialokasikan sebesar Rp. 14,2 miliar, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat agar pelaksanaannya betul-betul diberikan kepada orang yang berhak. Subsidi tersebut masih tetap dialokasikan untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang sangat membutuhkan. Khusus terhadap subsidi pangan agar pelaksanaannya diberikan dalam bentuk uang, sehingga dapat mencegah penyelewengan penyalurannya.

7. Ketergantungan dari efektifitas dan efisiensi dari penyelenggaraan anggaran beaya disektor rutin dan Pembangunan. Anggaran Belanja Rutin disediakan untuk keperluan belanja pegawai sebesar lebih kurang Rp. 40,7 triliun, dan belanja barang sebesar lebih kurang Rp. 11,6 triliun sedangkan pengeluaran pembangunan disediakan sebesar lebih kurang Rp 48,5 triliun.

Jakarta, 24 Oktober 2001

*) Bahan penyampaian pendapat akhir FPDI Perjuangan dalam rangka pengesahan UU APBN 2002

BAGIAN KEENAM
POLITIK LUAR NEGARI MEGAWATI

VI - 01
LANGKAH POLITIK LUAR NEGERI MEGAWATI

TERJADWAL. Kunjungan Presiden Megawati ke AS pada bulan September merupakan serangkaian rencana kunjungan yang telah disusun lama. Lawatan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB, bersamaan juga mengadakan sidang mengenai anak-anak (UNGASS : UN General Assembly Special Session) dan Washington DC bertemu Presiden George W. Bush. Dan diteruskan kunjungan ke beberapa negara lainnya. Namun BAHWA kenyataan politik terakhir di AS terjadi serangkaian aksi teror di Pentagon dan WTC sebelumnya, telah membuat berbagai pandangan dan kecurigaan adalah makfum adanya. Ada yang mengkhawatirkan ditanah air bahwa kunjungan tersebut akan dijadikan bagian dari legitimasi AS dalam rencana menyerang kaum muslim, hal yang wajar pula karena ***Pertama***, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sehingga sangat potensial untuk dijadikan sarana legitimasi politik pemerintah Bush; ***Kedua***, jaringan Islam garis keras (fundamentalis) di Indonesia secara politik diperhitungkan kuat dan dapat mempengaruhi proses pengambilan politik.

BEBAN MORAL IDEOLOGI MEGA. Meskipun terjadi pendangan yang cukup tajam kearah itu di tanah air, Presiden Megawati dengan kafilahnya jalan, yaitu tetap memutuskan untuk tidak membatalkan rencana lawatan itu

Tentu yang terjadi di tanah air adalah munculnya pertanyaan untuk tidak diakatakan persoalan klasik timbul kemudian yaitu tentang efektifitas lawatan Presiden Megawati bagi pemulihan krisis di Indonesia. Disamping tentang orientasi politik luar negeri Indonesia ditengah resiko dampak politik dan ekonomi global yang kini tengah terjadi secara signifikan mengalami pergeseran kondisi Indonesia yang sedang krisis. Bagaimana pula prospek kepemimpinannya ditengah himpitan berbagai kepentingan mikro, makro dan global yang saling bertentangan yang amat rumit itu. Yang jelas misi ideologi anti imperialisme dan kapitalisme masih sangat kuat melekat dan senafas dan denyut jantung Mega. Misi Ideologi yang merupakan beban berat moral Mega yang Soekarnoputri itu.? Presiden Megawati Soekarnoputri memiliki kesempatan momentum yang sama dimana oleh Bung Karno, ayahnya sukses berpidato di depan PBB hampir empat puluh tahun yang lalu berjudul "To Build of Word New" (Membangun Dunia Baru) yang terkenal dan kemudian menyusul gagasan-gagasan tentang ajakan terbentuknya Nefos (The New Emerging Forces), bersatunya negara-negara ketiga dalam membangu kekuatan baru melawan Imperialisme dan Kapitalisme Dunia. Menentung dunia politik belahan timur dan barat.

DITAMAN SARINYA INTERNASIONALISME . Sebenarnya makna kunjungan internasional bagi pemimpin negara dimanapun didunia itu merupakan hal yang wajar. Negara dalam percaturan politik internasional tidak bisa dipisahkan apalagi dalam arus globalisme. Bung Karno secara tegas menyatakan (tahun 1932) bahwa Nasionalisme Indonesia adalah Nasionalisme yang tertanam dan Hidup ditaman sarinya Internasionalisme. Karena menyelenggarakan negara adalah politik luar negeri, maka sikap politikpun haruslah jelas, tegas dan gamblang. Politik Luar Negeri Indonesia

adalah bebas aktif. Dalam Pembukaan UUD 1945 juga telah jelas tentang kewajiban bangsa ini menjalankan peran (ikut) menciptakan perdaian dunia. Sebagai sebuah negara besar di sebuah kawasan strategis dunia, pemimpin Indonesia memang diwajibkan memiliki "visi dunia" dan peran dalam rangka mewujudkan tata dunia yang damai. Visi dunia yang diimplemantasikan dalam berbagai ekspresi kepedulian terhadap masalah-masalah INternasional dapat diartikan sebagai suatu politik luar negeri. Sehingga memang manjadi sangat aneh ketika Amien Rais dan banyak pengamat politik yang selalu bersikap dingin, sinis dan skeptis terhadap setiap misi lawatan Presidennya ke luar negeri.

LAHIRNYA KONFERENSI ASIA AFRIKA Sejarah mencatat bahwa Soekarno dan Hatta merupakan dua figur yang telah berhasil meletakkan kerangka dasar politik luar negeri yang bebas aktif. Visi dunia Bung Karno dimanifestasikan melalui kiprah Indonesia dalam memelopori lahirnya Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, tahun 1955, yang dilanjutkan dengan Gerakan Non-Blok. Semuanya terjadi oleh kejuangan internasional melalui berbagai lawatan ke luar negeri memanfaatkan momentum jabatannya sebagai kepala negara.. Kunjungan Bung Karno cukup berhasil dalam rentang waktu sekitar 20 tahun. Keberadaan Indonesia di mata dunia internasional benar-benar diperhitungkan, meski tidak terkait secara langsung atas kondisi ekonomi Indonesia yang tidak begitu baik. Orientasi politik luar negeri diabadikan untuk membentuk sebuah citra Indonesia di mata dunia Internasional sebagai sebuah bangsa yang mandiri dan bermartabat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

IDEOLOGI PARADOKSAL Berbeda fatsun politik luar negeri antara Soekarno dengan Soeharto. Politik Luar negeri

Soeharto bergeser rel dari politik bebas aktif menjadi politik kompromistik. Dari politik kepemimoinan dunia yang main telunjuk komando Bung Karno sebagai pemimpin besar Dunia menjadi model "lumahing asta" (bahasa jawa yang artinya politik pengemis. Soeharto. Hal yang sangat didominasi oleh pikiran Soeharto yang materialistik yang pro-Barat seiring dengan proses dari konspirasi kepentingan Barat terhadap jatuhnya kekuasaan Soekarno sebelumnya. Bagi Soeharto, politik luar negeri diorientasikan pada pembangunan ekonomi *an sich*. Sehingga hutang luar negeri yang berasal dari negara-negara dan lembaga-lembaga keuangan barat merupakan pilihan bahkan menjadi terellu bersemangat tanpa memperhitungkan resiko bagi anak dan cucu bangsa ini. Dalam wujud kongkritnya seperti hutang luar negeri dari IMF dan Bank Dunia serta berbagai bentuk hubungan negara lainnya sebagai bentuk implemantasi dari system politik luar negari yang dibangunnya.

POLITIK KRISIS GLOBAL. Bagaimana dengan situasi sosial politik yang dihadapi Megawati sebagai pewaris dua pasca pemimpin yang saling berseberangan itu ? Politik luar negeri suatu negara sangat terkait dengan kebutuhan bangsa yang sedang dihadapi. Indonesia riil dalam kondisi krisis yang tidak hanya masalah ekonomi. Tetapi multi dimensi (GLOBAL) yang rentan dengan implikasi disintegrasi. Jika demikian halnya, tuntutan pemulihan krisis ekonomi dalam negeri adalah keterkaitan dengan tantangan mencegah adanya bahaya disintegrasi bangsa tersebut. Merupakan urgensitas yang kiranya menjadi orientasi kebijakan dari politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati. Namun demikian, substansi politik luar negeri yang bebas aktif tetap merupakan spirit dari berbagai langkah politik yang diambil Megawati. Terkait dengan upaya pemulihan krisis yang harus mendapat penanganan dengan

segera, kunjungan Megawati ke berbagai negara harus dimaknai dalam kerangka pemikiran tersebut diatas. Memang perubahan politik global yang berlangsung belakangan ini begitu cepat. Akan tetapi sebagai sebuah negara besar yang sedang memerlukan *recovery*, dan itu didapat melalui sebuah hubungan internasional, upaya Megawati merupakan salah satu cara penggalangan dukungan baik politik maupun ekonomi internasional.

HASIL KUNJUNGAN MEGA. Mencermati kunjungan Megawati ke berbagai negara, terutama AS. Ada beberapa kesepakatan. Kesemuanya mengindikasikan memungkinkan upaya pemulihan krisis bangsa yang sedang membutuhkan penanganan dengan segera.

Pertama, tercapainya kesepakatan kerja sama militer antara pemerintah Indonesia dengan AS. Walaupun masih dalam taraf pelatihan yang sekian lama tertunda sejak peristiwa Santa Cruz di Dili, 1986 dan belum ada ketegasan dari AS untuk mencabut embargo militernya, namun kesepakatan ini akan berdampak pada semakin kuatnya militer Indonesia bagi upaya pencegahan disintegrasi yang sedang menjadi ancaman bangsa Indonesia.

Kedua, bantuan 500 juta dollar AS bagi upaya pemulihan krisis ekonomi di Indonesia. bantuan ini sangat penting, mengingat dalam berbagai implementasi kebijakan pemerintah, keluhan dan hambatan yang paling banyak menjadi kendala adalah minimnya dana untuk menopang keberhasilan suatu program. Disisi lain program pengurangan hutang luar negeri yang dicanangkan pemerintah secara proporsional akan sangat membantu dengan adanya bantuan ini, sehingga beban pembangunan dan hutang luar negeri sedikit berkurang.

Ketiga, ditengah kecemasan bagi investor asing, terutama investor dari AS untuk melakukan aktivitas bisnisnya di Indonesia. Pertemuan antara pengusaha AS dengan Presiden Megawati akan membawa dampak psikologis bagi pemantapan para investor tersebut di Indonesia. Perlu diketahui bahwa pasca terjadinya aksi teror di Pentagon dan WTC yang disusul dengan kebijakan pemerintah Bush yang secara tidak langsung berhadapan dengan komunitas Muslim, menimbulkan kekhawatiran akan aspek keamanan dari investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.

Keempat, bahwa lembaga keuangan dunia baik itu IMF maupun Bank Dunia secara langsung atau tidak langsung sangat tergantung dari persepsi AS dalam memandang sebuah negara. Bagi Indonesia seretnya proses kucuran dana dari lembaga keuangan tersebut dapat diminimalisir melalui pendekatan politik-diplomatik untuk meluruskan dan memberikan penjelasan secara detail mengenai kebutuhan Indonesia. Dan upaya ini dilakukan Megawati secara baik, sehingga dapat merangsang lembaga donor tersebut mempermudah proses persyaratan yang ditentukan. Keempat hal tersebut diatas, bila dirunut dari orientasi kebijakan politik luar negeri yang memberikan tekanan pada upaya pemulihan krisis ekonomi dan mencegah adanya bahaya disintegrasi bangsa merupakan langkah Presiden Megawati yang cukup berhasil.

BAGAIMANA DENGAN POSISI INDONESIA yang sebagian besar Muslim sehubungan dengan kasus September kelabu tersebut, dimana terorisme yang sedang mengglobal menempatkan gerakan Islam fundamentalis sebagai bagian yang berperan dalam aksi tersebut. Bagi bangsa Indonesia,

kunjungan Megawati tersebut menjadi relevan atas beberapa hal.

Pertama, akumulasi teror yang dialami bangsa Indonesia sendiri dari tahun ke tahun justru mengalami peningkatan secara mengejutkan. Peristiwa teror yang kita alami, baik melalui pengeboman, pembakaran dan penjarahan menimbulkan keprihatinan yang sama dengan yang terjadi di AS. Sehingga dengan demikian, terorisme bukan lagi perkara lokal atau nasional, melainkan perkara internasional.

Kedua, kunjungan Megawati menjadi sangat penting dalam konteks asumsi yang berkembang bahwa terorisme erat terkait dengan aliran Islam fundamentalis. Sebagai penduduk Muslim terbesar, Megawati ingin menegaskan dan membuka mata dunia bahwa tak ada hubungan langsung antara Islam dengan terorisme yang sedang mengglobal ini. Karena di Indonesia pun persoalan ini merupakan momok bangsa yang belum terselesaikan.

RAJUTAN ALIANSI POLITIK dengan kelompok Islam Akan tetapi stigma terorisme yang telah diciptakan AS melekat pada sebuah gerakan Islam, tak ayal keberangkatan Megawati ke AS sedikit banyak akan berpengaruh pada hubungan politik antara Megawati dengan kekuatan Islam fundamentalis. Keadaan ini sebenarnya bagi Megawati sangat dilematis bagi posisi politik dirinya di tanah air. Rajutan aliansi politik dengan kelompok Islam sedikit banyak akan terganggu. Fenomena pendaftaran laskar Jihad untuk diberangkatkan ke Afganistan dan dukungan formal dari berbagai organisasi Islam terhadap apa yang sedang terjadi di Afganistan merupakan kerikil tajam yang dapat menghambat upaya *recovery* bangsa yang sedang dibangun

Megawati. Apalagi ini juga diserta berbagai aksi *sweeping* terhadap orang dan asset AS yang ada di Indonesia.

PERCATURAN POLITIK nasional dan global Mencermati lawatan Megawati ke berbagai negara terutama AS dalam konteks perkembangan yang terjadi saat ini memang sangat rentan bagi keberlangsungan posisi politiknya yang aman. Berbagai kepentingan berbaur menjadi satu dan bermuara pada sosok Megawati sebagai *determinant variable* dari proses berbangsa yang sedang terjadi saat ini. Apalagi dalam konteks kebutuhan bangsa dan pergeseran percaturan politik nasional dan global yang begitu cepat. Tuntutan untuk menjalankan politik luar negeri secara *adaptable* dengan semua varian yang melingkarinya sangatlah penting. Hal ini untuk mengindari adanya gesekan yang mengarah pada sebuah gejolak politik yang nantinya hanya akan meruntuhkan sendi-sendi berbangsa yang kini sedang dirajutnya. Untuk itu, sangatlah penting untuk kembali melakukan operasionalisasi dari politik luar negeri secara hati-hati , termasuk didalamnya upaya mengembalikan citra Indonesia sebagai sebuah komunitas politik dunia yang patut diperhitungkan di mata internasional sebagaimana Soekarno telah merintis jalan untuk itu. Dan memang itulah sebenarnya tujuan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif dalam pengertian yang sebenarnya

Kalibata, 28 September 2001

VI - 02
PEMUTUSAN DIPLOMATIK, MEMBAHAYAKAN

PERNYATAAN PEMERINTAH terhadap aksi militer AS di Afganistan bagi sebagian kalangan, terutama kelompok Islam "garis keras" terkesan terlalu *lunak*. Apalagi setelah MUI sendiri mengeluarkan sikap politiknya yang meminta pemerintah Megawati untuk melakukan pembekuan hubungan diplomatiknya untuk sementara waktu dengan AS dan sekutunya. Demikian pula realita bahwa dua organisasi Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, pun memiliki substansi respon yang sama. Mayoritas bangsa ini kiranya memang memiliki opini dan respon yang sama bahwa aksi militer ini akan menjadi bencana kemanusiaan yang lebih dasyat terutama di negara Afganistan yang melebihi implikasi atas penyerangan bom terhadap WTC dan Markas Petagon di Amerika.

SIKAP PEMERINTAH tersebut yang "hanya" menyatakan prihatin, menyerukan kepada AS agar operasi militer tersebut dilakukan secara terbatas dan terukur, serta meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar turun tangan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya untuk memelihara perdamaian agar penyerangan tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan korban sipil yang besar. Pernyataan yang tentu harus dinilai secara obyektif, realistik dan lebih dari itu tentu itu merupakan kearifan dalam

bahasa diplomatik yang cukup handal apabila menggunakan mata dan hati yang bersih. Sikap yang amat relevan dengan realita bangsa menghadapi posisi yang sangat dilematis antara tuntutan pemulihan ekonomi dan aksi penolakannya terhadap agresi militer AS ke Afganistan. Dua hal yang sama sama memberikan concern dengan bobot yang sama beratnya, sama-sama bernuansa kemanuasiaan. Apalagi UU Dasar kita telah mengamanatkan kepada bangsa kita untuk ikut secar aktif menciptakan perdamaian dunia.

SIKAP POLITIK PEMERINTAH terhadap aksi militer AS tersebut adalah gambaran sikap hati-hari terhadap perkembangan global yang bergerak begitu cepat. Kehati-hatian agar Bangsa Indonesia jangan mudah terjebak dalam stigma pro dan kontra. Keterlibatan yang konyol terhadap persoalan politik global yang sedang menggelontor mempengarui sendi-sendi yang amat ideologis bagi setiap bangsa didunia ini, setelah berakhirnya perang politik) dingin barat dan timur!. Kini paradigma pertentangan politik barat dan timur tersebut berubah dengan terbangunnya (mungkin sengaja) menuju konflik agama!. Peradaban dunia yang akan menghantarkan dunia mempercepat kiamat! oleh perang dunia pertama pasca perang dunia kedua berakhir. Oleh karena itu sikap pemerintah mutakhir tersebut bagi kita, anak bangsa yang sehat adalah sangat tepat.

BAHWA KEBIJAKAN politik luar negeri selalu terkait dengan konfigurasi politik dan kebutuhan pragmatis sebuah negara. termasuk Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia memang dipastikan terimbas oleh kejadian yang kini sedang terjadi di dunia, issue besar bencana 1 September 2001. Apalagi kelompok Islam politik di Indonesia yang terbelah kepada kelompok garis keras dan moderat memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses dan

menentukan kebijakan dalam dan luar negerinya. Oleh karena itu, argumentasi solidaritas ummat yang kini sedang menggema menjadi gerakan dan aksi politik yang terutama direpresentasikan oleh komunitas Islam politik garis keras adalah relaita politik dan memang tak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Disitulah kita harus memahami betapa sulitnya memecahkan masalah dan dalam mengambil keputusan politik bagi pemerintah tentang penyerangan balasan Amerika terhadap Afganistan.

DALAM BERBAGAI BENTUKNYA, gerakan yang menghujat aksi militer AS ini seperti pembakaran bendera dan aksi '*sweeping*' disadari adanya berkorelasi dengan dunia ekonomi Indonesia. Kecemasan dan kekhawatiran akan terjadinya stagnasi dalam roda perekonomian Indonesia kini sedang menghantui. Ancaman para pelaku ekonomi asing di ndonesia serta sikap negara-negara lain untuk nemulangkan warganya yang berada di Indonesia tersebut merupakan indikasi semakin redupnya aktivitas bisnis untuk menopang pemulihan ekonomi. Walaupun kita tahu, aparat keamanan telah berupaya untuk meredam adanya aksi ini, namun tak urung efek psikologis yang terjadi tak mampu dibendungnya. Implikasi yang menimbulkan persoalan tersendiri bagi bangsa ini, menambah semakin rumit dan kompleksnya krisis dalam negeri yang katanya sudah multi dimensional.

SEBAGIAN KOMPONEN masyarakat yang terutama disuarakan oleh kelompok Islam politik (ekstreem) memang secara riil sangat berpengaruh terhadap perubahan politik dalam negeri Indonesia. Sehingga tidak dapat pula dipungkiri kemungkinan muncul dan berkembangnya konflik politik lanjutan yang memiliki muara (*mainstream*) menggoyang pemerintahan Mega-Hamzah!. Seiring dengan perkembangan

politik global yang menjadikan kelompok ini melalui tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan pembekuan hubungan diplomatik dengan AS dan sekutunya. Hal yang dalam konteks upaya bangsa memulihkan (*recovery*) ekonomi Indonesia sangatlah perlu dipilah-pilah secara proporsional dan dicarikan relevansinya. Termasuk pertimbangan yang amat perlu dipanjang dan lebih bijak agar sikap yang terlalu emosional dapat dihindari agar tidak menjadi sikap yang konyol. Dan apalagi rakyat yang jumlahnya 200 juta di Indonesia tidak juga dipertaruhkan nasibnya.

REALITAS BERBICARA. Sebuah kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang belum bisa memulihkan ekonominya sejak tahun 1997. Hutang luar negeri dan swasta yang telah mencapai 138 Milyar Dollar AS dan hutang dalam bentuk SBI, obligasi dalam negeri sebesa hampir 700 Trilliun Rupiah, warisan rezim Orde Baru akib dari salah urusnya negara sungguh bukan masalah yan enteng. Disamping itu bargaining politik ekonomi dan kekuatan militer Indonesia harus diakui secara jurus justru berada dalam keadaan sangat lemah. Sehingga pilihan untuk bersikap tegas terhadap persoalan internasional yang didalamnya adalah aksi militer AS ke Afganistan, Indonesia harus mempu melakukan inovasi yang cerdas melalui kemampuannya berjuang melalui pendekatan non militer dan juga *non ekonomic effect*. Yaitu melalui gerakan moral sebagaimana kekayaan yang selama ini masih dimiliki oleh bangsa kita. Sebab bukan persoalan takut dan tidak takut namun apabila gerakan menentang AS dilakukan secara membabi buta, diatas kertas dan secara matematik Amerika dengan sekutu akan semakin nekad dan perang tak dapat dihindarkan. Hal yang dapat dipastikan pula, dunia ini tak akan dapat mengambil manfaat terhadap kemenangan dan kekalahan yang menimpa siapapun dalam perang itu.

Apalagi diaspek ekonomi dan kesejahteraan ummat. Inilah maksudnya apa yang ditulis pada awal bab ini tentang terbangunnya paradigma percepatan dunia menuju hari kiamat, dunia yang hancur-hancuran akibat ulah manusia dan kecanggihan teknologi yang terkesan mengerikan bagi ummat manusia itu.

DI-INDONESIA, Peristiwa 11 September 2001 di New York dan Washington DC tak dapat dihindari dampak langsung terhadap sosial politik dan ekonomi di Indonesia. Oleh karema sebuah penyesalan yang amat besar atas terjadinya pemboman di Amerika tersebut. Ekonomi Indonseia, ibaratnya penyakit jantung yang akut, dan sangat peka terhadap berita dan issue yang timbul disekelilingnya. Jangankan oleh berita dalam negeri yang selalu mengejutkan seperti bebasnya Tommy Soeharto. Pergantian pejabat saja bisa menggoyahkan sendi-sendi ekomoni nasional. Apalagi munculnya issue sweeping dan tuntutan terputusnya hubungan diplomatik dengan AS. Tentu akan menjadikan hambatan, gangguan dan gagalnya pemulihan ekonomi Indonesia melalui upaya stabilitas politik dan jaminan keamanan dalam negeri. Terakhir keterpengaruhan yang secara langsung adalah nilai tukar rupiah yang anjlok dan harga saham-saham jatuh (keduanya merupakan salah satu dari indikator kegiatan ekonomi di Indonesia). Oleh isue-isue tersebut nilai tukar Dollar kini mencapai Rp 10.300 per dollar AS. Melonjak jauh dari yang pernah diraih ketika saat berlangsungnya Sidang Istimewa MPR yang memutuskan Ibu Mega menjadi Presiden, pengganti Abdurrachman Wahid.

BANK ADB DI SINGAPURA yang merupakan bank terbesar di ASEAN pun telah memperingatkan, kalau gerakan anti-AS terus berlanjut di Indonesia, maka nilai tukar rupiah akan

menjadi Rp 11.500 per dollar AS. Kalau ini terjadi maka basis tempat berpijak ekonomi Indonesia, basis tempat berpijak dunia usaha yang menjadi pelaku utama pemulihan ekonomi Indonesia (bukan pemerintah), akan terganggu dan bahkan rusak. Bukan hanya di bidang ekspor dan impor, tetapi juga kegiatan ekonomi di dalam negeri. Sebab tidak ada produk atau komoditas apa pun yang diproduksi, yang tidak mengandung kandungan impor. Entah itu bahan bakunya, bahan penolongnya maupun barang modal seperti mesin. Bukan hanya di sektor produksi, tetapi juga di sektor perdagangan. Belum lagi di sektor pariwisata yang terkena dampak langsung.

DUNIA USAHA memang tidak akan berdaya apa-apa menghadapi gerakan yang sifatnya politis, yang membawa dampak negatif terhadap kegiatan usahanya. Gerakan anti-AS dan *sweeping* dianggap bisa mengganggu, menghambat dan merusak pemulihan ekonomi. Kalau gerakan ini terus berlanjut, jangan harap ekonomi Indonesia akan pulih. Terlebih dengan berubahnya keadaan dunia, justru setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 di New York dan Washington DC. Ada kemungkinan sekali pun Indonesia menjalankan pemulihan ekonomi secara baik dan tidak ada gangguan apa pun, tetapi pemulihan bisa tidak berhasil, akibat perubahan itu.

SEBAGAIMANA DIKETAHUI, sejak krisis tahun 1997, ekonomi Indonesia terpuruk, rakyat Indonesia menjadi lebih miskin dan sebagian tidak bisa makan, sehingga perlu ditolong dengan Program Jaring Pengaman Sosial, yang dananya adalah pinjaman luar negeri. Ada 40 juta orang Indonesia yang menganggur dan dengan demikian tidak memiliki penghasilan. Hidupnya tergantung kepada keluarga, sanak saudara, dan handai taulan yang bekerja.

Sampai hari inipun ekonomi Indonesia belum pulih seperti sebelum tahun 1997. Pemulihan ekonomi terus dilakukan, juga oleh pemerintahan sekarang. Karena itu pemerintah dan juga semua orang yang mementingkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia, tidak ingin pemulihan ekonomi terganggu, terhambat atau dirusak.

SIDANG KABINET hari Kamis (4 Oktober) lalu berlangsung selama 5,5 jam dan sebagian besar waktu digunakan untuk mendengarkan penjelasan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti tentang prospek ekonomi dunia dan akibatnya buat ekonomi Indonesia yang mau dipulihkan hari-hari mendatang. Prospek yang sangat ditentukan oleh peristiwa runtuhnya menara kembar World Trade Center (WTC) di New York dan hancurnya sebagian gedung Departemen Pertahanan Pentagon tanggal 11 September lalu. Penjelasan tersebut kabarnya membuat para peserta sidang begitu tercekam.

RAKYAT AWAM tidak tahu apa yang diucapkan Menko Perekonomian. Tetapi, dari. suasana mencekam yang dirasakan para anggota kabinet bisa diduga ada ancaman yang menakutkan yang dihadapi ekonomi dunia, yang pasti berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia yang masih tertatih-tatih mau memulihkan diri. Apakah ini artinya, Indonesia akan mengalami resesi babak kedua ataukah mengalami hal yang lebih buruk dari itu, belum diketahui pasti. Setelah peristiwa itu membuat waswas dan pertanyaan banyak orang awam. Mewnunggu penjelasan pemerintah tentang dampak dan bahaya yang dihadapi ekonomi Indonesia.

AKAN TETAPI, ada satu indikasi yang bisa dibaca dengan optimis, tetapi bisa juga dibaca dengan rasa khawatir. Federal Reserve (bank sentral) AS lagi-lagi menurunkan suku

bunga *(prime rate)* dari tiga persen menjadi 2,5 persen (per tahun) pada pertengahan bulan oktober ini. Padahal tanggal 17 September yang lalu (enam hari setelah peristiwa WTC dan Pentagon), Federal Reserve baru saja menurunkan suku bunga dari 3,5 menjadi tiga persen per tahun. Mungkin ini bisas dibaca sebagai kelanjutan usaha Amerika untuk mencegah resesi yang memang sudah mengancam sebelum terjadinya peristiwa 11 September 2001 dan memulihkan ekonominya. Turunnya suku bunga ini diharapkan memicu kegiatan di pasar modal dan memacu kegiatan dunia usaha serta memacu agar bangsa Amerika tidak mengurangi belanjanya. Pendeknya ada optimistis bahwa ekonomi Amerika yang sebetulnya belum mengalami resesi (angka pertumbuhan ekonominya diproyeksikan masih positif, sekalipun kecil) akan kembali bangkit dan cerah *(robust)* kembali. Akan tetapi angka 2,5 persen ini juga bisa dibaca sebagai usaha mati-matian Amerika agar tidak dilanda resesi dan angka ini merupakan *prime rate* terendah sejak tahun 1962 (hampir 40 tahun yang lalu). Usaha mati-matian ini juga bisa gagal akibat berubahnya pola hidup orang Amerika setelah peristiwa 11 September 2001.

PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK Kini fenomena gerakan anti-AS yang kian menaik suhunya bermuara pada tuntutan pemutusan hubungan diplomatik. Tuntutan emosional untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatis, seandainya hal tersebut dipenuhi akan membawa implikasi sebagai berikut :

a. Indonesia akan terisolasi dari percaturan politik global, karena dengan penutupan tersebut persepsi internasional akan mengarahkan Indonesia sebagai negara yang berperan dalam melindungi teroris. Ini terjadi kerena Indonesia tak cukup punya posisi tawar ekonomi dengan negara-negara AS dan sekutunya.

b. Pemulihan ekonomi Indonesia terancam *mandek*, karena secara riil seluruh proses aktivitas ekonomi Indonesia tergantung kepada dukungan internasional.

c. Bahaya kelaparan dan resesi ekonomi Indonesia akan terjadi, dan ini akan mengarah pada chaos sosial.

d. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi krisis politik di dalam negeri babak baru yang semakin tak berujung.

Dengan melihat realitas yang sedang terjadi, sikap Indonesia sekarang ini dalam memandang situasi internasional cukup proporsional. Ini bukan berarti Pemerintah Indonesia lalu menjadi antek AS, mentang-mentang memperoleh bantuan tambahan tatkala Presiden Megawati berkunjung ke AS, harus dilihat dari adanya kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa yang mendesak. Meskipun tidak harus secara mudah menuduh Mega telah menjadi anteknya Amerika dan berbeda dengan sikap anti imperialisme Bung Karno. Bukankah sebaliknya bahwa kitalah yang paling dahulu menjadi anteknya Amerika ketika yang terus membuka lebar-lebar kantong hutang dan keterikatan kita kepada "kebaikan" amerika terhadap Indonesia semasa 32 tahun dengan dalih pembangunan ekonomi di Indonesia. Penyebab Indonesia justru telah jatuh ditangan cengkeraman system Imperialisme dan Kapitalisme Amerika yang nyaris tak bisa bernafas lagi oleh timbunan dipundak bangsa, hutang luar negeri yang menggunung. Dan mungkinkah Indonesia dapat melepas belenggu Imperialisme dan Kapitalisme dengan cara berjihad?. Kan tidak.

Kalibata, 10 Oktober 2001

VI - 03
"GO TO HELL WITH YOUR AIDS"
DULU DAN SEKARANG,
IDEALISTIK DAN KE-MUNAFIKAN

AKSI KAMIKAZE. Pasca 11 September 2001, suhu kepolitikan internasional semakin meninggi. Kontraksi politik ini disebabkan aksi *kamikaze* kelompok teroris di gedung kembar WTC dan Pentagon. Ini ditambah dengan serangan balasan AS 7 Oktober, yang membombardir Afghanistan yang dituduh sebagai pelindung para teroris. Akibatnya, kekhawatiran akan munculnya sebuah tragedi kemanusiaan tak terhindarkan. Dunia kini dipenuhi ketakutan yang sangat akut, bayang-bayang akan berkecamuknya perang dunia semakin mendekati kenyataan ketika dalam proses selanjutnya terkait dengan bentuk 'stigmatisasi' untuk mengintegrasikan perilakunya.

IMPLIKASI. Realitas tersebut berimplikasi langsung terhadap sosial politik dan ekonomi di Indonesia. ***Pertama,*** mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Perselisihan antara AS dengan Afganistan dalam tingkat opini umum (*general opinion*) dunia yang merembet ke Indonesia dipahami sebagai perseteruan Amerika dengan ummat muslim. Meskipun masih menjadi pertanyaan umum pula karena kenyataannya tidak semua negara yang berpenduduk mayoritas Islam bahkan yang 100% Islampun tidak secara otomatis memiliki respon dan reaksi yang sama.

Contohnya negara tetangga terdekat Malaysia dan Brunei Darrusalam, sangat berbeda dengan reaksi yang kuat seperti dari Indonesia yang siap dengan pasukan jihadnya menuju Afganistan untuk melawan Amerika. Sehingga terkesan tentang agama yang dalam kultur berbangsa di Indonesia adalah menjadi sarana pemersatu. Sekonyong-konyong dipolitisasi untuk kepentingan politik internasional ketika muncul sengketa dimana adanya peluang bahwa agama dapat dijadikan alat untuk melakukan intervensi persoalan negara lain. ***Kedua***, ancaman terhadap kelangsungan bergeaknya roda perekonomian Indonesia. *Recovery* ekonomi terancam stagnan. Sebuah realita bahwa basis ekonomi Indonesia sepenuhnya tergantung kepada dukungan internasional, yang dalam banyak hal peran AS sangatlah dominan. Meskipun As sendiri menjadi sangat terikat pula terhadap Indonesia atas motif penyelematan hutang dan investasi yang sudah ditanam di Indonseia. Hegemoni AS dalam menentukan arah perekonomian suatu bangsa sangat signifikan, sehingga dengan kejadian di AS dapat dipastikan berpengaruh langsung terhadap proses pemulihan ekonomi yang kini sedang menjadi prioritas bangsa. ***Ketiga***, kemungkinan terjadinya pergeseran kebijakan politik luar negeri sangatlah mungkin. Meskipun tarik menarik kepentingan dengan potensi yang berbeda antara keberpihakan kepada ekonomi yang berarti kepada Amerika dan keberpihakan atas aspek ideologi, kultur dan agama yang berarti harus melawan AS, dan memutuskan hubungan diplomasinya. Kemungkinan kearah pemilihan yang dilematik, sekarang sudah amat terasa ketika pemerintah harus menyerah terhadap tekanan kelompok Islam garis keras di dalam negeri atau kemungkinan yang sama pula menyerah kepada realita ketergantungan ekonomi internasional yang didalamnya didominasi oleh Amerika.dan sekutu-kutunya.

KELOMPOK ISLAM POLITIK di Indonesia memang cukup signifikan, sama kuatnya kekuatan senjata ekonomi bagi negara-negara donor yaitu Amerika dan sekutunya terhadap Indonesia. Bahkan kemudian kondisi dilematik tersebut, membuat pemerintah dapat mengalami delegitimasi politik dengan dijadikannya issue internasional untuk menekan kebijakan politik menggoyang menggoyang pemerintahan yang ada sekarang ini. Bila ini terjadi, taruhan akan bangkrutnya ekonomi Indonesia telah ada di depan mata.

KENYATAAN AKTUAL yang terjadi adalah sebuah fenomena global di dalam negeri yang bersumber dari sebagian elemen masyarakat Indonesia yang menghendaki pemutusan hubungan diplomatik dengan AS tersebut dengan berbagai dalih termasuk dengan cara mengusung kembali ideologi Soekarno yang anti Imperialisme dan Kapitalisme secara ngawur. Tulisan ini bertujuan ingin mencoba mengkomparasikan keadaan ekonomi-politik dan suasana bathin bangsa semasa kekuasaan Soekarno, relevansinya dengan keadaan ekonomi-politik dan suasana kebathinan bangsa Indonesia dimasa kekinian (kontemporer) semasa bukan Soekarno yang berkuasa. Yang jelas dua masa dekade yang berjauhan tersebut telah terjadi banyak perubahan. Oleh karera itu, analisa sosial politik yang digunakan tersebut menjadi kontraproduktif bagi bangunan bangsa dimasa sekarang.

GO TO HELL WITH YOUR AIDS! (persetan dengan bantuanmu). Itulah ungkapan terkenal Soekarno untuk menghantam dominasi AS sewaktu AS dipimpin oleh Eisenhower. Ungkapan yang sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada AS, namun kepada semua bentuk dan produk kapitalisme dan imperialisme. Pada waktu itu, AS

memang representasi imperialisme yang mengusung ideologi kapitalisme karena kekuatan modalnya untuk mendominasi tatanan dunia dengan pengaruh ekonominya. Era perang dingin menjadikan setiap kutub berusaha meraih pengaruh politik ke setiap negara termasuk negara besar Indonesia. Perebutan pengaruh antara kutub AS dan US dimasa lalu berimplikasi pula kepada Indonesia yang secara geopolitik sangat strategis. Perebutan untuk meraih dominasi bagi masing-masing kutub internasional tersebut salah satu caranya adalah menggunakan instrumen politik didalam negeri (Indonesia sebagai obyek). Antara lain waktu itu, salah satunya adalah melalui Komunisme oleh US dan Kapitalisme oleh AS melalui upaya menjadikan Partai sebagai alat yang efektif dalam menyeret politik barat dan timur tersebut. Komunisme melalui PKI dan Kapitalisme-liberalisme melalui tokoh-tokoh PSI, Masyumi dan partai yang berbendera Islam. Dan logika politik yang dijadikan sandaran bagi perilaku politiknya adalah tak ada kekuatan yang netral, semuanya harus berada dalam kutub tersebut. Apakah kapitalisme dikutub barat ataukah komunisme dikutub timur. Diluar itu tak ada tempat. Artinya resiko bagi negara yang "bebas aktif" adalah terjepit diantara dua kekuatan besar yang sedang bertarung. Oleh karena itukah setiap kutub selalu menjadi sangat mudah meng-klaim meskipun hanya oleh indikasi arah angin kecil politik kemana sebuah negara bersikap. Contohnya ketika Bung Karno berteriak tentang "*Go To Hell With Your Aids*" diklaim oleh kutub Sosialis (Komunis) sebagai sikap anti Amerika!. Sementara kelompok Islam politik di Indonesia justru cenderung menolak sikap politik Soekarno, kala itu.

GERAKAN NON BLOK. Contoh lain dari sikap keprihatinan Soekarno terhadap tata dunia yang timpang akibat ketegangan ideologis dunia adalah berhasil dibentuknya

Gerakan Non-Blok tahun 60-an dengan embrio yang juga kemudian dilahirkan oleh Soekarno atas prakarsanya menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. GNB adalah instrumen politik luar negeri Bung Karno yang didukung oleh banyak negara yang terpinggirkan, juga sebagai *counter* terhadap dualisme kekuatan yang diametral dan sangat membahayakan bagi perdamaian dunia. Itulah inti politik luat negeri yang bebas dan aktif tersebut. Dan sebuah karya besar bangsa Indonesia dimata dunia adalah Pidato Bung Karno di depan Sidang PBB pada tahun 1962 yang trekenal yaitu " *The Build of Word A New*" yang kemudian semakin tak terhitung jumnlahnya (ratusan) negara baru lahir, melepaskan diri untuk mandiri dan merdeka dari cengkeraman imperialisme. Dan perlu dicatat bahwa perjuangan melawan penjajah dan kemudian negara menjadi merdeka, tidak selamanya harus diraih dengan perang yang memakan korban nyawa manusia!.

KONSEPSI MARHAENISME. Persoalannya, mengapa dalam perjalanan selanjutnya, AS terprovokasi oleh sikap US yang meng-klaim Soekarno ada dipihaknya, kemudian menjadi bersikap antipati terhadap Soekarno? Salah satu hal yang dapat menerangkan hal ini adalah konsepsi Marhaenisme yang kemudian difinalisasi oleh ideologi dasar negara yang dilahirkan oleh Soekarno pula pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam praksis politiknya akhirnya terjadi perbenturan yang keras antara marhaenisme dan kapitalisme. Keberhasilan Soekarno dalam mengelola ideologinya menjadi kekuatan yang signifikan dalam percaturan politik global. Dan kenyataannya mengancam dominasi kapitalisme dan Imperialisme. Bukan atas dasar klaim komunisme maupun sosialisme dan internasionalisme, tetapi sepenuhnya karena ideologi yang dilahirkan sendiri oleh Bung Karno. Ideologi

yang concern kepada pembangunan bangsa dalam rangka kesejahteraan manusia, mencerdaskan ummat dan ikut menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu tepatkah kiranya "*Go To Hell With Your Aids*" nya Soekarno diusung untuk memerangi Amerika atas serangan kepada Afganistan sekarang ini?

INI DADAKU MANA DADAMU. Didalam negeri sendiri, meskipun fundamen ekonomi telah dibangun atas dasar Marhaenisme yang mengutamakan kemandirian rakyat dalam menghadapi berbagai tekanan dan dominasi kapital. Namun kenyataan yang terjadi adalah kemenangan dipihak sistem dan mekanisme politik yang bertolak belakang dengan ideologi Marhaenisme tersebut. Ironis, karena selama cukup waktu 32 tahun oleh rezim Soeharto Indonesia telah berhasil dibawa dalam kekalahan yang takluk dipangkuan imperialisme dan kapitalisme internasional. Amerika dan sekutunya. Kini ketergantungan bangsa menjadi keniscayaan. Ekonomi Indonesia jatuh lemas dan mungkin menjadi terlalu lama sekarat seperti yang terjadi sekarang ini. Artinya kita harus jujur tentang siapa yang paling bertanggung jawab dan patut mendapatkan predikat antek Amerika. Sehingga membuat sulitnya bagi pemerintah Indonesia pasca pemerintahan Soeharto dalam mengambil sikap politik yang merdeka, tanpa keterkaitan dan ketergantungan aspek ekonomi!. Meskipun pula Indonesia juga secara historis berpotensi menjadi pemimpin dunia dibawah Soekarno. Amerika relitasnya boleh bangga dan tertawa lebar oleh berhasilnya strategi politik jangka panjang terhadap Indonesia yang kini sangat dipengaruhi oleh kapital yang dominatif, menjadi instrumen politik dan berhasil melumpuhkan potensi politik internasional dan ekonomi Indonesia. Itulah mengapa Soekarno pada waktu sekarang hanya bisa menangis. Karena rakyatnya telah terjual! dan

Kedua, apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah akibat peristiwa 11 September. Bukan karena faktor ideologis yang menyebabkan sikap politik kelompok Islam menentang dominasi AS, tetapi hanya karena alasan solidaritas ummat. Sehingga upaya menempatkan hubungan dan dukungan AS dengan kebutuhan *recovery* bangsa ini menjadi tak relevan.

Ketiga, berbicara mengenai *"go to hell with your aids"* dalam kondisi sekarang berarti semakin tak jelas arah *recovery* yang kini sedang menjadi agenda pemerintah. Dampak sosial ekonomi yang demikian besarnya akan berpengaruh terhadap keutuhan bangsa Indonesia sekarang ini.

OLEH KARENA ITU, melihat perbedaan yang sangat jauh antara keadaan global dan suasana Indonesia kini, semboyan *"go to hell with your aids"* dalam konteks pemulihan ekonomi sekarang ini adalah tindakan yang a-historis dan tak mencerminkan *sense of crisis*. Itu adalah tindakan emosional belaka. Tanpa harus menuduh penulis sebagai antek Amerika!. Berpikir maju adalah mempertahankan substansi ideologi. Bukan konservatifisme dengan menghidarkan diri dari obyektifitas dan realita yang berkembang.

VI – 4
INDONESIA POSISI TERJEPIT, PADA KONFLIK DUNIA KONTEMPORER

Mendayung Diantara Dua Karang, adalah salah satu judul pidato Bung Hatta yang dijadikan rujukan bagi politik luar negeri Indonesia yang masih relevan dipertahankan hingga saat sekarang. *Grand theory* yang ditawarkan oleh Bung Hatta tersebut adalah politik luar negeri bebas aktif. Dilatar belakangi oleh situasi politik dunia yang terbelah menjadi blok barat dan timur. Blok Timur yang mengusung ideologi sosialisme 'komunis' dan blok Barat yang mengusung ideologi imperilisme 'kapitalis'. Sehingga kemudian muncul yang disebut perang dingin sebagai bagian dari perebutan pengaruh masing-masing blok tersebut yang pada akhirnya menyeret negara-negara ketiga yang sepertinya tak mempunyai pilihan, selain masuk ke dalam salah satu blok barat atau timur.

MELALUI KONSEPSI yang sangat elegan tersebut Indonesia dimasa berakhirnya perang dunia kedua, tahun 1945. sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tentu tak akan semudah mengambil resiko terjebak dalam stigmatik Blok Timur dan Blok Barat tersebut. Oleh karena itu, kemudian para *the Founding Father's* kita mengambil posisi politik diantara blok Timur dan blok Barat sesuai dengan kepentingan Bangsa Indonesia yang telah tercermin dalam

pembukanan UUD 1945 tentang upaya ikut menciptakan perdamaian dunia. Keputusan politik yang amat arif bagi bangsa yang memiliki proyeksi dan perspektif jauh kedepan. Gagasan yang dapat dikatakan bermakna visioner dan mampu menjawab tantangan dunia, ketika hubungan internasional terbelah menjadi dua blok yang saling bertentangan secara diametral dan mengancam perdamaian dunia. Itulah orientasi dasar dari politik luar negeri kita selama ini yang mendasarkan diri pada pilihan politik untuk menempatkan diri secara tepat dalam perseteruan blok (ideologi) dan perang dingin antar barat dan timur.

PERUBAHAN PARADIGMA Perang dingin dan perseteruan ideologi (sosialisme timur versus kapitalisme barat), pergeseran global telah mampu merubah paradigma dunia baru. Terjadinya transformasi budaya perseteruan ideologi dunia yang primitif menuju perseteruan ideologi dunia kontemporer. Perubahan paradigma tersebut global tersebut, tentunya memiliki akar historis yang berkesinambungan dengan kondisi sekarang. ***Pertama***, interaksi internasional sejauh ini berkutat pada level 'kawan-musuh', dan itu juga dijadikan rujukan untuk mengintegrasikan pengaruhnya masing masing pihak yang berseteru. Namun dengan berakhirnya perang dingin yang menjadikan AS sebagai pemenang, tentunya menyimpan implikasi politik global yang tak ringan. Setidaknya "euphori" kemenangan tersebut akan berlangsung cukup lama. Salah satu implikasi politik hilangnya stigmatisasi ideologis 'sosialisme-kapitalisme'. Oleh karena itu, sengaja atau tidak "Blok Barat" yang disepresentasikan oleh Amerika menjadi sangat arogan dan tentu berarti naluri "hobby"nya berperang cenderung manciptakan 'musuh baru' dan sekaligus pemasaran produk alat-alat perangnya keseluruh dunia. Termasuk kepada negara-negara "musuh baru" nya itu. Dengan demikian

interaksi keberadaan "cowboy" dan sebagai polisi dunia Amerika akan terus berjalan terus.

Kedua, realitas historis yang tertanam dalam peradaban manusia selalu merujuk pada realitas kecamuk di Timur Tengah. Timur Tengah sebagai poros perubahan dunia ironisnya merupakan wilayah dengan catatan konflik laten yang tak berkesudahan. Bahkan dalam kitab sucipun, wilayah ini seakan telah ditakdirkan menjadi bagian dari persoalan dunia yang tak akan terselesaikan. Kecenderungan ini ditambah dengan dogmatisme agama dan *interest* politik negara tertentu. Yang sudah barang tentu menjadi prioritas Amerika untuk selalu ikut "ngrecokin" atau nimbrung sekaligus mencari pengaruhnya yang signifikan. Seperti contohnya perang abadi Israel dan palestina. Disanalah kemudian asal muasal "teroris" lahir sebagai respons dari keterlibatan amerika yang terlalu jauh dan merupakan bentuk (methoda) perang gerilya sebagai alternatif yang efektif dalam melakukan perlawanan terhadap intervensi asing, dimanapun dinegara didunia ini. Ciri yang dikenal pada negera-negara jajahan yang memperjuangkan kemerdekaannya.

HISTORIKAL. Terkait dengan persoalan di Timur Tengah yang apabila dicermati, secara historikal bahwa konflik yang terjadi sejak beradaban manusia mulai mengenal agama, adalah berkembangnya perebutan pengaruh agama itu sendiri yang kemudian cenderung mengantarkan kepuncak kemelut. Termasuk didalamnya yang cukup menonjol adalah agama Islam dan Kristen. Fenomena Perang Salib dan fenomena "jihad" yang merupakan bukti historis dari kemelut "perang" agama yang kemudian hingga kini mempunyai implikasi politik dan pengaruh yang besar ke seluruh bagian dunia. Implikasi tersebut dapat dicarikan padanannya dalam fenomena jihad "kaum muslim" yang

berlangsung di Palestina dalam menghadapi "kaum kristen" Israel.

Kedua hal tersebut merupakan varian politik yang membentuk pola interaksi internasional kontemporer itulah yang tentu memiliki benang merah realitas historis yang menyimpan 'bom waktu' yang mengancam meledak setiap saat dan salah satu ledakannya adalah peristiwa 11 September 2001. Dan apakah bom "dendam" waktu tersebut akankah berakhir dengan "memburu tikus" yang disebut teroris tersebut dengan cara penyerangan ke Afganistan?. Saya kira dengan peralatan modern sekalipun namundengan cara "konvensional" yang dilakukan oleh Amerika tersebut tak akan pernah efektif. Kita masih ingat penyerangan Amerika di Irak. Siapa memenangkan siapa , tidak jelas. Yang jelas adalah Amerika sedang menyebarkan dendam dunia untuk memancing perang Salib-Jihad dunia!.

PERKEMBANGAN DUNIA sekarang ini dipengaruhi oleh mengkristalnya ideologi/religiusitas yang sama-sama bersumber dari Timur Tengah, Islam dan Kristen. Pendek kata wajah baru dunia sekarang adalah sebuah realita perebutan pengaruh antara Islam dan Kristen. Mengapa? Sebab realitas yang terjadi oleh "*milestone*" 11 September 2001 menunjukkan bahwa ancaman paling serius yang kini dihadapi ummat manusia belakangan ini adalah konflik agama, Islam dari belahan blok Timur dan Kristen dibelahan blok Barat. Bentuk konflik global yang amat sangat lebih mengerikan ketimbang perang ideologi dunia yang sementara dapat dianggap telah berakhir. Kita tidak bisa menampik dan menyembunyikan kenyataan ini. Terutama setelah melihat sikap negara-negara Barat dan Timur, pasca serangan gedung WTC dan Pentagon. Sejarah juga mencatat, kedua agama ini mempunyai spirit perlawanan yang sangat

tangguh, yakni terlihat dari *Perang Salib dan Jihad.* Sepertinya peristiwa Selasa Kelabu tersebut merupakan klimaks dari bara api dan sekaligus menandai sebuah era baru yang bercirikan perseteruan global tengah berlangsung!.

BAGI INDONESIA, lagi-lagi persoalan kemudian muncul, dan apakah perlu konsep baru politik luar negeri kita dalam perkembangan global tersebut. Pertanyaan ini sangatlah relevan untuk dikemukakan karena, ***pertama***, dengan mencermati perkembangan dunia yang sedang terjadi yaitu kecenderungan baru konflik Islam-Kristen, dimana Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dengan 200 juta penduduknya. ***Kedua,*** ciri Indonesia sebagai negara yang pluralistik, yang memberikan ruang untuk hidup dan berkembangnya berbagai aliran dan agama (termasuk didalamnya Islam dan Kristen). Hal yang jika dikaitkan dengan perkembangan dunia tersebut , Indonesia akan merupakan wilayah yang rawan konflik.. ***Ketiga***, realita bahwa Indonesia sedang menghadapi persoalan yang laten yaitu krisis ekonomi dan beban hutang yang amat besar , notabena hutang tersebut hampir 100% berasal dari negera – negara barat 'blok' kristen. Dimana adanya kenyataan perkembangan politik global yang terjadi bisa mempengaruhi kondusifitas bagi pemulihan ekonomi dalam negeri akibat dampak peristiwa global tersebut.

TUNTUTAN UNTUK MENYIKAPI pergeseran zaman dan konfigurasi sistem internasional tersebut sangatlah mendesak untuk menghindarkan diri dari jeratan krisis yang semakin dalam. Posisi yang amat dilematik akan melanda politik luar negeri Indonesia. Padalah persoalan politik luar negari bagi negara memegang peranan yang sangat signifikan untuk menyikapi setiap perubahan global ini. Namun

setidaknya Indonesia sangat beruntung memiliki pondasi konsepsi politik luar negeri bebas aktif setidaknya akan menjadi cukup signifikan mengeleminasi pergeseran konfigurasi internasional tak seperti sebelum abad 21dan sesudah. Bahkan kita harus tetap dapat mempertahankan nya meskipun dunia sekarang ini tidak lagi terbelah secara diametral antara blok Timur dan blok Barat dalam pengertian Uni Soviet vs Amerika Serikat. Karena Pasca Pasca 11 September 2001, justru substansi politik luar negeri yang bebas aktif "mendayung diantara dua karang" tetap akan dan masih relevan meskipun dalam menghadapi fenomena ***Perang Salib dan Jihad*** sekalipun. Sikap dan ideologi politik luar negeri yang telah teruji dalam babak satu jaman ketika menghadapi perseteruan ideologi komunis *vis a vis* kapitalis di akhir abad 20. Bahkan lebih dari itu semangat yang telah ditanamkan bagi bangsa untuk memiliki peran dalam "menyatukan dunia" sebagaimana Bung Karno dalam pidatonya yang terkenal ditahun enam puluhan *"To Build to World A New"* bisa saja akan menjadi keniscayaan sejarah global tentang konsep ampuh perdamaian dunia dengan "mempancasilakan" dunia. Setidaknya Indonesia sebagai negara besar dan posisi dalam sejarahnya sebagai negara pelopor gerakan non blok akan menjadi fungsi stabilisator diantara dua kutub agama tersebut. INdonesia diharapkan juga dapat menjebatani kepentingan antara negara-negara Barat (baca : negara-negara Kristen) dengan negara-negara Timur (baca : negara-negara Islam). Disinilah tuntutan agar lembaga kementrian luar negeri Indonesia harus secara cerdas membaca perubahan zaman dan secara cerdas pula memanfaatkan potensi historis dan konsep ulung yang dimiliki Indonesia.

AKTUALISASI POLITIK LUAR NEGERI yang mendasarkan diri pada fenomena baru perseteruan global bagi Indonesia sangat penting, antara lain :

1. untuk memberikan pengertian yang sebenarnya terhadap persepsi internasional mengenai Islam yang kini terkesan sebagai komunitas yang destruktif dan anti-Kristen;
2. membangun sikap moderat yang toleran dan tidak terjerembab dalam arus pertentangan atau 'perang dingin' baru antara Islam dan Kristen;
3. membangun *bargaining position* terhadap negara-negara yang kini tengah berseteru dengan menjadikan Indonesia sebagai sentrum pengaruh bagi persoalan dunia;
4. memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan terhadap investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga *recovery* ekonomi dapat segera tercapai;
5. mencegah meluasnya sikap anti-AS yang berlanjut ke anti-Kristen sebagaimana realitas yang ada kini;
6. mencegah adanya disintegrasi sosial akibat implikasi politik global yang mendasarkan pada pertentangan agama.

BAGAIMANA CARANYA ? Salah satu yang dapat ditempuh adalah dengan mengakomodasi dan melibatkan para pemuka agama dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Disamping itu, perekrutan figur pemuka agama (ulama) untuk ikut berdiplomasi dan merasakan bagaimana keterkaitan sikap dalam negeri bangsa Indonesia dengan reaksi internasional yang sedang berkembang. Juga, tuntutan untuk mengendalikan ummatnya dalam bersikap terhadap perkembangan dunia serta keharusan untuk menempatkan posisi Islam Indonesia dalam percaturan politik global. Dan tentu maksudnya adalah agar tetap dapat

ditegakkan politik luar negri bebas aktif. Apa kata (ajakan) Bung Hatta yang terkenal yaitu "***Mendayung diantara dua karang***"

Jakarta, 17 Oktober 2001

VI – 05
ANTI IMPERIALISME, CAMKAN ITU BUNG!!

KRISIS GLOBAL sedang melanda dunia. Polarisasi sikap yang ditunjukkan negara-negara di belahan bumi dalam memahami perkembangan yang menunjukkan bahwa dunia ini telah terkooptasi oleh arus imperialisme dan kapitalisme baru dengan cover globalisasi. Stigmatisasi dan pola *deterrence* (ancaman) globalisasi yang sulit dipahami oleh bangsa-bangsa yang posisinya sebagai obyek dari kepentingan besar dibelakang (konsep glonalisasi) sebagai parameter tunggal penguasaan terhadap implikasi dan ekses daripada globalisasi itu sendiri.

AKSI MILITER AS ke Afghanistan pasca penyerangan oleh teroris (internasional) dan sikap pemerintah Taliban yang mengeksploitasi ummat Islam sebagai *bemper*-nya menunjukkan adanya kecenderungan yang sangat mengancam bagi perdamaian dunia adalah sebuah indikator adanya kegagapan bagi negara-negara obyek (negara berkembang) atas ekses tersebut. Dunia kini dijejali histeria ketakutan akan hadirnya perang terbuka yang meluas dan melibatkan negara-negara lain. Tentunya dapat dipastikan bahwa keterlibatan politik dan aksi militer dalam krisis global tersebut tak terlepas dari *interest* tujuan interaksi tersebut, reaksoner maupun revolusioner. Dengan adanya kesudahan perang dingin antara blok barat dan timur, krisis

global berikutnya adalah multi krisis dunia yang lebih "konseptual" . Artinya negara-negara berkembang dan khususnya si-Adi Kuasa Amerika Serikat memiliki peran bahwa boleh dibilang sebagai konseptor intelektual bagi momok globalisasi yang menguras energi seluruh umat didunia ini? Ekonomi sebagai salah satu motif (latar belakang) yang bersifat sangat utama khusus, dapat dijadikan corner analisis tersendiri. Karena bagaimanapun kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dan perangkat alat militer dapat dipandang sebagai konsekuensi logis atas tujuan ekonomi. Kalkulasi ekonomi dunia yang kapitalistik sebagai ciri yang sangat menonjol daripada globalisasi dipandang lebih mengemuka dari pada upaya untuk membentuk tata dunia yang humanis yang bercirikan keadilan dan kenyamanan.

AKAR IDEOLOGIS. Kecemasan dunia yang terjadi sekarang ini adalah merupakan gejala psiko-politik akibat perilaku global. Sumber penyebab dari akar ideologisnya dan praksis neo-imperialisme yang merupakan "kakak beradik" dengan kapitalisme dunia. Mengapa ? Kapitalisme adalah dominasi dan eksploitasi dalam upaya akumulasi kapital. Sedangkan imperialisme merupakan bentuk-bentuk perilaku ekonomi penciptaan penguasaan dan perluasan pasar. Dengan kata lain kapitalisme telah terlibat dan menyatu dalam proses metamorfosa imperialisme. Pada pasca era perang dingin dan perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, tuntutan untuk membuka dan menciptakan pasar pasar global tersebut tentu mengandung konsekuensi pelebaran portofolio, investasi dan menyebarnya asset ekonomi global yang "dipaksakan" bagi setiap negara untuk dapat *survive.* Perkembangan dunia kini juga ditandai dengan semakin menipisnya asset negara bagi negara-negara tersebut, akibat daripada penghisapan dan perusakan budaya dan system

yang memberikan identitas bangsa menuju kebarat-baratan, hilangnya identitas dan sumber-sumber sumber ekonomi negara-negara ketika dan apalagi negara miskin dan kemudian terciptanya ketergantungan yang amat besar terhadap ekonomi internasional (Global). Inilah yang oleh Bung Karno ditahun enam puluhan mengatakan bahwa "*....kita sedang menghadapi neo imperialisme dan neo kapitalisme barat yang sangat menmbahayakan. Ia adalah bagaikan gurita raksasa yang akan menjerat kita didalam kekeuasaannya, bidang ekonomi dan budaya!*". Oleh karena itu, perebutan asset ekonomi dunia akan menjadi wilayah ketegangan baru dalam tata hubungan antar negara di dunia ini adalah bagian interaksi ideologi global yang kini sedang berlangsung..

MASALAH TERORISME. Bagaimana mencermati perkembangan global dalam isue terorisme dewasa ini? Tanpa mengenyampingkan sikap dan upaya-upaya untuk memerangi terorisme dunia dalam prespektif kepentingan yang lebih besar dibelakangnya, maka upaya AS untuk menghancurkan teroris (internasional) dengan sasaran tembak Afganistan patut dicermati pula. Karena bukan tidak mungkin dengan kecurigaan bahwa gerakan anti teroris adalah merupakan strategi politik AS dalam rangka merebut pengaruh dunia terhadap penguasaan ekonomi (pasar) dan produksi diwilayah sekitar Afghanistan. Karena, dibawah ini beberapa fakta dan indikasi ini antara lain :

a. Pada tahun 1990-an, AS punya pengalaman buruk ketika pembangunan pipa minyak yang direncanakan mulai dari Asia Tengah, Asia Selatan (Afganistan), hingga Karachi (Pakistan) gagal. Pembangunan pipa minyak antarnegara yang menggunakan 80 persen modal AS itu batal karena pertimbangan keamanan. Ketika itu pihak

Taliban minta pembagian besar karena pipa tersebut melintasi Afganistan.

b. Di Afganistan yang berada di Asia Selatan ini terdapat banyak uranium dan kekayaan alam lainnya. Belum lagi potensi-potensi bisnis di Asia Tengah yang terdapat di negara-negara yang baru merdeka dari Rusia.
c. Uzbekistan dan Turkmenistan yang berada di Asia Tengah, misalnya, memiliki sumber daya alam besar yang hingga sekarang belum terjamah. Negara kuat seperti AS yang mempunyai teknologi tinggi akan mampu mengeksploitasi sumber daya alam yang ada
d. Adanya pergeseran issue dari pencarian Osama bin Laden ke penggulingan pemerintahan Taliban. Memang *main issue* tetap pada upaya memerangi terorisme dunia, namun langkah-langkah politik yang digunakan adalah sebuah upaya untuk menggulingkan pemerintahan Afghanistan, yang bagi AS merupakan pangkal kegagalan dalam membangun imperium bisnisnya di Asia Tengah dan Asia Selatan.
e. Dukungan terhadap AS kebanyakan adalah negara-negara kapitalis yang mempunyai kepentingan langsung terhadap asset ekonomi di Afghanistan.

Dari sini terlihat jelas bahwa tragedi kemanusiaan 11 September 2001 yang mengguncang dunia telah dieksploitir oleh pihak korban, Amerika Serikat sendiri dan kemudian dijadikan sebagai rasionalisasi invasi militer AS ke Afghanistan dalam upaya menancapkan kuku kekuasaannya bagi obsesi kapital AS dan negara-negara sekutunya di-Afganistan dan sekitarnya. Jadi bisa saja gerakan memerangi terorisme merupakan kedok untuk mempermudah dan mencari pembenaran atas resiko tragedi kemanusiaan di Afghanistan.

SIKAP INDONESIA. Secara moral ideologis, Afganistan adalah lebih baik dari Indonesia. Artinya Afganistan lebih konsisten dalam menolak dan memerangi Imperialisme Amerika. Sedangkan Indonesia lebih dahulu jatuh terperangkap arus kapitalisme dan imperialisme. Meski dari Indonesialah perlawanan secara konseptual melalui pembangunan solidaritas Asia Afrika, The New Emerging Forces (Nefos) dilahirkan oleh salah satu bidan Soekarno. Kini jangan moralitas bangsa jangan lagi diukur apalagi dipersandingkan dengan ketika masa Soekarno. Indonesia kini sangat terjepit! dibawah karang besar Imperialisme dan Kapitalisme. Hutang luar negeri secara akumulait sebasar 150 milyar dollar AS bukanlah hal yang sederhana. Oleh karena itu wajar bahwa sikap pemerintah Indonesia terkesan *lembek* dan sangat *lamban* dalam menyikapi invasi militer AS ke Afghanistan menyusul tragedi serangan bom yang beruntun pada gedung WTC dam Gedung Petagon di Amerika Serikat, dapat kiranya dapat dimaklumi Indonesia kesulitan menemukan fatsun politik perlawanan terhadap Amerika Serikat yang kapitalis dan imperialis itu, yang notabena sebagai stakeholder kapitalisme di Indonesia. Sedangkan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas Islam dapat dinilai oleh dunia sebagai sikap ambigu dan a-historis.Menagapa? Karena ketika Bung Karno berteriak "*Goto Hell With Your Aids*", pad atahun enam puluhan, justru dari kelompok islam (politik)-lah terutama yang dipelopori oleh tokoh-totoh pemuka Masyumi kurang merespon dan cenderung menolak gerakan dan retorik "anti nekolim" yang kemudian diindentikan dengan gerakan komunis di Indonesia. Bahkan ketika meletusnya G 30 S / PKI – Bung Karno sempat dituduh sebagai Komunis dan terlibat dalam Gerakan yang memakan korban 7 jendral itu. Ironisnya bahwa dalam pembangunan di era Orde Baru dulu, pemerintaah lebih banyak

mengakomodasi tokoh-tokoh Masyumi dan PSI. Terutama bagi tokoh yang dianggapnya pakar dan politisi ekonomi yang kemudian secara semena mengusung teori dan praksis ekonomi ala *Barkeley*. Ekonomi yang cenderung kebarat dan kapitalistik sebagaimana yang dirasakan sekarang ini. Pada era Orde Baru itu pula de-Sukarnoisasi terjadi. Soekarno oleh Orde Baru dijadikan simbul "kenistaan" yang anti amerika dan "kekiri-kirian.". Ajaran Soekarno tentang Ekonomi Berdikari dinafikan dan dibalik kedalam ekonomi kapitalistik kemudian melejitnya jargon Ekonomi kerakyatan yang sama artinya menstabilkan rakyat untuk tetap dalam keadaan melarat. Sementara sumber daya alam Indonesia yang subur itu telah di-hisap habis-habiskan atas dalih stabilitas ekonomi dan demi kemakmuran rakyat dibawah antek Imperialisme Soeharto. Oleh karena itu "*Go To Hell With Your Aids*" itu...dulu dan sekarang adalah idealisme dan kemunafikan kita. Kita telah dipaksa menelan abunya dan bukan apinya anti Imperialisme dan Kapitalisme. Oleh karena itu akibatnya, Indonesia tak mampu lagi bersikap secara tegas terhadap invasi militer AS ke Afganistan atas alasan yang kuat, dengan api semangat revolusioner Soekarno terhadap Imperialisme dan Kapitalisme. Kecuali dengan atasan "*Ikut menciptakan perdamaian dunia*" sebagaimana amanat UUD 1945 dan dengan alasan yang lebih normatif dan praksis menumpas kekerasan (terorisme) internasional.

DALAM KONTEKS ISLAM. Indonesia memiliki penduduk mayoritas Islam dan tentu saja menjadi sangat beralasan ketika penduduk yang mayoritas Islam tersebut memiliki solidaritas yang tinggi terhadap negara yang memiliki mayoritas yang sama, beragama Islam. Dan sebagai konsekuensi dari azas pancasila dan UUD 1945 yang menegaskan tentang hubungan antara negara dan agama.

maka tanpa harus menyeret negara secara formal dan frontal, para muslim yang memiliki militansi tinggi tidak perlu dinafikan untuk berjihad. Maksudnya adalah bahwa negara melalui tidak perlu menghalang-halangi menyampaikan aspirasinya, berdemo dan juga termasuk mereka yang akan berangkat ke Afganistan untuk berperang melawan invasi militer Amerika Serikat di Afganistan yang nota bene mengancam penduduk sipil yang (pasti) beragama Islam. Sejauh memiliki komitmen dan integritas moral bahwa mereka yang berjihad itu adalah semata karena tuntutan hatinuraninya sebagai orang muslim, yang akan menghasilkan memaslahatan bagi masyarakat muslim didunia khususnya di Indonesia, dan bukan hanya untuk masyarakat muslim di Afganistan. Hal yang sebenarnya masih dalam koridor interprestasi kebijakan pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden Megawati pada Peringatan Isra' Mi'raj (15 Oktober 2001) menyinggung konteksual pemulihan ekonomi dengan memberi gambaran secara jelas posisi Indonesia terhadap perkembangan global tersebut. Pemerintah amat tegas mengecam Amerika Serikat dalam "membalas" serangan 11 September 2001 dengan membasmi terorisme dunia dengan cara melakukan invasi militer terhadap Afghanistan.

GERAKAN NON BLOK. Sebagai tindak lanjut seharusnya pemerintah segera pula melakukan (gerakan) diplomasi internasional dengan menggunakan pengaruh Indonesia terhadap Gerakan Non Blok dalam rangka memberikan tekanan-tekanan psikologis (setidaknya) terhadap Amerika Serikat. Kewibawaan dunia ketiga atau yang disebut oleh gerakan *The New Emerging Forces (Nefos)* perlu ditegakkan kembali!. Agar Indonesia tetap dapat mempertahankan citra komitmennya terhadap keikut sertaan menciptakan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk kekerasan.

Karena tanpa itu, dominasi dan eksploitasi bangsa atas bangsa akan terus berlangsung. Oleh karena itu soliditas dan spirit bersama untuk melawan dominasi imperialisme, kapitalisme dan termasuk dalam konteks politik dunia kontemporer merupakan sumber daripada terorisme internasional, sekali lagi Indonesia memang harus tegas. Anti Imperialisme, Kapitalisme dan Terorisme!. Ketegasan yang tegas dan sangat strategis dalam rangka pula memisahkan persoalan keterikatan ekonomi dengan masalah ideologis dan kemanusiaan!. Meski dalam konteks konfigurasi global, lembaga internasional PBB yang bertugas untuk menjaga perdamaian dunia pun telah terkontaminasi oleh kepentingan kapitalis. Oleh sekarena itu sekali lagi perlunya menggalang kerja sama dan pembentukan aliansi-aliansi strategis atas dasar persamaan persepsi dalam memandang perkembangan dunia harus dilakukan. Oleh karena itu, posisi Gerakan Non-Blok, ASEAN dan Aliansi Selatan-Selatan masih sangat relevan dan signifikan untuk mencegah semakin merasuknya dominasi kapitalisme. Dengan pemahaman bahwasanya fenomena perang AS-Afghanistan memang bukan hanya masalah yang berlatar belakang terorisme, akan tetapi fenomena motif ekonomi yang diusung Imperialisme dan kapitalisme global. Itulah kenyataannya....! Dan itulah hendaknya kita perlu melakukan re-aktualisasi ajaran Bung Karno.

Anti Imperialisme – Camkan itu Bung !.

Kalibata, 18 Oktober 2001

DAFTAR BACAAN

A

- *Agenda Pemerintahan Baru*, Kompas, 29 Juli 2001
- *Aksi Sejuta Ummat & Issu Negara Islam*, Dialog Internet, Wihdah Prees, Yogyakarta, 2000
- *Amerika Menyerang, Jihad Menghadang*, Detik.com, 2 Oktober 2001
- *Ancaman Fundamentalis-Rajutan Islam Politik & Kekacauan Dunia Baru*, Bassam Tibi, Tiara Wacana
- *AS-Afghanistan Bertarung, RI Bingung*, Detik.com, 10 Oktober 2001

B

- *Belantara Kebangsaan*, AR. Loebis, Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2001
- *Bung Karno "Penyambung Lidah Rakyat"*, Cindy Adam, GUnung Agung, Jakarta, 1966
- *Birokrasi Militer dan Partai Politik dalam Negara Transisi*, Zainuddin Maliki, Galang Prees
- *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Iman Toto.K. Rahardja, dkk (Editor), Grasindo, Jakarta, 2001
- *Bung Karno dan Tata Dunia Baru,*, Iman Toto.K. Rahardja, dkk (Editor), Grasindo, Jakarta, 2001
- *Bung Karno dan Wacana Islam*, Iman Toto.K. Rahardja, dkk (Editor), Grasindo, Jakarta, 2001

C

- *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*, Ahmad Baso, Pustaka Hidayah, Bandung, 1999

D

- *Demokratisasi Politik & Perspektifnya*, Effendy M. Siregar, Pustaka Mari Belajar, Jakarta, 1992

E

- *Era Baru Indonesia*-Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz,Matori Abdul Djalil, Nur Mahmudi, Yusril Ihza Mahendra, Kholida Novianto, Al Choida

F

- *Fiqih Kewarganegaraan Intervensi Agama-Negara terhadap Masyarakat Sipil*, Mohammad AS Hikam, Dkk, PB PMII, Jakarta, 2000

G

- *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Syifullah, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997

I

- Ideologi dan Teknologi Dalam Pembangunan Bangsa (Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosio-Kultiral), Sartono Kartodirdjo, Penerbit Pabelan Jayakarta, Jakarta, 1999
- *Indonesia Menggapai Demokrasi*, Bondan Gunawan S
- *Indonesia Menggugat (Pidato Pembelaan Bung Karno Di Muka Hakim Kolonial)*, Ir Soekarno, Tarawang, Yogyakarta, 2001
- *Islam, Negara dan Demokrasi*, Abdurahman Wahid, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999

K

- *Konflik Politik Dalam Prespektif Kebangsaan, H Bambang Pranoto, Sekretariat Jenderal FKA GMNI, Jakarta 2001*
- *KAHMI, Reformasi dan Civil Sociaty*, Ambia, dkk (Editor), Majelis Nasional KAHMI, Jakarta, 2000
- *Koalisi Mengganti Gus Dur atau Mencari Solusi ?* Dari curah pendapat anggota MPR/DPR, Anwari W M K, Dkk, LP3S, Jakarta, 2000
- *Kiri Islam, Antara Modernisme dan Postmodernisme*, Kazuo Shimogaki, LKiS, Yogyakarta, 1993
- *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis*, Alex Dinuth

DAFTAR BACAAN

A

- *Agenda Pemerintahan Baru*, Kompas, 29 Juli 2001
- *Aksi Sejuta Ummat & Issu Negara Islam*, Dialog Internet, Wihdah Prees, Yogyakarta, 2000
- *Amerika Menyerang, Jihad Menghadang*, Detik.com, 2 Oktober 2001
- *Ancaman Fundamentalis-Rajutan Islam Politik & Kekacauan Dunia Baru*, Bassam Tibi, Tiara Wacana
- *AS-Afghanistan Bertarung, RI Bingung*, Detik.com, 10 Oktober 2001

B

- *Belantara Kebangsaan*, AR. Loebis, Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2001
- *Bung Karno "Penyambung Lidah Rakyat"*, Cindy Adam, GUnung Agung, Jakarta, 1966
- *Birokrasi Militer dan Partai Politik dalam Negara Transisi*, Zainuddin Maliki, Galang Prees
- *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Iman Toto.K. Rahardja, dkk (Editor), Grasindo, Jakarta, 2001
- *Bung Karno dan Tata Dunia Baru,*, Iman Toto.K. Rahardja, dkk (Editor), Grasindo, Jakarta, 2001
- *Bung Karno dan Wacana Islam*, Iman Toto.K. Rahardja, dkk (Editor), Grasindo, Jakarta, 2001

C

- *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*, Ahmad Baso, Pustaka Hidayah, Bandung, 1999

D

- *Demokratisasi Politik & Perspektifnya*, Effendy M. Siregar, Pustaka Mari Belajar, Jakarta, 1992

E

- *Era Baru Indonesia*-Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz,Matori Abdul Djalil, Nur Mahmudi, Yusril Ihza Mahendra, Kholida Novianto, Al Choida

F

- *Fiqih Kewarganegaraan Intervensi Agama-Negara terhadap Masyarakat Sipil*, Mohammad AS Hikam, Dkk, PB PMII, Jakarta, 2000

G

- *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Syifullah, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997

I

- Ideologi dan Teknologi Dalam Pembangunan Bangsa (Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosio-Kultiral), Sartono Kartodirdjo, Penerbit Pabelan Jayakarta, Jakarta, 1999
- *Indonesia Menggapai Demokrasi*, Bondan Gunawan S
- *Indonesia Menggugat (Pidato Pembelaan Bung Karno Di Muka Hakim Kolonial)*, Ir Soekarno, Tarawang, Yogyakarta, 2001
- *Islam, Negara dan Demokrasi*, Abdurahman Wahid, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999

K

- *Konflik Politik Dalam Prespektif Kebangsaan, H Bambang Pranoto, Sekretariat Jenderal FKA GMNI, Jakarta 2001*
- *KAHMI, Reformasi dan Civil Sociaty*, Ambia, dkk (Editor), Majelis Nasional KAHMI, Jakarta, 2000
- *Koalisi Mengganti Gus Dur atau Mencari Solusi ?* Dari curah pendapat anggota MPR/DPR, Anwari W M K, Dkk, LP3S, Jakarta, 2000
- *Kiri Islam, Antara Modernisme dan Postmodernisme*, Kazuo Shimogaki, LKiS, Yogyakarta, 1993
- *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis*, Alex Dinuth

- *Kronik Revolusi Indonesia,* Pramoedya Ananta Toer, Koeselan Soebagyo Toer, Kepustakaan Populer Gramedia
- *Kiri antara Modernisme dan postmodernisme Islam,* Kazuo Shimogaki, LkiS

M

- *Megawati Api Di Dada Rakyat,* Erteo Soedarto, dkk.(Editor), PT Budhidaya Pilar Sakti, Jakarta.
- *Megawati Soekarnoputri, Harapan & Tantangan dikursi Wapres RI,* Sidharta Gautama, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- *Megawati Usaha Taklukan Badai,* Agus Harimulyana, Satrio Arismunandar, mBoro Kinasih, Jakarta, 1999
- *Membangun Organisasi Rakyat,* Danis Murphi, URM Indonesia Jakarta
- *Membangun Politik Ekonomi Indonesia (Strategi Menciptakan Keadilan),* Hamzah Haz, Pustaka Ciganjur, Jakarta, 2001
- *Mengurai Hubungan Agama dan Negara,* Abdurahman Wahid, Grasindo, Jakarta, 1999
- *Menyorot Kabinet Gotong Royong,* Detik.com, 10 Agustus 2001.
- *Marxisme Revolusi Sosial Dunia Islam,* Brian S Turner
- *Militer dan Politik di Indonesia,* Harold Crouch, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999

N

- *Negara dan Peminggiran Islam Politik,* M Rusli Karim, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999
- *NU dan Islam Politik Di Era Reformasi,* Bahtiar Effendy, dkk., Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2001

P

- *Paham Demokrasi Kepemimpinan dan Iptek Dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto,* Hartono D.E.S, Patma Pathook Yogyakarta
- *Pemilu 1955 di Indonesia,* Herbert Feith, Kepustakaan Populer Gramedia
- *Pemilu 1999* : Demokrasi atau Rebutan Kursi ?, Pax Benedanto (Penyunting), LSPP, Jakarta, 1999
- *Penjahat Gaya (Orde) Baru Eksplorasi Politik dan Kriminalitas,* James T Siegel, LKiS, Yogyakarta, 2000
- *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi,* Saifullah Yusuf, Fahrudin Salim, PP GP Ansor, 2000

R

- *Rakyat, Korban Ambisi Politik, H Bambang Pranoto, Sekretariat Jenderal FKA GMNI, Semarang 2000.*
- *JakartaRakyat kecil, Islam, dan Politik*, Martin Van Bruinessen, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1998
- *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan pertama UUD 1945*, SIamet Effendi Yusuf, Umar Basalim, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2000
- *Reformasi, Kebebasan Ideologi dan Bangkitnya Masyarakat NASAKOM Baru masa depan Bangsa dan Kontroversi pencabutan TAP XXV/MPRS/1966*, Dr. R. Soejadi, S.H, S.U, Paradigma, Yogyakarta, 2000

T

- *Tidak ada Negara Islam* surat-surat Politik Nurcholish Madjid – Mohammad Roem, Djambatan, Jakarta, 2000
- *Tragedi Megawati Revisi Politik Massa di Indonesia*, Andi Setiono, dkk. (Editor), Tarawang, Yogyakarta, 2000.

W

- *Wawancara Imajiner dengan Bung Karno*, Christian Wibisono
- *50 Tahun Indonesia – Amerika*, Paul F. Gardner, Pustaka Sinar
- Harapan, Jakarta, 1999

S

- Solusi (siadang) Istimewa Konflik Politik, H Bambang Pranoto, Sekretariat Jenderal FKA GMNI, Jakarta 2001.
- *Seabad Babad Nusantara*, Gatra, 2000
- *Sikap Indonesia dan Nasib Ekonominya*, Kompas, 7 Oktober 2001
- *Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam (Sebuah Catatan Sudut Pandang)*, Lazuardi Adi Sage, Jakarta Citra Media, Jakarta, 1996

- *Kronik Revolusi Indonesia,* Pramoedya Ananta Toer, Koeselan Soebagyo Toer, Kepustakaan Populer Gramedia
- *Kiri antara Modernisme dan postmodernisme Islam,* Kazuo Shimogaki, LkiS

M

- *Megawati Api Di Dada Rakyat,* Erteo Soedarto, dkk.(Editor), PT Budhidaya Pilar Sakti, Jakarta.
- *Megawati Soekarnoputri, Harapan & Tantangan dikursi Wapres RI,* Sidharta Gautama, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- *Megawati Usaha Taklukan Badai,* Agus Harimulyana, Satrio Arismunandar, mBoro Kinasih, Jakarta, 1999
- *Membangun Organisasi Rakyat,* Danis Murphi, URM Indonesia Jakarta
- *Membangun Politik Ekonomi Indonesia (Strategi Menciptakan Keadilan),* Hamzah Haz, Pustaka Ciganjur, Jakarta, 2001
- *Mengurai Hubungan Agama dan Negara,* Abdurahman Wahid, Grasindo, Jakarta, 1999
- *Menyorot Kabinet Gotong Royong,* Detik.com, 10 Agustus 2001.
- *Marxisme Revolusi Sosial Dunia Islam,* Brian S Turner
- *Militer dan Politik di Indonesia,* Harold Crouch, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999

N

- *Negara dan Peminggiran Islam Politik,* M Rusli Karim, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999
- *NU dan Islam Politik Di Era Reformasi,* Bahtiar Effendy, dkk., Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2001

P

- *Paham Demokrasi Kepemimpinan dan Iptek Dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto,* Hartono D.E.S, Patma Pathook Yogyakarta
- *Pemilu 1955 di Indonesia,* Herbert Feith, Kepustakaan Populer Gramedia
- *Pemilu 1999* : Demokrasi atau Rebutan Kursi ?, Pax Benedanto (Penyunting), LSPP, Jakarta, 1999
- *Penjahat Gaya (Orde) Baru Eksplorasi Politik dan Kriminalitas,* James T Siegel, LKiS, Yogyakarta, 2000
- *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi,* Saifullah Yusuf, Fahrudin Salim, PP GP Ansor, 2000

R

- *Rakyat, Korban Ambisi Politik, H Bambang Pranoto, Sekretariat Jenderal FKA GMNI, Semarang 2000.*
- *JakartaRakyat kecil, Islam, dan Politik*, Martin Van Bruinessen, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1998
- *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan pertama UUD 1945*, Slamet Effendi Yusuf, Umar Basalim, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2000
- *Reformasi, Kebebasan Ideologi dan Bangkitnya Masyarakat NASAKOM Baru masa depan Bangsa dan Kontroversi pencabutan TAP XXV/MPRS/1966*, Dr. R. Soejadi, S.H, S.U, Paradigma, Yogyakarta, 2000

T

- *Tidak ada Negara Islam* surat-surat Politik Nurcholish Madjid – Mohammad Roem, Djambatan, Jakarta, 2000
- *Tragedi Megawati Revisi Politik Massa di Indonesia*, Andi Setiono, dkk. (Editor), Tarawang, Yogyakarta, 2000.

W

- *Wawancara Imajiner dengan Bung Karno*, Christian Wibisono
- *50 Tahun Indonesia – Amerika*, Paul F. Gardner, Pustaka Sinar
- Harapan, Jakarta, 1999

S

- Solusi (siadang) Istimewa Konflik Politik, H Bambang Pranoto, Sekretariat Jenderal FKA GMNI, Jakarta 2001.
- *Seabad Babad Nusantara*, Gatra, 2000
- *Sikap Indonesia dan Nasib Ekonominya*, Kompas, 7 Oktober 2001
- *Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam (Sebuah Catatan Sudut Pandang)*, Lazuardi Adi Sage, Jakarta Citra Media, Jakarta, 1996